



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

INTRODUCTION

Puji and Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, because only with His grace and mercy, we can carry out the tasks of the Government and one of them is to be able to complete the preparation of the Regional Financial Report (LKPD) on the implementation of the Budget Revenue and Expenditure of the Provincial Government of Nusa Tenggara Timur for the 2025 Budget according to the provisions of the laws.

The main purpose of Law Number 1 of 2022 on the Relationship of Finance between the Central Government and the Regional Government and Law Number 23 of 2014 on the Regional Government is that the Regional Government is given the authority to increase efficiency and effectiveness of financial resource management that is owned by the region in order to realize the improvement of the welfare and service to the community in the region.

According to Article 320 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 on the Regional Government, it is mandated that the Regional Financial Report of the Regional Government includes a) Report of Budget Realization; b) Report of Budget Balance Change, c) Statement, d) Operational Report, e) Cash Flow Report, f) Report of Change in Equity, and g) Notes on the Regional Financial Report accompanied by a Summary of the Regional Financial Report of the Regional Enterprise (BUMD).

Based on the provisions above, the Provincial Government of Nusa Tenggara Timur has prepared the Regional Financial Report on the Implementation of APBD for the 2025 Budget which consists of the Report of Budget Realization, Report of Budget Balance Change, Statement, Operational Report, Cash Flow Report, Report of Change in Equity and Notes on the Regional Financial Report.

Generally, the purpose of the preparation of the Regional Financial Report of the Regional Government is to provide information that is relevant regarding the financial position from all transactions that are carried out by the Regional Government during one reporting period and used to compare the realization of revenue, expenditure and financing with the budget that has been set, evaluate the financial condition, evaluate the effectiveness and efficiency of the Regional Government and compliance with the Regulations and Laws that are in force in the field of Financial Management.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Kedua acuan tersebut telah dijabarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini tersebut merupakan salah satu bentuk penilaian atau tolak ukur kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan LKPD tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

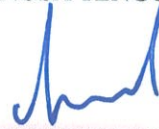
Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum berjalan secara baik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya agar Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami pengaruh yang signifikan antara perencanaan, pelaksanaan dan realisasinya. Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 terealisasi senilai Rp4.556.786.610.641,35 atau sebesar 89,56% dari target senilai Rp5.088.144.463.292,00. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah terealisasi senilai Rp4.298.309.595.676,84 atau sebesar 82,86% dari target belanja daerah senilai Rp5.187.494.103.513,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya, realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp277.743.281.855,39 atau turun sebesar 5,74%, dan realisasi Belanja Daerah juga mengalami penurunan senilai Rp 436.113.327.201,47 atau turun sebesar 9,21%.

Penyajian lengkap Laporan Keuangan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maupun Aset Daerah telah tersaji secara lengkap pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

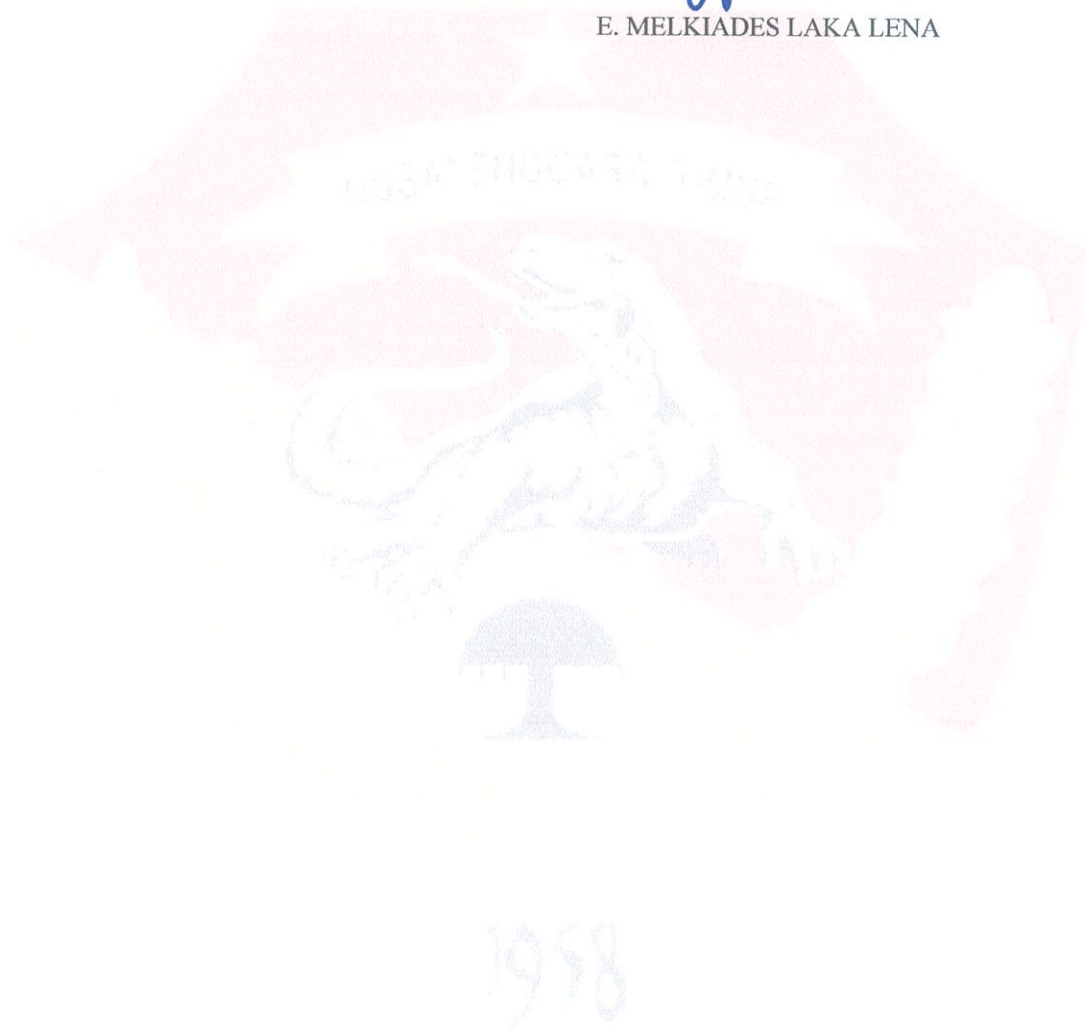
Pemerintah menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang ada khususnya terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai dari Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Oleh karena itu Pemerintah mengharapkan saran, pendapat dan kritik dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan Pelaksanaan APBD, khususnya terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, sebagai wujud kewajiban Pemerintah atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat waktu, tepat

sasaran, transparan dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Teriring salam dan doa, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati usaha dan karya kita semua.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir Adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua.

Kupang, 31 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Palapa No 6 Oebobo Kupang 85111

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

Kupang, 27 Maret 2026

Nomor : IP.777/18 /2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur

di -

Kupang

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua Informasi yang dibuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (AP).

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pemerintah Daerah;
- e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/IJ tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Reviu Laporan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- h. Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.800.1.11.1/67/ST/K/2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- i. Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.800.1.11.1/97b/ST/K/2026 tanggal 17 Februari 2026 tentang pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025;
- j. Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.800.1.11.1/99b/ST/K/2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang Melakukan Lanjutan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 19 Februari 2026 s.d 28 Februari 2026 dilanjutkan tanggal 05 Maret s.d 15 Maret 2026 dan tanggal 16 Maret s.d 30 Maret 2026.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan Reviu atas LKPD adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Sasaran Reviu adalah Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Simpulan

Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan prosedur analisis secara vertikal dan horisontal dan reviu terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK – SKPD) dengan rincian sebagai berikut :

a. Analisis Vertikal

Analisis vertikal dilakukan untuk menguji keandalan penyajian masing-masing laporan, yaitu :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2) Neraca terdiri dari : Aset, Kewajiban dan Ekuitas;
- 3) Laporan Arus Kas, terdiri dari : Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Kenaikan/Penurunan Kas dan Saldo Akhir Kas di BUD;
- 4) Laporan Operasional terdiri dari : Pendapatan-LO, Belanja-LO dan surplus/defisit;
- 5) Laporan Perubahan SAL.

b. Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan untuk menguji keandalan penyajian dan korelasi antar laporan yaitu :

- 1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca;
- 2) Analisis horizontal antara LRA dan LAK;
- 3) Analisis horizontal antara Neraca dan LAK;
- 4) Analisis horizontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca;
- 5) Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca.

Rincian Analisis Vertikal dan Analisis Horizontal (lampiran 1) dan catatan reviu terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK – SKPD) (lampiran 2) sebagaimana terlampir.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian hasil reviu disampaikan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Inspektur,



Stefanus F. Halla, S.T, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730105 200012 1 004

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS ITDA PROV. NTT	
PENGENDALI TEKNIS	
KETUA TIM	

LAMPIRAN HASIL REVIU

❖ Lampiran 1: Analisis Vertikal dan Horisontal.

❖ a. ANALISIS VERTIKAL

1) Analisis vertikal dalam LRA

Uraian		Persamaan
SiLPA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja dan transfer ditambah total penerimaan pembiayaan dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan		SiLPA = Total Pendapatan – Total Belanja dan Transfer + Total Penerimaan Pembiayaan – Total Pengeluaran Pembiayaan
RUMUS:		
SILPA LRA THN BERJALAN	:	362.193.227.626,64
TOTAL PENDAPATAN	:	4.556.790.235.767,11
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	:	4.298.134.676.184,84
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	:	262.829.210.192,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	:	159.291.542.148,00
Selisih	:	-0,00

2) Analisis vertikal dalam Neraca

Uraian		Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas.		Aset = Kewajiban + Ekuitas
RUMUS		
ASET	:	12.859.400.204.651,90
KEWAJIBAN	:	722.771.104.913,96
EKUITAS	:	12.136.629.099.737,90
Selisih	:	0,04
PENJELASAN: selisih terjadi karena kelemahan excel yang tidak dapat mengakomodir angka lebih dari 14 digit		
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.		Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran
RUMUS		
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	28.137.500,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR	:	28.137.500,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	0,00
Selisih	:	0,00

LAMPIRAN HASIL REVIU

❖ Lampiran 1: Analisis Vertikal dan Horisontal.

❖ a. ANALISIS VERTIKAL

1) Analisis vertikal dalam LRA

Uraian		Persamaan
SiLPA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja dan transfer ditambah total penerimaan pembiayaan dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan		SiLPA = Total Pendapatan – Total Belanja dan Transfer + Total Penerimaan Pembiayaan – Total Pengeluaran Pembiayaan
RUMUS:		
SILPA LRA THN BERJALAN	:	362.193.227.626,64
TOTAL PENDAPATAN	:	4.556.790.235.767,11
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	:	4.298.134.676.184,84
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	:	262.829.210.192,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	:	159.291.542.148,00
Selisih	:	-0,00

2) Analisis vertikal dalam Neraca

Uraian		Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas.		Aset = Kewajiban + Ekuitas
RUMUS		
ASET	:	12.859.400.204.651,90
KEWAJIBAN	:	722.771.104.913,96
EKUITAS	:	12.136.629.099.737,90
Selisih	:	0,04
PENJELASAN: selisih terjadi karena kelemahan excel yang tidak dapat mengakomodir angka lebih dari 14 digit		
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.		Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran
RUMUS		
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	28.137.500,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR	:	28.137.500,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	0,00
Selisih	:	0,00

3) Analisis vertikal dalam LAK

Uraian		Persamaan
Arus kas bersih dari aktivitas operasi harus sama dengan arus masuk kas dari aktivitas operasi dikurangi arus keluar kas dari aktivitas operasi.		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
RUMUS		
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI	:	612.939.970.508,20
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS OPERASI	:	4.556.648.637.914,11
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS OPERASI	:	3.943.708.667.405,91
Selisih	:	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
RUMUS		
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI	:	(354.284.410.925,93)
ARUS MASUK KAS AKT. INVESTASI	:	141.597.853,00
ARUS KELUAR KAS AKT. INVESTASI	:	354.426.008.778,93
Selisih	:	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan
RUMUS		
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	:	(159.291.542.148,00)
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS PENDANAAN	:	-
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN	:	159.291.542.148,00
Selisih	:	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris ditambah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris + Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
RUMUS		
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS TRANSITORIS	:	2.730.800.281,85
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	:	240.261.515.692,16
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	:	237.530.715.410,31
Selisih	:	0,00

Kenaikan/Penurunan Kas harus sama dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.		Kenaikan/Penurunan Kas = Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
RUMUS			
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	:	102.094.817.716,12	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI	:	612.939.970.508,20	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI	:	(354.284.410.925,93)	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	:	(159.291.542.148,00)	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS TRANSITORIS	:	2.730.800.281,85	
Selisih	:		0,00
Saldo Akhir Kas di BUD harus sama dengan Saldo Awal Kas di BUD ditambah Kenaikan/ Penurunan Kas		Saldo Akhir Kas di BUD = Saldo Awal Kas di BUD + Kenaikan/Penurunan Kas	
RUMUS			
SALDO AKHIR KAS BUD	:	365.360.098.596,49	
SALDO AWAL KAS BUD	:	263.265.280.880,37	
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	:	102.094.817.716,12	
Selisih	:		(0,00)
Saldo Akhir Kas harus sama dengan Saldo Akhir di BUD ditambah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan + Saldo Akhir Kas di BLUD		Saldo Akhir Kas = Saldo Akhir di BUD + Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran + Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan + Saldo Akhir Kas di BLUD	
RUMUS			
SALDO AKHIR KAS	:	365.360.098.596,49	
SALDO AKHIR KAS DI BUD	:	342.184.390.452,08	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	28.137.500,00	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	:	-	
SALDO AKHIR KAS DI BLUD	:	18.989.287.257,79	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA DANA BOS	:	991.137.920,00	
Selisih	:		3.167.145.466,62

4) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional (LO)

Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO)	Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Pos Luar Biasa (LO)
RUMUS	
SURPLUS (DEFISIT) LO	:
	(188.233.598.511,17)
TOTAL PENDAPATAN (LO)	:
	4.971.820.140.982,08
TOTAL BEBAN (LO)	:
	5.159.619.587.645,14
TOTAL SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	:
	434.151.848,11
TOTAL POS LUAR BIASA	:
	0,00
Selisih	:
	0,00

5) Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan SAL

Uraian	Persamaan
SAL Akhir harus sama dengan SAL Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berkenaan ditambah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ditambah Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	SAL Akhir = SAL Awal – Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berkenaan + Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan + Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
RUMUS	
SAL Akhir	:
	362.193.227.626,64
SAL Awal	:
	262.829.210.192,37
Penggunaan SAL	:
	262.829.210.192,37
SAL Tahun Berjalan	:
	362.193.227.626,64
Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	:
	0,00
Selisih	:
	0,00

6) Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO ditambah (dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas	Ekuitas akhir = ekuitas awal (+/-) surplus/defisit LO (+/-) koreksi berdampak ke ekuitas
RUMUS	
Ekuitas Akhir	: 12.136.629.099.737,90
Ekuitas Awal	: 11.349.628.703.515,30
Surplus/defisit LO	: (188.233.598.511,17)
Koreksi	: 975.233.994.733,85
Selisih	: (0,08)
PENJELASAN: selisih terjadi karena kelemahan excel yang tidak dapat mengakomodir angka lebih dari 14 digit	

b. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Uraian	Persamaan
SILPA di LRA harus sama dengan Kas di Kas Daerah ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di BLUD ditambah Setara Kas dikurangi dengan Utang PFK di neraca.	SILPA (LRA) = Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas di BLUD + Setara Kas – Utang PFK (Neraca)
RUMUS	
SILPA DI LRA	: 362.193.227.626,64
KAS DI KAS DAERAH	: 342.184.390.452,08
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	: 28.137.500,00
KAS DI BLUD	: 18.989.287.257,79
SETARA KAS	: 3.167.145.466,62
KAS DI BENDAHARA DANA BOS	: 991.137.920,00
UTANG PFK NERACA	: 3.166.870.969,85
Selisih	: 0,00

PENJELASAN :

Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca) (Non Permanen)	Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca).
RUMUS	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL)	: 0,00
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X-1	: 0,00
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X	: 0,00
Selisih	: 0,00

Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca)	Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca).
RUMUS PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL) : 0,00 SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X-1 : 0,00 SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X : 0,00 Selisih : 0,00	
Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan – Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun sebelumnya.	Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan – Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya (Neraca)
RUMUS PENERIMAAN/PENGELUARAN PEMBIAYAAN PINJAMAN JK. PANJANG (LRA) : 0,00 UTANG JANGKA PANJANG (PINJAMAN) : 0,00 BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X : 159.291.542.148,00 UTANG JANGKA PANJANG TAHUN X-1 (PINJAMAN) : 0,00 BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X-1 : 159.291.542.148,00 Selisih : 0,00	
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CaLK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yg baru ditemukan.
RUMUS REALISASI BELANJA MODAL TANAH : 0,00 PENAMBAHAN (PENURUNAN) : (12.480.616.000) - ASET TANAH 2024 : 2.754.526.089.333,51 - ASET TANAH 2023 : 2.767.006.705.333,51 Selisih : 12.480.616.000,00	
PENJELASAN: Hibah Tanah di Dinas PK dan Koreksi Tambah nilai Tanah (3.962.000.000 + 5.032.000.000) serta Reklas Tanah Ke Property Investasi dan koreksi Nilai Tanah (20.634.616.000+840.000.000)	

2) Analisis horizontal antara LRA dan LAK

Uraian		Persamaan
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (LAK) harus sama dengan Total Pendapatan Daerah (LRA) dikurangi Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya.		Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi (LAK) = Total Pendapatan Daerah (LRA) – Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (LRA) *)
RUMUS		
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS OPERASI (LAK)	:	4.556.648.637.914,11
PENDAPATAN DAERAH (LRA)	:	4.556.790.235.767,11
PAD PENJUALAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	:	141.597.853,00
Selisih	:	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi harus sama dengan Belanja Operasi ditambah Belanja Tak Terduga (di LRA) ditambah Belanja Transfer (di LRA).		Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi = Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga (di LRA) + Belanja Transfer (di LRA) *)
RUMUS		
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS OPERASI	:	3.943.708.667.405,91
BELANJA OPERASI	:	3.373.574.012.827,91
BELANJA TIDAK TERDUGA (LRA)	:	728.941.216,00
BELANJA TRANSFER (LRA)	:	569.405.713.362,00
Selisih	:	0,00
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (LAK) harus sama dengan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (di LRA).		Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (di LRA)
RUMUS		
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI (LAK)	:	141.597.853,00
PAD PENJUALAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA (LRA)	:	141.597.853,00
Selisih	:	0,00
PENJELASAN:		
Arus Kas Keluar dari aktivitas Investasi (LAK) harus sama dengan Belanja Modal (di LRA).		Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Belanja Modal (di LRA)
RUMUS		
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS INVESTASI (LAK)	:	354.426.008.778,93
BELANJA MODAL (LRA)	:	354.426.008.778,93
Selisih	:	0,00
PENJELASAN:		
Arus Kas Masuk dari aktivitas Pendanaan (LAK) harus sama dengan Penerimaan Pendanaan di LRA (selain penggunaan SiLPA).		Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan (LAK) = Penerimaan Pendanaan Di LRA (Selain Penggunaan SiLPA)

RUMUS		
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN (LAK)	:	0,00
PENERIMAAN PENDANAAN SELAIN PENGGUNAAN SILPA (LRA)	:	0,00
Selisih	:	0,00
PENJELASAN:		

Arus Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan (LAK) harus sama dengan Pengeluaran Pendanaan di LRA	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan (LAK) = Pengeluaran Pendanaan di LRA
RUMUS	
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN (LAK)	: 159.291.542.148,00
PENGELUARAN PENDANAAN (LRA)	: 159.291.542.148,00
Selisih	: 0,00
PENJELASAN:	

3) Analisis horizontal antara Neraca dan LAK	
Persamaan	Keterangan
Saldo akhir Kas tahun lalu (LAK) harus sama dengan saldo awal Kas tahun berkenaan (LAK), saldo akhir Kas di neraca tahun lalu, dan saldo awal Kas di neraca tahun berjalan.	Saldo Akhir Kas Tahun Lalu (LAK) = Saldo awal Kas Tahun Berkenaan (LAK) = Saldo Akhir Kas Tahun lalu (Neraca) = Saldo Awal Kas Tahun Berjalan (Neraca) Apabila terdapat selisih harus diungkapkan dalam CaLK
RUMUS	
SALDO AKHIR KAS BUD TAHUN LALU (LAK)	: 242.843.136.999,24
SALDO AWAL KAS BUD TAHUN BERKENAAN (LAK)	: 242.843.136.999,24
SALDO AKHIR KAS BUD TAHUN LALU (NERACA)	: 242.843.136.999,24
SALDO AWAL KAS BUD TAHUN BERJALAN (NERACA)	: 242.843.136.999,24
Selisih	: 0,00
Saldo akhir kas di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo akhir Kas di LAK tahun berjalan.	Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (Neraca) = Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK)
RUMUS	
SALDO AKHIR KAS THN BERJALAN (NERACA)	: 365.360.098.596,49
SALDO AKHIR KAS THN BERJALAN (LAK)	: 365.360.098.596,49
Selisih	: 0,00

Utang PFK di neraca harus sama dengan utang PFK di BUD ditambah utang PFK di bendahara pengeluaran.		Utang PFK (Neraca) = Utang PFK di BUD + Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran	
RUMUS			
UTANG PFK (NERACA)	:	3.166.870.969,85	
UTANG PFK BUD	:	41.574.000,00	
UTANG PFK BENDAHARA PENGELUARAN	:	3.125.296.969,85	
Selisih	:	0,00	
Saldo utang PFK di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo utang PFK di neraca tahun sebelumnya ditambah penerimaan PFK tahun berjalan dikurangi pengeluaran PFK tahun berjalan di LAK.		Saldo Utang PFK tahun berjalan (neraca) = Saldo Utang PFK Tahun sebelumnya (Neraca) + Penerimaan PFK Tahun berjalan – Pengeluaran PFK Tahun Berjalan (LAK)	
RUMUS			
UTANG PFK (NERACA)	:	3.166.870.969,85	
UTANG PFK TAHUN X-1 (NERACA)	:	436.070.688,00	
PENERIMAAN PFK (LAK)	:	240.261.515.692,16	
PENGELUARAN PFK (LAK)	:	237.530.715.410,31	
Selisih	:	0,00	
PENJELASAN :			
4) Analisis horizontal antara LRA dan Laporan Perubahan SAL			
Silpa di LRA harus sama dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir pada Laporan Perubahan SAL		SiLPA pada LRA = Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir pada Laporan Perubahan SAL	
RUMUS			
SILPA (LRA)	:	362.193.227.626,64	
SAL AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN SAL)	:	362.193.227.626,64	
Selisih	:	0,00	
Silpa pada LRA Tahun Sebelumnya harus sama dengan Penggunaan Silpa pada Laporan Perubahan SAL harus sama dengan Penerimaan Pembiayaan Silpa pada LRA harus sama dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Laporan Perubahan SAL		Silpa pada LRA Tahun Sebelumnya = Penggunaan Silpa pada Laporan Perubahan SAL = Penerimaan Pembiayaan Silpa pada LRA = Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Laporan Perubahan SAL	
RUMUS			
SILPA TAHUN SEBELUMNYA (LRA)	:	262.829.210.192,37	
PENGUNAAN SILPA (LAPORAN PERUBAHAN SAL)	:	262.829.210.192,37	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGUNAAN SILPA (LRA)	:	0,00	
SAL AWAL (LAPORAN PERUBAHAN SAL)	:	262.829.210.192,37	
Selisih	:	0,00	

5) Analisis horizontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya

RUMUS

EKUITAS AWAL (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	11.349.628.703.515,30
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA)	:	11.349.628.703.515,30
Selisih	:	0,00

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas

RUMUS

SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL)	:	(188.239.538.511)
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	(188.239.538.511)
Selisih	:	-0,00

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca

RUMUS

EKUITAS AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	12.136.623.159.737,98
EKUITAS (NERACA)	:	12.136.623.159.737,98
Selisih	:	0,00

6) Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca

Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun

Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun

RUMUS

PENDAPATAN PAJAK (LO)	:	1.221.466.833.492,55
PENDAPATAN PAJAK (LRA)	:	1.034.272.519.874,22
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA)	:	68.725.004.919,10
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA)	:	66.530.745.794,10
Selisih	:	185.000.054.493,33

PENJELASAN : Piutang Pajak Pelayanan Kesehatan yaitu BPJS yang belum diterima

Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun		Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun	
RUMUS			
PENDAPATAN RETRIBUSI (LO)	:	26.764.781.761,73	
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA)	:	178.912.998.471,19	
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA)	:	11.402.980.439,49	
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA)	:	2.592.570.770,83	
Selisih	:	(160.958.626.378)	
PENJELASAN : Koreksi Piutang dan pendapatan diterima dimuka			
Bagi Hasil Pajak Daerah (LO) harus sama dengan Bagi Hasil Pajak Daerah (LRA) dikurangi Utang Bagi Hasil Pajak Provinsi Awal Tahun ditambah Utang Bagi Hasil Pajak Provinsi Akhir Tahun		Bagi Hasil Pajak Daerah (LO) = Bagi Hasil Pajak Daerah (LRA) – Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Awal Tahun + Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Akhir Tahun	
RUMUS			
BAGI HASIL PAJAK DAERAH (LO)	:	501.771.829.140,00	
BAGI HASIL PAJAK DAERAH (LRA)	:	561.775.713.362,00	
UTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI AKHIR TAHUN (NERACA)	:	19.154.285.373,00	
UTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI AWAL TAHUN (NERACA)	:	79.158.169.595,00	
Selisih	:	0,00	
Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun		Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) +. Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun. Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau <i>weighted average</i> .	
RUMUS			
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	:	1.262.359.283.654,81	
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	:	1.138.045.412.497,71	
PERSEDIAAN AWAL TAHUN	:	188.004.505.649,76	
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN	:	184.920.150.314,39	
Selisih	:	121.229.515.821,73	
PENJELASAN : Hibah Barang+Utang Belanja Barang+ Reklas BLUD+Reklas BOS dan Reklas BTT			

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	Beban Penyusutan (LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun – Akumulasi Penyusutan Awal Tahun
RUMUS	
BEBAN PENYUSUTAN (LO)	: 785.161.665.927,38
AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN	: (5.731.757.262.981)
AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN	: (6.079.082.862.457)
Selisih	: 437.836.066.451,76
PENJELASAN : Adanya Koreksi Perhitungan Saldo Awal	

Inspektur,



Stefanus F. Halla, S.T, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730105 200012 1 004

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS ITDA PROVINSI. NTT	
PENGENDALI TEKNIK	
KETUA TIM	



DAFTAR ISI
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR.....	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	
III. NERACA.....	
IV. LAPORAN OPERASIONAL	
V. LAPORAN ARUS KAS.....	
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .	2
C. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	7
A. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2024-2026	7
B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.....	9
C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	32
D. <i>MANDATORY SPENDING</i> DALAM POSTUR APBD TAHUN ANGGARAN 2025	42



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	47
A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	47
B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN.....	62
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	64
A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	64
B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	66
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	67
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	118
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	118
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP – SAL).....	163
C. NERACA DAERAH	164
D. LAPORAN OPERASIONAL	215
E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	244
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	249
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	261
A. INFORMASI TAMBAHAN	261
B. PENJELASAN LAINNYA	270
BAB VII PENUTUP	274
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT Periode 2023 s/d 2025	13
Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT Berdasarkan Wilayah dan Domisili.....	14
Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	14
Tabel 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	15
Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	16
Tabel 2.6 Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.7 <i>Gini Ratio</i> Provinsi NTT Tahun 2023 s/d 2025	17
Tabel 2.8 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2023 s/d 2025	17
Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia	18
Tabel 2.10 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2023 s/d 2025.....	18
Tabel 2.11 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur	19
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2023 - 2025	20
Tabel 2.13 Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	21
Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Pendidikan pada Perubahan APBD TA. 2025 Per Program Kegiatan.....	43
Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik pada Perubahan APBD TA. 2025 Per Program Kegiatan.....	44
Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	47
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2025.....	48
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	48
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024	50
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024.....	53
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	54
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2025 dan 2024	55
Tabel 3.8 Realisasi Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2025.....	56
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2025 dan Tahun 2024	56
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024....	58
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	59
Tabel 3.12 Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025	60



Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	61
Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat	65
Tabel 4.2 Perbedaan Beban dan Belanja	81
Tabel 4.3 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	93
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2025	119
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA Tahun 2025	119
Tabel 5.3 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024..	120
Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota	120
Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan BBNKB per Kabupaten/Kota	121
Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan PBBKB per Jenis.....	122
Tabel 5.7 Realisasi Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota.....	122
Tabel 5.8 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota.....	123
Tabel 5.9 Realisasi Penerimaan Pajak Rokok per Kabupaten/Kota	124
Tabel 5.10 Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat per Kabupaten/Kota.....	125
Tabel 5.11 Realisasi Penerimaan Opsen Pajak MBLB.....	126
Tabel 5.12 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per Jenis	127
Tabel 5.13 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per SKPD	127
Tabel 5.14 Pendapatan yang Bersumber dari Retribusi Jasa Umum - LRA per SKPD	128
Tabel 5.15 Pendapatan yang Bersumber dari Retribusi Jasa Usaha - LRA per SKPD	128
Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	130
Tabel 5.17 Realisasi Hasil Penjualan BMD	131
Tabel 5.18 Hasil Pemanfaatan BMD.....	132
Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Denda PKB per Kabupaten/Kota	133
Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB per Kabupaten/Kota	134
Tabel 5.21 Realisasi Pendapatan Denda PAP per Kabupaten/Kota.....	134
Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Transfer per Jenis.....	136
Tabel 5.23 Realisasi Pendapatan DAU	138
Tabel 5.24 Realisasi DAK Fisik.....	139
Tabel 5.25 Realisasi DAK Non Fisik	139
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025.....	141



Tabel 5.27 Rincian Belanja Pegawai.....	142
Tabel 5.28 Realisasi Belanja Pegawai per SKPD.....	142
Tabel 5.29 Rincian Belanja Barang dan Jasa.....	144
Tabel 5.30 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD.....	144
Tabel 5.31 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI – PEN Tahun 2025	146
Tabel 5.32 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025.....	147
Tabel 5.33 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	148
Tabel 5.34 Realisasi Belanja Hibah per SKPD	149
Tabel 5.35 Belanja Bantuan Sosial.....	150
Tabel 5.36 Realisasi Belanja Modal per Jenis.....	151
Tabel 5.37 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD.....	152
Tabel 5.38 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD.....	154
Tabel 5.39 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD.....	155
Tabel 5.40 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	155
Tabel 5.41 Realisasi Bagi Hasil per Kabupaten/Kota.....	157
Tabel 5.42 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota.....	157
Tabel 5.43 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota	158
Tabel 5.44 Realisasi Bagi Hasil PBBKB per Kabupaten/Kota.....	158
Tabel 5.45 Realisasi Pajak Rokok per Kabupaten/Kota	159
Tabel 5.46 Realisasi Bagi Hasil PAP per Kabupaten/Kota	159
Tabel 5.47 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024	160
Tabel 5.48 Realisasi Penerimaan Pembiayaan	161
Tabel 5.49 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	162
Tabel 5.50 Rincian SiLPA	163
Tabel 5.51 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	163
Tabel 5.52 Rincian SiLPA	164
Tabel 5.53 Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024.....	165
Tabel 5.54 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024.....	165
Tabel 5.55 Saldo Kas pada Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	166
Tabel 5.56 Saldo Kas Rincian Dana Earmark per 31 Desember 2025.....	167
Tabel 5.57 Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2025...	168
Tabel 5.58 Saldo Kas di BLUD.....	168
Tabel 5.59 Saldo Kas Dana BOS	170



Tabel 5.60 Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	171
Tabel 5.61 Saldo Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2025	171
Tabel 5.62 Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Tahun 2025	172
Tabel 5.63 Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Tahun 2025	172
Tabel 5.64 Saldo Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2025	174
Tabel 5.65 Saldo Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2025	174
Tabel 5.66 Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan	176
Tabel 5.67 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya	177
Tabel 5.68 Daftar Beban Dibayar Di muka per SKPD	177
Tabel 5.69 Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD	178
Tabel 5.70 Daftar Persediaan Barang Usang/Kedaluwarsa	179
Tabel 5.71 Investasi Jangka Panjang Permanen	180
Tabel 5.72 Perhitungan Investasi PT Bank NTT	180
Tabel 5.73 Perhitungan Investasi PT Jamkrida	181
Tabel 5.74 Perhitungan Investasi PT KI Bolok	182
Tabel 5.75 Rincian Aset Tetap	183
Tabel 5.76 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Tanah	183
Tabel 5.77 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD	184
Tabel 5.78 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah	185
Tabel 5.79 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin	186
Tabel 5.80 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD	186
Tabel 5.81 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan	188
Tabel 5.82 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD	189
Tabel 5.83 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	190
Tabel 5.84 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD ..	190
Tabel 5.85 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya	192
Tabel 5.86 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per SKPD	192
Tabel 5.87 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan	193
Tabel 5.88 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per SKPD...	194
Tabel 5.89 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	194
Tabel 5.90 Rincian Penambahan KPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	195



Tabel 5.91 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan	197
Tabel 5.92 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan	198
Tabel 5.93 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan	198
Tabel 5.94 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD	198
Tabel 5.95 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	200
Tabel 5.96 Rincian Properti Investasi	200
Tabel 5.97 Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	201
Tabel 5.98 Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD	204
Tabel 5.99 Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tak Berwujud SKPD	204
Tabel 5.100 Rincian Aset Lain-Lain Lainnya Berupa Kelebihan Pembayaran	208
Tabel 5.101 Kekurangan Volume Pekerjaan	209
Tabel 5.102 Rincian Nilai Kewajiban	209
Tabel 5.103 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025	210
Tabel 5.104 Rincian PFK	210
Tabel 5.105 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	212
Tabel 5.106 Rincian Pendapatan Daerah – LO	215
Tabel 5.107 Pendapatan Asli Daerah – LO	216
Tabel 5.108 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	216
Tabel 5.109 Penjelasan selisih Pendapatan Pajak Daerah – LO dan Pendapatan Pajak Daerah – LRA	217
Tabel 5.110 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO	217
Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD – LO	217
Tabel 5.112 Rincian Penjelasan selisih Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	218
Tabel 5.113 Rincian PHPKDYYD – LO	220
Tabel 5.114 Selisih Rincian PHPKDYYD – LO dan PHPKDYYD – LRA	221
Tabel 5.115 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO	221
Tabel 5.116 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD	221
Tabel 5.117 Selisih antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO dengan Lain-lain PAD yang Sah – LRA	222
Tabel 5.118 Rincian Pendapatan Transfer– LO	223
Tabel 5.119 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	223
Tabel 5.120 Rincian Lain-Lain Pendapatan Hibah – LO	224



Tabel 5.121 Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	224
Tabel 5.122 Rincian Selisih Pendapatan Hibah – LO dan Pendapatan Hibah – LRA	225
Tabel 5.123 Rincian Pendapatan Hibah - LO per SKPD Tahun 2025	225
Tabel 5.124 Rincian Beban Daerah – LO.....	226
Tabel 5.125 Rincian Beban Pegawai.....	226
Tabel 5.126 Rincian Selisih Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA.....	227
Tabel 5.127 Rincian Selisih Beban Persediaan – LO dan Belanja Barang – LRA	227
Tabel 5.128 Rincian Beban Jasa.....	228
Tabel 5.129 Rincian Selisih Beban Jasa – LO dan Belanja Jasa – LRA.....	228
Tabel 5.130 Rincian Beban Pemeliharaan.....	229
Tabel 5.131 Rincian selisih antara Beban Pemeliharaan – LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA.....	229
Tabel 5.132 Rincian selisih antara Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA	234
Tabel 5.133 Rincian Beban Jasa.....	234
Tabel 5.134 Rincian Beban Hibah	235
Tabel 5.135 Rincian Selisih Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA	236
Tabel 5.136 Rincian Beban Hibah per SKPD	236
Tabel 5.137 Rincian Beban Bantuan Sosial	236
Tabel 5.138 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD	236
Tabel 5.139 Rincian Beban Penyisihan Piutang.....	237
Tabel 5.140 Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD	237
Tabel 5.141 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	238
Tabel 5.142 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD	238
Tabel 5.143 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD	239
Tabel 5.144 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD.....	239
Tabel 5.145 Rincian Beban Penyusutan Properti Investasi per SKPD.....	240
Tabel 5.146 Rincian Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud per SKPD.....	241
Tabel 5.147 Rincian selisih Beban Bagi Hasil	241
Tabel 5.148 Rincian Beban Bantuan Keuangan	242
Tabel 5.149 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	242
Tabel 5.150 Rincian Defisit dari Penjualan BMD yang tidak dipisahkan.....	243
Tabel 5.151 Rincian Defisit Non Operasional – LO.....	244



Tabel 5.152 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	244
Tabel 5.153 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	245
Tabel 5.154 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi	246
Tabel 5.155 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	246
Tabel 5.156 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan	247
Tabel 5.157 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan	247
Tabel 5.158 Rincian Saldo Akhir Kas	249
Tabel 5.159 Rincian Rincian Dampak Perubahan atas Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024	250
Tabel 5.160 Rincian Mutasi Dampak Perubahan atas Piutang Tahun 2025	251
Tabel 5.161 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024	251
Tabel 5.162 Rincian Mutasi Dampak Perubahan atas Penyisihan Piutang Tahun 2025	252
Tabel 5.163 Rincian Dampak Perubahan atas Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024	252
Tabel 5.164 Rincian Mutasi Dampak Perubahan atas Persediaan Tahun 2025	253
Tabel 5.165 Rincian Dampak Perubahan Atas Investasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	253
Tabel 5.166 Rincian Dampak Perubahan Aset Tetap Tahun 2025 dan Tahun 2024...	254
Tabel 5.167 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyusutan Tahun 2025 dan Tahun 2024	256
Tabel 5.168 Rincian Dampak Perubahan Atas Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	258
Tabel 5.169 Dampak Perubahan atas Utang Tahun 2025 dan Tahun 2024	259
Tabel 6.1 Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga, Berdasarkan SK Gubernur NTT....	261
Tabel 6.2 Rincian Realisasi Belanja, Berdasarkan Realisasi SP2D	262
Tabel 6.3 Daftar Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT.....	263
Tabel 6.4 Daftar Rincian Pengembalian BTT ke Kas Daerah.....	263
Tabel 6.5 Rincian SP2T Pendapatan BOS.....	264
Tabel 6.6 Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOS	265
Tabel 6.7 Rincian SP2H Pendapatan BOS NTT.....	265
Tabel 6.8 Rincian Belanja BOS SMA, SMK SLB Negeri se-Provinsi NTT	266
Tabel 6.9 Rincian Realisasi Dana BOS	266
Tabel 6.10 Rincian Sisa SiLPA BOS	266



Tabel 6.11 Daftar Deposito	267
Tabel 6.12 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari PT SMI- PEN	268
Tabel 6.13 Daftar Rincian Pengembalian Pokok Pinjaman, Biaya Bunga dan Biaya Pengelolaan sampai dengan 31 Desember 2025	269
Tabel 6.14 Daftar Rincian Pembayaran Biaya Pengelolaan yang Dibayar Langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT	269
Tabel 6.15 Daftar Rincian Pembayaran Bunga yang Dipotong Langsung dari DAU...	269
Tabel 6.16 Keadaan Wilayah	270
Tabel 6.17 Sumber Daya Manusia	271
Tabel 6.18 Struktur Organisasi.....	272



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	51
Gambar 3.2 Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025	51
Gambar 3.3 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025	52
Gambar 3.4 Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025	53
Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025	53
Gambar 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025	56
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024	55
Gambar 3.8 Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025	58
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	58
Gambar 3.10 Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.....	59
Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024	60
Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	60



**DAFTAR KODE LAMPIRAN NERACA PEMERINTAH PROVINSI NTT
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	URAIAN	KODE LAMPIRAN
1	RINCIAN KAS DI KAS DAERAH	N. 1
2	DAFTAR SISA KAS BENDAHARA PENGELUARAN SKPD PER SATUAN KERJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 2
3	DAFTAR RINCIAN KAS DI KAS BLUD RSUD PROF. W. Z. YOHANES KUPANG, BLUD RSJ NAIMATA DAN BLUD SPAM	N. 3
4	RINCIAN REALISASI KAS DI BENDAHARA BOS SMAN, SMKN DAN SLBN SE PROVINSI NTT	N. 4
5	DAFTAR KAS LAINNYA	N. 5
6	DAFTAR RINCIAN KAS LAINNYA	N. 5.1
7	DAFTAR RINCIAN KAS LAINNYA	N. 5.2
8	DAFTAR RINCIAN KAS LAINNYA	N. 5.3
9	REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN	N. 6
10	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	N. 6.1
11	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 6.2
12	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK ROKOK	N. 6.3
13	REKAPITULASI PIUTANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENYISIHAN	N. 7
14	REKAPAN PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM	N. 7.1
15	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	N. 7.1.1
16	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI DAERAH PIUTANG PENDAPATAN BLUD SPAM PADA DINAS PUPR	N. 7.1.1.1
17	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT	N. 7.1.1.2
18	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 7.1.2
19	DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA RSUD PROF. W. Z. JOHANNES KUPANG	N. 7.1.3
20	DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DITEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH NAIMATA)	N. 7.1.4
21	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	N. 7.1.5
22	REKAPAN PIUTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAN PENYISIHAN	N. 7.2
23	DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENYISIHAN	N. 7.2.1



NO	URAIAN	KODE LAMPIRAN
24	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR, GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 7.2.1.1
25	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (SEWA PERALATAN ALSINTAN) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	N. 7.2.1.2.a
26	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 7.2.1.2.b
27	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	N. 7.2.1.3.a
28	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	N. 7.2.1.3.b
29	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	N. 7.2.1.4
30	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 7.2.1.5
31	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N. 7.2.1.6
32	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 7.2.1.7
33	DAFTAR PIUTANG JASA USAHA PEMAKAIAN LABORATORIUM DAN PENYISIHAN	N. 7.2.2
34	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	N. 7.2.2.1
35	DAFTAR PIUTANG JASA USAHA PEMAKAIAN RUANGAN DAN PENYISIHAN	N. 7.2.3
36	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PENYEWAAN BANGUNAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	N. 7.2.3.1
37	DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DAN PENYISIHAN PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N. 7.2.4
38	DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT	N. 7.2.4.1
39	REKAPITULASI PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAN PENYISIHAN	N. 8
40	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN DAN PENYISIHAN	N. 8.1
41	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYISIHAN	N. 8.1.1
42	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD PROF. W.Z. JOHANNES KUPANG	N. 8.1.1.1



NO	URAIAN	KODE LAMPIRAN
43	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH NAIMATA)	N. 8.1.1.2
44	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 8.1.2
45	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PIUTANG PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	N. 8.2
46	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PIUTANG PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	N. 8.2.1
47	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH	N. 8.3
48	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	N. 8.3.1
49	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT	N. 8.3.2
50	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PIUTANG PENDAPATAN BLUD SPAM PADA DINAS PUPR	N. 8.4
51	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PIUTANG PENDAPATAN BLUD SPAM PADA DINAS PUPR PROVINSI NTT	N. 8.4.1
52	DAFTAR PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	N. 9
53	DAFTAR PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH	N. 10
54	REKAPITULASI PIUTANG LAINNYA DAN PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	N. 11
55	DAFTAR REALISASI DAN RENCANA PENERIMAAN KENDARAAN RODA EMPAT PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	N. 11.1
56	DAFTAR BAGIAN LANCAR DAN PENYISIHAN KREDIT KENDARAAN RODA EMPAT PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	N. 11.1.1
57	DAFTAR BAGIAN LANCAR DAN PENYISIHAN DANA PINJAMAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT (OPKUP BENIH) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	N. 11.2
58	REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA	N. 12
59	REKAPAN DAFTAR BEBAN DI BAYAR DIMUKA	N. 12.1
60	REKAPAN DAFTAR BEBAN SEWA DI BAYAR DIMUKA	N. 12.2
61	DAFTAR BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	N. 12.2.1
62	DAFTAR BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT	N. 12.2.2
63	DAFTAR REKAPITULASI PERSEDIAAN	N. 13
64	REKAPITULASI INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	N. 14
65	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	N. 15



NO	URAIAN	KODE LAMPIRAN
66	REKAPAN REALISASI BELANJA MODAL BOS SMAN, SMKN DAN SLBN PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT	N. 15.1
67	DAFTAR REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	N. 16
68	DAFTAR REKAPITULASI PROPERTI INVESTASI	N. 17
69	DAFTAR KERJASAMA PEMANFAATAN DENGAN PIHAK KETIGA	N. 18
70	DAFTAR REKAPITULASI ASET TAK BERWUJUD DAN AKUMULASI AMORTISASI	N. 19
71	REKAPITULASI DAFTAR ASET LAIN-LAIN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN	N. 20
72	DAFTAR ASET LAIN RUSAK BERAT DAN AKUMULASI PENYUSUTAN	N. 20.1
73	DAFTAR ASET LAIN-LAIN YANG DIALIHKAN DARI ASET LANCAR	N. 20.2
74	DAFTAR ASET LAINNYA YANG TIDAK DIGUNAKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 20.3
75	DAFTAR ASET UNTUK DI HAPUS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 20.4
76	DAFTAR ASET UNTUK DISERAHKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 20.5
77	REKAPAN ASET LAINNYA-ASET LAIN LAIN-LAINNYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	N. 20.6
78	REKAPITULASI HUTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)	N. 21
79	DAFTAR HUTANG PPH 21	N. 21.1
80	DAFTAR HUTANG PPH 22	N. 21.2
81	DAFTAR HUTANG PPH 23	N. 21.3
82	DAFTAR HUTANG PPN PASAL 4 (2)	N. 21.4
83	DAFTAR HUTANG PPN PUSAT	N. 21.5
84	DAFTAR HUTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)	N. 21.6
85	REKAPITULASI HUTANG BUNGA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	N. 22
86	DAFTAR BAGIAN LANCAR UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	N. 23
87	REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	N. 24
88	DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA (RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH)	N. 24.1
89	PENDAPATAN RETRIBUSI (PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH) PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 24.1.1
90	PENDAPATAN RETRIBUSI DITERIMA DI MUKA (RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	N. 24.1.2
91	PENDAPATAN DIBAYAR DIMUKA PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT	N. 24.1.3
92	PENDAPATAN RETRIBUSI DITERIMA DI MUKA PIUTANG PENDAPATAN BLUD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT DARI JASA LAYANAN	N. 24.1.4
93	PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DITERIMA DI MUKA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	N. 24.1.5
94	PENDAPATAN RETRIBUSI DITERIMA DI MUKA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT	N. 24.1.6
95	REKAPITULASI PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DITERIMA DIMUKA	N. 24.2



NO	URAIAN	KODE LAMPIRAN
96	PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DITERIMA DI MUKA PIUTANG PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH (PENDAPATAN BLUD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT DARI JASA LAYANAN)	N. 24.2.1
97	PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DITERIMA DI MUKA PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	N. 24.2.2
98	PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DITERIMA DI MUKA PIUTANG PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH (HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH) PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 24.2.3
99	REKAPITULASI UTANG BELANJA	N. 25
100	REKAPAN UTANG BELANJA PEGAWAI	N. 25.1
101	DAFTAR UTANG BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT	N. 25.1.1
102	DAFTAR UTANG BELANJA PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 25.1.2
103	REKAPITULASI UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	N. 25.2
104	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	N. 25.2.1
105	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD PADA BLUD RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG DAN RSKD Jiwa NAIMATA KUPANG PROVINSI NTT	N. 25.2.2
106	UTANG BELANJA HIBAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT	N. 25.3
107	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD PADA BLUD RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG PROVINSI NTT	N. 25.4
108	REKAPITULASI UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	N. 25.5
109	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT	N. 25.5.1
110	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT	N. 25.5.2
111	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTT	N. 25.5.3
112	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT	N. 25.5.4
113	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	N. 25.5.5
114	REKAPAN UTANG BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	N. 25.6
115	REKAPITULASI UTANG BELANJA ASET TETAP LAINNYA	N. 25.7
116	DAFTAR UTANG BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA	N. 25.8
117	REKAPITULASI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	N. 26
118	REKAPITULASI UTANG KEPADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)	N. 27



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(AUDITED)
UNTUK KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	TA 2025		%	REALISASI TA 2024
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01.	Pajak Daerah	1.415.663.073.470,00	1.034.272.519.874,22	73,06	1.222.849.908.091,55
4.1.02.	Retribusi Daerah	204.165.588.278,00	178.912.998.471,19	87,63	27.136.719.369,17
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	74,25	31.749.907.192,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	91.978.614.676,00	40.338.522.130,94	43,86	169.703.623.448,02
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.774.057.276.424,00	1.299.745.200.526,35	73,26	1.451.440.158.100,74
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA				
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA				
	Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil (DBH)	61.652.427.000,00	52.106.429.650,00	84,52	61.216.765.770,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.029.253.589.000,00	1.990.566.496.640,00	98,09	1.976.058.968.384,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.014.469.052.000,00	1.004.250.221.957,00	98,99	1.331.571.219.542,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.105.375.068.000,00	3.046.923.148.247,00	98,12	3.368.846.953.696,00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA				
	Dana Insentif Daerah	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	100,00	11.346.961.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	100,00	11.346.961.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	98,12	3.380.193.914.696,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	2.406.143.000,00	240,61	2.895.819.700,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00	100,00	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA	202.011.347.868,00	203.417.490.868,00	100,70	2.895.819.700,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.088.144.463.292,00	4.556.786.610.641,35	89,56	4.834.529.892.496,74
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.483.703.181.724,00	1.992.090.954.369,20	80,21	1.657.095.800.087,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.337.992.772.436,00	1.138.177.002.805,71	85,07	1.187.981.415.203,76
5.1.03.	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	98,44	57.260.225.861,00
5.1.05.	Belanja Hibah	188.681.115.540,00	186.634.548.226,00	98,92	534.704.400.625,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	13.654.484.000,00	10.332.950.000,00	75,67	29.630.396.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	4.071.238.477.184,00	3.373.705.603.135,91	82,87	3.466.672.237.776,76
5.2.	BELANJA MODAL				
5.2.01.	Belanja Modal Tanah			-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.365.280.187,00	125.810.216.574,46	85,96	176.436.362.807,55
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	79,06	216.584.489.838,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	87,33	114.279.541.753,00

KODE REKENING	URAIAN	TA 2025		%	REALISASI TA 2024
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.563.732.038,00	39.293.080.845,00	147,92	26.659.408.723,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	214.808.550,00	199.151.000,00	92,71	
	Jumlah Belanja Modal	400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	88,42	533.959.803.121,55
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA				
5.3.01.	Belanja TakTerduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	3,11	3.331.110.441,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	3,11	3.331.110.441,00
	JUMLAH BELANJA	4.495.567.819.387,00	3.728.903.882.314,84	82,95	4.003.963.151.339,31
5.4.	BELANJA TRANSFER				
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	86,00	724.153.525.994,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00	7.630.000.000,00	19,73	6.306.245.545,00
	JUMLAH TRANSFER	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	82,29	730.459.771.539,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.187.494.103.513,00	4.298.309.595.676,84	82,86	4.734.422.922.878,31
	SURPLUS/DEFISIT	(99.349.640.221,00)	258.477.014.964,51	(260,17)	100.106.969.618,43
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	100,00	121.170.302.806,94
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	203.511.200.000,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	1.132.467.037,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	100,00	325.813.969.843,94
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan			-	
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44	163.091.729.270,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44	163.091.729.270,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.349.640.221,00	103.536.786.357,37	104,21	162.722.240.573,94
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	362.013.801.321,88	-	262.829.210.192,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(AUDITED)

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.088.144.463.292,00	4.556.786.610.641,35	(531.357.852.651)	89,56
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.774.057.276.424,00	1.299.745.200.526,35	(474.312.075.898)	73,26
4.1.01.	Pajak Daerah	1.415.663.073.470,00	1.034.272.519.874,22	(381.390.553.596)	73,06
4.1.02.	Retribusi Daerah	204.165.588.278,00	178.912.998.471,19	(25.252.589.807)	87,63
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	(16.028.839.950)	74,25
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	91.978.614.676,00	40.338.522.130,94	(51.640.092.545)	43,86
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	(58.451.919.753)	98,12
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	(58.451.919.753)	98,12
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.011.347.868,00	203.417.490.868,00	1.406.143.000	100,70
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	2.406.143.000,00	1.406.143.000	240,61
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00	0	100,00
5.	BELANJA DAERAH	5.187.494.103.513,00	4.298.309.595.676,84	(889.184.507.836)	82,86
5.1.	BELANJA OPERASI	4.071.238.477.184,00	3.373.705.603.135,91	(697.532.874.048)	82,87
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.483.703.181.724,00	1.992.090.954.369,20	(491.612.227.355)	80,21
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.337.992.772.436,00	1.138.177.002.805,71	(199.815.769.630)	85,07
5.1.03.	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	(736.775.749)	98,44
5.1.05.	Belanja Hibah	188.681.115.540,00	186.634.548.226,00	(2.046.567.314)	98,92
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	13.654.484.000,00	10.332.950.000,00	(3.321.534.000)	75,67
5.2.	BELANJA MODAL	400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	(46.408.465.049)	88,42
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.365.280.187,00	125.810.216.574,46	(20.555.063.613)	85,96
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	(24.588.365.747)	79,06
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	(13.978.726.947)	87,33
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.563.732.038,00	39.293.080.845,00	12.729.348.807	147,92
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	214.808.550,00	199.151.000,00	(15.657.550)	92,71
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975)	3,11
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975)	3,11
5.4.	BELANJA TRANSFER	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	(122.520.570.764)	82,29

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	(91.476.593.498)	86,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00	7.630.000.000,00	(31.043.977.266)	19,73
	SURPLUS/(DEFISIT)	(99.349.640.221,00)	258.477.014.964,51	357.826.655.186	260,17
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	99.349.640.221,00	103.536.786.357,37	4.187.146.136	104,21
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	(878.680)	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	(878.680)	100,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	(4.188.024.816)	97,44
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	(4.188.024.816)	97,44
	PEMBIAYAAN NETTO	99.349.640.221,00	103.536.786.357,37	4.187.146.136	104,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	362.013.801.321,88	362.013.801.322	-

SIPKD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(AUDITED)

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.088.144.463.292,00	4.556.786.610.641,35	(531.357.852.651)	89,56
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.774.057.276.424,00	1.299.745.200.526,35	(474.312.075.898)	73,26
4.1.01.	Pajak Daerah	1.415.663.073.470,00	1.034.272.519.874,22	(381.390.553.596)	73,06
4.1.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	430.644.237.801,00	216.364.730.276,00	(214.279.507.525)	50,24
4.1.01.01.01.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.182.729.469,00	706.216.543,00	(1.476.512.926)	32,35
4.1.01.01.01.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2.113.774.143,00	690.693.655,00	(1.423.080.488)	32,68
4.1.01.01.01.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	42.865.548,00	-	(42.865.548)	-
4.1.01.01.01.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	26.089.778,00	15.522.888,00	(10.566.890)	59,50
4.1.01.01.02.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	15.024.016.830,00	10.360.366.361,00	(4.663.650.469)	68,96
4.1.01.01.02.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	14.416.930.195,00	9.841.825.061,00	(4.575.105.134)	68,27
4.1.01.01.02.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	3.833.858,00	-	(3.833.858)	-
4.1.01.01.02.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	603.252.777,00	518.541.300,00	(84.711.477)	85,96
4.1.01.01.03.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	96.654.758.055,00	69.962.691.992,00	(26.692.066.063)	72,38
4.1.01.01.03.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	90.577.478.921,00	67.304.881.051,00	(23.272.597.870)	74,31
4.1.01.01.03.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	3.684.422.218,00	695.034.613,00	(2.989.387.605)	18,86
4.1.01.01.03.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.392.856.916,00	1.962.776.328,00	(430.080.588)	82,03
4.1.01.01.04.	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.066.197.831,00	977.861.377,00	(1.088.336.454)	47,33
4.1.01.01.04.0001.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	690.461.099,00	452.067.486,00	(238.393.613)	65,47
4.1.01.01.04.0002.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.121.105.582,00	325.398.441,00	(795.707.141)	29,02
4.1.01.01.04.0004.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	254.631.150,00	200.395.450,00	(54.235.700)	78,70
4.1.01.01.05.	PKB-Mobil Bus-Bus	19.058.482,00	9.682.613,00	(9.375.869)	50,80
4.1.01.01.05.0001.	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	2.244.688,00	4.340.515,00	2.095.827	193,37
4.1.01.01.05.0002.	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	16.146.044,00	5.342.098,00	(10.803.946)	33,09
4.1.01.01.05.0004.	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	667.750,00	-	(667.750)	-
4.1.01.01.06.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	61.944.305.384,00	35.835.605.949,00	(26.108.699.435)	57,85
4.1.01.01.06.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	58.598.519.410,00	33.507.543.365,00	(25.090.976.045)	57,18

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.01.06.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.475.780.073,00	132.707.376,00	(1.343.072.697)	8,99
4.1.01.01.06.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.870.005.901,00	2.195.355.208,00	325.349.307	117,40
4.1.01.01.07.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	64.584.845.505,00	32.672.507.453,00	(31.912.338.052)	50,59
4.1.01.01.07.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	56.795.465.574,00	31.442.146.657,00	(25.353.318.917)	55,36
4.1.01.01.07.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	6.789.007.748,00	584.269.898,00	(6.204.737.850)	8,61
4.1.01.01.07.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1.000.372.183,00	646.090.898,00	(354.281.285)	64,59
4.1.01.01.08.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.893.962.509,00	6.396.960.123,00	(5.497.002.386)	53,78
4.1.01.01.08.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	10.412.855.543,00	6.087.609.104,00	(4.325.246.439)	58,46
4.1.01.01.08.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1.311.025.518,00	265.629.572,00	(1.045.395.946)	20,26
4.1.01.01.08.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	170.081.448,00	43.721.447,00	(126.360.001)	25,71
4.1.01.01.09.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	313.303.815,00	287.490.237,00	(25.813.578)	91,76
4.1.01.01.09.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	310.871.192,00	284.786.337,00	(26.084.855)	91,61
4.1.01.01.09.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	2.432.623,00	2.703.900,00	271.277	111,15
4.1.01.01.10.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	175.612.643.073,00	59.096.826.977,00	(116.515.816.096)	33,65
4.1.01.01.10.0001.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	173.453.917.916,00	58.007.641.013,00	(115.446.276.903)	33,44
4.1.01.01.10.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	2.158.725.157,00	1.089.185.964,00	(1.069.539.193)	50,46
4.1.01.01.11.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	344.291.319,00	57.903.577,00	(286.387.742)	16,82
4.1.01.01.11.0001.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	301.476.632,00	38.213.013,00	(263.263.619)	12,68
4.1.01.01.11.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	42.814.687,00	19.690.564,00	(23.124.123)	45,99
4.1.01.01.14.	PKB-Mobil Roda Tiga	4.125.529,00	617.074,00	(3.508.455)	14,96
4.1.01.01.14.0001.	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	3.007.980,00	617.074,00	(2.390.906)	20,51
4.1.01.01.14.0004.	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1.117.549,00	-	(1.117.549)	-
4.1.01.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	221.062.468.498,00	113.281.556.482,00	(107.780.912.016)	51,24
4.1.01.02.01.	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	260.494.740,00	45.137.682,00	(215.357.058)	17,33
4.1.01.02.01.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	260.494.740,00	45.137.682,00	(215.357.058)	17,33
4.1.01.02.02.	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	3.258.323.175,00	2.781.812.888,00	(476.510.287)	85,38
4.1.01.02.02.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	3.258.323.175,00	2.781.812.888,00	(476.510.287)	85,38
4.1.01.02.03.	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	49.472.968.354,00	20.051.059.988,00	(29.421.908.366)	40,53
4.1.01.02.03.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	49.472.968.354,00	20.051.059.988,00	(29.421.908.366)	40,53
4.1.01.02.04.	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.889.263.992,00	923.975.280,00	(965.288.712)	48,91
4.1.01.02.04.0001.	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.889.263.992,00	923.975.280,00	(965.288.712)	48,91
4.1.01.02.05.	BBNKB-Mobil Bus-Bus	26.447.784,00	-	(26.447.784)	-

12

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.02.05.0001.	BBNKB-Mobil Bus-Bus	26.447.784,00	-	(26.447.784)	-
4.1.01.02.06.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	33.059.841.527,00	16.275.764.520,00	(16.784.077.007)	49,23
4.1.01.02.06.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	33.059.841.527,00	16.275.764.520,00	(16.784.077.007)	49,23
4.1.01.02.07.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.672.680.309,00	2.490.205.980,00	(4.182.474.329)	37,32
4.1.01.02.07.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.672.680.309,00	2.490.205.980,00	(4.182.474.329)	37,32
4.1.01.02.08.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.710.082.394,00	438.694.800,00	(3.271.387.594)	11,82
4.1.01.02.08.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.710.082.394,00	438.694.800,00	(3.271.387.594)	11,82
4.1.01.02.09.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	156.233.114,00	322.226.400,00	165.993.286	206,25
4.1.01.02.09.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	156.233.114,00	322.226.400,00	165.993.286	206,25
4.1.01.02.10.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	122.142.415.581,00	69.764.046.336,00	(52.378.369.245)	57,12
4.1.01.02.10.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	122.142.415.581,00	69.764.046.336,00	(52.378.369.245)	57,12
4.1.01.02.11.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	407.105.582,00	188.632.608,00	(218.472.974)	46,34
4.1.01.02.11.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	407.105.582,00	188.632.608,00	(218.472.974)	46,34
4.1.01.02.14.	BBNKB-Mobil Roda Tiga	6.611.946,00	-	(6.611.946)	-
4.1.01.02.14.0001.	BBNKB-Mobil Roda Tiga	6.611.946,00	-	(6.611.946)	-
4.1.01.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	277.607.890.144,00	252.209.371.929,00	(25.398.518.215)	90,85
4.1.01.03.01.	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	276.422.308.230,00	251.017.035.419,00	(25.405.272.811)	90,81
4.1.01.03.01.0001.	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	276.422.308.230,00	251.017.035.419,00	(25.405.272.811)	90,81
4.1.01.03.02.	PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.185.581.914,00	1.192.336.510,00	6.754.596	100,57
4.1.01.03.02.0001.	PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.185.581.914,00	1.192.336.510,00	6.754.596	100,57
4.1.01.04.	Pajak Air Permukaan	500.000.000,00	460.543.039,71	(39.456.960)	92,11
4.1.01.04.01.	Pajak Air Permukaan	500.000.000,00	460.543.039,71	(39.456.960)	92,11
4.1.01.04.01.0001.	Pajak Air Permukaan	500.000.000,00	460.543.039,71	(39.456.960)	92,11
4.1.01.05.	Pajak Rokok	461.848.477.027,00	446.413.718.197,00	(15.434.758.830)	96,66
4.1.01.05.01.	Pajak Rokok	461.848.477.027,00	446.413.718.197,00	(15.434.758.830)	96,66
4.1.01.05.01.0001.	Pajak Rokok	461.848.477.027,00	446.413.718.197,00	(15.434.758.830)	96,66
4.1.01.17.	Pajak Alat Berat	4.000.000.000,00	64.129.771,00	(3.935.870.229)	1,60
4.1.01.17.01.	Pajak Alat Berat	4.000.000.000,00	64.129.771,00	(3.935.870.229)	1,60
4.1.01.17.01.0001.	Pajak Alat Berat	4.000.000.000,00	64.129.771,00	(3.935.870.229)	1,60
4.1.01.18.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	20.000.000.000,00	5.478.470.179,51	(14.521.529.820)	27,39
4.1.01.18.01.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	20.000.000.000,00	5.478.470.179,51	(14.521.529.820)	27,39
4.1.01.18.01.0001.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	20.000.000.000,00	5.478.470.179,51	(14.521.529.820)	27,39
4.1.02.	Retribusi Daerah	204.165.588.278,00	178.912.998.471,19	(25.252.589.807)	87,63
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	147.248.317.497,00	139.081.935.506,17	(8.166.381.991)	94,45
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	144.868.317.497,00	139.080.647.106,17	(5.787.670.391)	96,00
4.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	136.236.332.497,00	127.491.549.705,00	(8.744.782.792)	93,58

12

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	8.631.985.000,00	11.589.097.401,17	2.957.112.401	134,26
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.380.000.000,00	1.288.400,00	(2.378.711.600)	0,05
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.380.000.000,00	1.288.400,00	(2.378.711.600)	0,05
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	56.797.270.781,00	39.831.062.965,02	(16.966.207.816)	70,13
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	20.080.000,00	10.080.000	200,80
4.1.02.02.01.0007.	Retribusi Pemakaian Alat	10.000.000,00	20.080.000,00	10.080.000	200,80
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.097.450.000,00	4.260.890.000,00	(836.560.000)	83,59
4.1.02.02.06.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.097.450.000,00	4.260.890.000,00	(836.560.000)	83,59
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	174.548.000,00	90.568.000,00	(83.980.000)	51,89
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	174.548.000,00	90.568.000,00	(83.980.000)	51,89
4.1.02.02.12.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.225.800.000,00	2.141.440.581,00	(84.359.419)	96,21
4.1.02.02.12.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.225.800.000,00	2.141.440.581,00	(84.359.419)	96,21
4.1.02.02.14.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.984.052.000,00	1.744.363.000,00	(239.689.000)	87,92
4.1.02.02.14.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.984.052.000,00	1.744.363.000,00	(239.689.000)	87,92
4.1.02.02.16.	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.531.407.600,00	1.054.118.344,50	(477.289.256)	68,83
4.1.02.02.16.0001.	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.531.407.600,00	1.054.118.344,50	(477.289.256)	68,83
4.1.02.02.17.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.763.592.400,00	2.678.027.500,00	914.435.100	151,85
4.1.02.02.17.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.763.592.400,00	2.678.027.500,00	914.435.100	151,85
4.1.02.02.19.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	7.900.204.600,00	5.545.908.255,50	(2.354.296.345)	70,20
4.1.02.02.19.0001.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	7.900.204.600,00	5.545.908.255,50	(2.354.296.345)	70,20
4.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.110.216.181,00	22.295.667.284,02	(13.814.548.897)	61,74
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.110.216.181,00	22.295.667.284,02	(13.814.548.897)	61,74
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	120.000.000,00	-	(120.000.000)	-
4.1.02.03.09.	Retribusi Pertambangan Rakyat	120.000.000,00	-	(120.000.000)	-
4.1.02.03.09.0001.	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	120.000.000,00	-	(120.000.000)	-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	(16.028.839.950)	74,25
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	(16.028.839.950)	74,25

Handwritten signature

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	(16.028.839.950)	74,25
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	(16.028.839.950)	74,25
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	91.978.614.676,00	40.338.522.130,94	(51.640.092.545)	43,86
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	141.597.853,00	(858.402.147)	14,16
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	141.597.853,00	(858.402.147)	14,16
4.1.04.01.02.0485.	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	1.000.000.000,00	141.597.853,00	(858.402.147)	14,16
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.505.000.000,00	197.378.146,00	(1.307.621.854)	13,11
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.505.000.000,00	197.378.146,00	(1.307.621.854)	13,11
4.1.04.03.02.0001.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.505.000.000,00	197.378.146,00	(1.307.621.854)	13,11
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	15.134.950.194,00	9.118.711.800,00	(6.016.238.394)	60,25
4.1.04.04.01.	Hasil Kerja Sama Daerah	15.134.950.194,00	9.118.711.800,00	(6.016.238.394)	60,25
4.1.04.04.01.0001.	Hasil Kerja Sama Daerah	15.134.950.194,00	9.118.711.800,00	(6.016.238.394)	60,25
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000,00	4.251.600.845,51	(748.399.154)	85,03
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	4.251.358.583,22	(748.641.417)	85,03
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	4.251.358.583,22	(748.641.417)	85,03
4.1.04.05.04.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	242.262,29	242.262	-
4.1.04.05.04.0001.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	242.262,29	242.262	-
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	7.339.400.736,69	6.339.400.737	733,94
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	7.339.400.736,69	6.339.400.737	733,94
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	7.339.400.736,69	6.339.400.737	733,94
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	29.269.178.857,00	4.056.494.961,87	(25.212.683.895)	13,86
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	29.269.178.857,00	4.056.494.961,87	(25.212.683.895)	13,86
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	29.269.178.857,00	4.056.494.961,87	(25.212.683.895)	13,86
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000,00	1.022.938.911,00	(8.977.061.089)	10,23
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000,00	1.022.938.911,00	(8.977.061.089)	10,23
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000,00	1.022.938.911,00	(8.977.061.089)	10,23
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.155.733.122,00	9.702.717.348,55	(5.453.015.773)	64,02
4.1.04.12.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.875.216.320,00	9.559.998.652,00	(5.315.217.668)	64,27
4.1.04.12.01.0016.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	89.313.639,00	24.905.129,00	(64.408.510)	27,89

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.01.0020.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	461.218.244,00	365.366.856,00	(95.851.388)	79,22
4.1.04.12.01.0024.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	2.899.220.507,00	2.505.551.868,00	(393.668.639)	86,42
4.1.04.12.01.0028.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	74.680.819,00	39.310.356,00	(35.370.463)	52,64
4.1.04.12.01.0032.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	827.166,00	195.360,00	(631.806)	23,62
4.1.04.12.01.0036.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.980.613.728,00	1.649.564.162,00	(331.049.566)	83,29
4.1.04.12.01.0040.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	2.318.819.141,00	1.417.286.102,00	(901.533.039)	61,12
4.1.04.12.01.0044.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	377.223.141,00	210.969.657,00	(166.253.484)	55,93
4.1.04.12.01.0048.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	8.732.936,00	6.727.640,00	(2.005.296)	77,04
4.1.04.12.01.0052.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	6.650.983.448,00	3.337.565.466,00	(3.313.417.982)	50,18
4.1.04.12.01.0056.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	13.472.303,00	2.556.056,00	(10.916.247)	18,97
4.1.04.12.01.0068.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	111.248,00	-	(111.248)	-
4.1.04.12.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	280.516.802,00	125.761.476,00	(154.755.326)	44,83
4.1.04.12.02.0001.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	7.566.000,00	-	(7.566.000)	-
4.1.04.12.02.0002.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	9.930.000,00	7.649.505,00	(2.280.495)	77,03
4.1.04.12.02.0003.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	43.289.460,00	26.589.163,00	(16.700.297)	61,42
4.1.04.12.02.0004.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.170.000,00	3.776.652,00	2.606.652	322,79
4.1.04.12.02.0006.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	25.920.300,00	15.587.338,00	(10.332.962)	60,14
4.1.04.12.02.0007.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	41.183.700,00	10.038.582,00	(31.145.118)	24,38
4.1.04.12.02.0008.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	50.115.600,00	544.428,00	(49.571.172)	1,09
4.1.04.12.02.0010.	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	94.268.640,00	61.557.805,00	(32.710.835)	65,30
4.1.04.12.02.0011.	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	7.073.102,00	18.003,00	(7.055.099)	0,25
4.1.04.12.04.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	7.097.188,55	7.097.189	-
4.1.04.12.04.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	7.097.188,55	7.097.189	-
4.1.04.12.18.	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	-	9.860.032,00	9.860.032	-
4.1.04.12.18.0001.	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	-	9.860.032,00	9.860.032	-
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	96.239.079,12	96.239.079	-
4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	96.239.079,12	96.239.079	-

Handwritten signature/initials

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.13.02.0012.	Pendapatan Denda Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	280.000,00	280.000	-
4.1.04.13.02.0037.	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	-	1.045.000,00	1.045.000	-
4.1.04.13.02.0046.	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	-	94.914.079,12	94.914.079	-
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000,00	2.535.736.625,72	(8.464.263.374)	23,05
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000.000,00	2.293.797.285,72	(7.706.202.714)	22,94
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000.000,00	2.293.797.285,72	(7.706.202.714)	22,94
4.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.000.000.000,00	241.939.340,00	(758.060.660)	24,19
4.1.04.15.08.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1.000.000.000,00	241.939.340,00	(758.060.660)	24,19
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	2.913.667.503,00	1.875.497.823,48	(1.038.169.680)	64,37
4.1.04.16.04.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.413.667.503,00	1.570.427.160,00	156.759.657	111,09
4.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.413.667.503,00	1.570.427.160,00	156.759.657	111,09
4.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.500.000.000,00	305.070.663,48	(1.194.929.337)	20,34
4.1.04.16.06.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	400.000.000,00	305.070.663,48	(94.929.337)	76,27
4.1.04.16.06.0002.	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	1.100.000.000,00	-	(1.100.000.000)	-
4.1.04.28.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah.	85.000,00	208.000,00	123.000	244,71
4.1.04.28.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah	85.000,00	208.000,00	123.000	244,71
4.1.04.28.01.0071.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah..	85.000,00	208.000,00	123.000	244,71
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	(58.451.919.753)	98,12
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	(58.451.919.753)	98,12
4.2.01.06.	Insentif Fiskal	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	0	100,00
4.2.01.06.02.	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	0	100,00
4.2.01.06.02.0001.	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	0	100,00
4.2.01.07.	Dana Bagi Hasil (DBH)	61.652.427.000,00	52.106.429.650,00	(9.545.997.350)	84,52
4.2.01.07.01.	DBH Pajak	60.079.101.000,00	50.413.367.050,00	(9.665.733.950)	83,91
4.2.01.07.01.0001.	DBH PBB	4.059.812.000,00	4.133.921.550,00	74.109.550	101,83
4.2.01.07.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	48.258.335.000,00	44.130.004.500,00	(4.128.330.500)	91,45

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.07.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.760.954.000,00	2.149.441.000,00	(5.611.513.000)	27,70
4.2.01.07.02.	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.573.326.000,00	1.693.062.600,00	119.736.600	107,61
4.2.01.07.02.0003.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.046.825.000,00	1.131.656.000,00	84.831.000	108,10
4.2.01.07.02.0004.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	397.747.000,00	448.048.000,00	50.301.000	112,65
4.2.01.07.02.0007.	DBH SDA Kehutanan-Juran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	90.312.000,00	92.542.000,00	2.230.000	102,47
4.2.01.07.02.0008.	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	38.442.000,00	20.816.600,00	(17.625.400)	54,15
4.2.01.08.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.029.253.589.000,00	1.990.566.496.640,00	(38.687.092.360)	98,09
4.2.01.08.01.	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.542.866.521.000,00	1.542.273.268.112,00	(593.252.888)	99,96
4.2.01.08.01.0001.	DAU	1.542.866.521.000,00	1.542.273.268.112,00	(593.252.888)	99,96
4.2.01.08.02.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	486.387.068.000,00	448.293.228.528,00	(38.093.839.472)	92,17
4.2.01.08.02.0003.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	184.327.030.000,00	146.233.190.528,00	(38.093.839.472)	79,33
4.2.01.08.02.0004.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	260.918.641.000,00	260.918.641.000,00	0	100,00
4.2.01.08.02.0005.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.141.397.000,00	41.141.397.000,00	0	100,00
4.2.01.09.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.014.469.052.000,00	1.004.250.221.957,00	(10.218.830.043)	98,99
4.2.01.09.01.	DAK Fisik	51.732.870.000,00	50.956.396.248,00	(776.473.752)	98,50
4.2.01.09.01.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	33.415.284.000,00	33.297.648.434,00	(117.635.566)	99,65
4.2.01.09.01.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	321.800.000,00	321.141.870,00	(658.130)	99,80
4.2.01.09.01.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	17.995.786.000,00	17.337.605.944,00	(658.180.056)	96,34
4.2.01.09.02.	DAK Non Fisik	962.736.182.000,00	953.293.825.709,00	(9.442.356.291)	99,02
4.2.01.09.02.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	495.437.539.000,00	494.739.555.444,00	(697.983.556)	99,86
4.2.01.09.02.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.931.750.000,00	10.931.750.000,00	0	100,00
4.2.01.09.02.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	419.218.077.000,00	418.913.471.200,00	(304.605.800)	99,93
4.2.01.09.02.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	8.472.748.000,00	709.750.000,00	(7.762.998.000)	8,38
4.2.01.09.02.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.318.485.000,00	17.567.473.800,00	1.248.988.800	107,65
4.2.01.09.02.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.881.156.000,00	1.845.100.400,00	(36.055.600)	98,08
4.2.01.09.02.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.931.572.427,00	(68.427.573)	96,58
4.2.01.09.02.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742.000,00	427.530.236,00	(23.211.764)	94,85
4.2.01.09.02.0032.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	6.883.685.000,00	5.085.622.202,00	(1.798.062.798)	73,88
4.2.01.09.02.0039.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	0	100,00
4.2.01.09.02.0041.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0	100,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.09.02.0042.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0	100,00
4.2.01.09.02.0043.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	150.000.000,00	150.000.000,00	0	100,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.011.347.868,00	203.417.490.868,00	1.406.143.000	100,70
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	2.406.143.000,00	1.406.143.000	240,61
4.3.01.03.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	500.000.000,00	1.484.075.000,00	984.075.000	296,82
4.3.01.03.01.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	500.000.000,00	1.484.075.000,00	984.075.000	296,82
4.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	500.000.000,00	1.484.075.000,00	984.075.000	296,82
4.3.01.04.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	500.000.000,00	922.068.000,00	422.068.000	184,41
4.3.01.04.01.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	500.000.000,00	922.068.000,00	422.068.000	184,41
4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	500.000.000,00	922.068.000,00	422.068.000	184,41
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00	0	100,00
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00	0	100,00
4.3.03.01.02.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00	0	100,00
4.3.03.01.02.0005.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00	0	100,00
5.	BELANJA DAERAH	5.187.494.103.513,00	4.298.309.595.676,84	(889.184.507.836)	82,86
5.1.	BELANJA OPERASI	4.071.238.477.184,00	3.373.705.603.135,91	(697.532.874.048)	82,87
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.483.703.181.724,00	1.992.090.954.369,20	(491.612.227.355)	80,21
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.094.404.493,00	1.327.797.469.809,00	(424.296.934.684)	75,78
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.317.892.417.559,00	1.021.420.769.571,00	(296.471.647.988)	77,50
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	888.290.130.880,00	695.466.334.762,00	(192.823.796.118)	78,29
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	429.602.286.679,00	325.954.434.809,00	(103.647.851.870)	75,87
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	124.196.460.461,00	82.613.784.476,00	(41.582.675.985)	66,52
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	79.001.384.776,00	62.340.876.404,00	(16.660.508.372)	78,91
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	45.195.075.685,00	20.272.908.072,00	(24.922.167.613)	44,86
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.960.179.991,00	7.521.750.000,00	(5.438.429.991)	58,04
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12.960.179.991,00	7.521.750.000,00	(5.438.429.991)	58,04
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	64.972.871.726,00	49.135.219.040,00	(15.837.652.686)	75,62
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	64.372.871.726,00	49.135.219.040,00	(15.237.652.686)	76,33
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	600.000.000,00	-	(600.000.000)	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.094.538.349,00	29.018.733.209,00	(5.075.805.140)	85,11

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.664.337.072,00	10.015.912.500,00	(2.648.424.572)	79,09
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21.430.201.277,00	19.002.820.709,00	(2.427.380.568)	88,67
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	98.725.293.466,00	64.363.382.330,00	(34.361.911.136)	65,19
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.114.497.787,00	46.620.666.200,00	(13.493.831.587)	77,55
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	38.610.795.679,00	17.742.716.130,00	(20.868.079.549)	45,95
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.628.141.892,00	1.310.089.988,00	(318.051.904)	80,47
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.628.141.892,00	1.310.089.988,00	(318.051.904)	80,47
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	189.991.355,00	14.920.323,00	(175.071.032)	7,85
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	114.300.338,00	8.608.023,00	(105.692.315)	7,53
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	75.691.017,00	6.312.300,00	(69.378.717)	8,34
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	80.717.928.556,00	63.797.511.635,00	(16.920.416.921)	79,04
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	61.991.444.293,00	44.030.206.790,00	(17.961.237.503)	71,03
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18.726.484.263,00	19.767.304.845,00	1.040.820.582	105,56
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.761.981.538,00	2.150.379.859,00	(611.601.679)	77,86
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.827.928.776,00	1.434.505.243,00	(393.423.533)	78,48
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	934.052.762,00	715.874.616,00	(218.178.146)	76,64
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.285.942.608,00	6.450.929.378,00	(1.835.013.230)	77,85
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.483.786.555,00	4.303.503.651,00	(1.180.282.904)	78,48
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.802.156.053,00	2.147.425.727,00	(654.730.326)	76,63
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.668.656.992,00	-	(5.668.656.992)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.807.855.806,00	-	(3.807.855.806)	-
5.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.860.801.186,00	-	(1.860.801.186)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	667.136.264.984,00	602.340.326.010,00	(64.795.938.974)	90,29
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	64.081.442.491,00	52.571.382.973,00	(11.510.059.518)	82,04
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47.846.383.855,00	39.092.032.998,00	(8.754.350.857)	81,70
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.235.058.636,00	13.479.349.975,00	(2.755.708.661)	83,03
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	327.010.506,00	230.758.226,00	(96.252.280)	70,57
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	327.010.506,00	230.758.226,00	(96.252.280)	70,57
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.730.831.092,00	3.328.578.593,00	(402.252.499)	89,22
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.730.831.092,00	3.328.578.593,00	(402.252.499)	89,22
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	712.206.780,00	621.018.662,00	(91.188.118)	87,20

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	712.206.780,00	621.018.662,00	(91.188.118)	87,20
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	111.624.977.034,00	96.799.343.915,00	(14.825.633.119)	86,72
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	111.378.191.982,00	96.587.418.485,00	(14.790.773.497)	86,72
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	246.785.052,00	211.925.430,00	(34.859.622)	85,87
5.1.01.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	486.659.797.081,00	448.789.243.641,00	(37.870.553.440)	92,22
5.1.01.02.06.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	12.919.327.134,00	7.779.067.111,00	(5.140.260.023)	60,21
5.1.01.02.06.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bes Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.631.874.055,00	2.650.076.508,00	(3.981.797.547)	39,96
5.1.01.02.06.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	15.000.000,00	11.899.359,00	(3.100.641)	79,33
5.1.01.02.06.0017.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat	120.000.000,00	-	(120.000.000)	-
5.1.01.02.06.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	71.400.000,00	-	(71.400.000)	-
5.1.01.02.06.0035.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemaknaan Kekayaan Daerah	37.336.440,00	27.404.127,00	(9.932.313)	73,40
5.1.01.02.06.0036.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.170.000,00	-	(1.170.000)	-
5.1.01.02.06.0040.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	57.673.500,00	49.453.500,00	(8.220.000)	85,75
5.1.01.02.06.0042.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	134.250.000,00	20.933.837,00	(113.316.163)	15,59
5.1.01.02.06.0043.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	54.529.332,00	52.907.772,00	(1.621.560)	97,03
5.1.01.02.06.0045.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.942.228,00	30.942.228,00	0	100,00
5.1.01.02.06.0047.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.086.000,00	-	(1.086.000)	-
5.1.01.02.06.0052.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat	3.600.000,00	-	(3.600.000)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.06.0055.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	44.109.000,00	1.764.000,00	(42.345.000)	4,00
5.1.01.02.06.0057.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	57.900.000,00	46.069.140,00	(11.830.860)	79,57
5.1.01.02.06.0059.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	15.000.000,00	8.869.490,00	(6.130.510)	59,13
5.1.01.02.06.0060.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	95.400.000,00	69.364.500,00	(26.035.500)	72,71
5.1.01.02.06.0062.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	125.406.138,00	28.489.200,00	(96.916.938)	22,72
5.1.01.02.06.0063.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.153.494.155,00	276.083.669,00	(877.410.486)	23,93
5.1.01.02.06.0064.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	420.648.871.675,00	419.449.095.400,00	(1.199.776.275)	99,71
5.1.01.02.06.0065.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.358.445.924,00	17.567.473.800,00	1.209.027.876	107,39
5.1.01.02.06.0066.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	28.073.381.500,00	709.750.000,00	(27.363.631.500)	2,53
5.1.01.02.06.0068.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0	100,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	55.986.951.000,00	54.767.475.357,00	(1.219.475.643)	97,82
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000,00	2.062.050.000,00	(2.250.000)	99,89
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000,00	2.062.050.000,00	(2.250.000)	99,89
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	112.845.000,00	(176.157.000)	39,05
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	112.845.000,00	(176.157.000)	39,05
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	385.257.600,00	110.947.440,00	(274.310.160)	28,80
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	385.257.600,00	110.947.440,00	(274.310.160)	28,80
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	176.715.000,00	(225.000)	99,87
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	176.715.000,00	(225.000)	99,87
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.989.972.500,00	(3.262.500)	99,89
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.989.972.500,00	(3.262.500)	99,89
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	280.314.000,00	270.657.000,00	(9.657.000)	96,55
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	280.314.000,00	270.657.000,00	(9.657.000)	96,55
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	160.515.000,00	-	(160.515.000)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	160.515.000,00	-	(160.515.000)	-
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.685.000.000,00	(15.000.000)	99,87
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.685.000.000,00	(15.000.000)	99,87
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0	100,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0	100,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	124.698.406,00	47.374.877,00	(77.323.529)	37,99
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	124.698.406,00	47.374.877,00	(77.323.529)	37,99
5.1.01.04.11.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.009.754,00	-	(1.009.754)	-
5.1.01.04.11.0001.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.009.754,00	-	(1.009.754)	-
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.107.629.240,00	14.071.213.540,00	(36.415.700)	99,74
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	200.943.000,00	177.048.900,00	(23.894.100)	88,11
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.246.560,00	4.241.160,00	(5.400)	99,87
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.739.680,00	12.723.480,00	(16.200)	99,87
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.889.700.000,00	13.877.200.000,00	(12.500.000)	99,91
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	20.336.700.000,00	20.315.700.000,00	(21.000.000)	99,90
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	20.336.700.000,00	20.315.700.000,00	(21.000.000)	99,90
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.350.000,00	-	(442.350.000)	-
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.350.000,00	-	(442.350.000)	-
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	263.528.000,00	188.759.150,00	(74.768.850)	71,63
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	59.400.000,00	(16.200.000)	78,57
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	59.400.000,00	(16.200.000)	78,57
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	6.600.000,00	(3.984.000)	62,36
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	6.600.000,00	(3.984.000)	62,36
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	106.920.000,00	(29.160.000)	78,57
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	106.920.000,00	(29.160.000)	78,57
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.829.760,00	6.303.500,00	(7.526.260)	45,58
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.829.760,00	6.303.500,00	(7.526.260)	45,58
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	18.911.424,00	2.729.250,00	(16.182.174)	14,43
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	18.911.424,00	2.729.250,00	(16.182.174)	14,43
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	280.256,00	-	(280.256)	-
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	280.256,00	-	(280.256)	-
5.1.01.05.07.	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.620.480,00	6.288.000,00	(1.332.480)	82,51

R

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.620.480,00	6.288.000,00	(1.332.480)	82,51
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	129.600,00	(25.920)	83,33
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	129.600,00	(25.920)	83,33
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	388.800,00	(77.760)	83,33
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	388.800,00	(77.760)	83,33
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.500.536.000,00	2.500.536.000,00	0	100,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.140.536.000,00	2.140.536.000,00	0	100,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.140.536.000,00	2.140.536.000,00	0	100,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	5.721.497.247,00	4.496.388.043,20	(1.225.109.204)	78,59
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	5.721.497.247,00	4.496.388.043,20	(1.225.109.204)	78,59
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	5.721.497.247,00	4.496.388.043,20	(1.225.109.204)	78,59
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.337.992.772.436,00	1.138.177.002.805,71	(199.815.769.630)	85,07
5.1.02.01.	Belanja Barang	222.544.132.389,00	199.175.161.759,60	(23.368.970.629)	89,50
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	222.414.361.163,00	199.079.038.634,60	(23.335.322.528)	89,51
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	956.116.429,00	896.904.368,00	(59.212.061)	93,81
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.406.108.518,00	923.574.667,00	(482.533.851)	65,68
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.347.282.911,00	6.582.842.731,00	(764.440.180)	89,60
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.128.729.095,00	1.002.341.920,00	(126.387.175)	88,80
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	258.552.294,00	235.723.400,00	(22.828.894)	91,17
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.285.493.559,00	2.120.572.104,00	(164.921.455)	92,78
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	433.200,00	433.200,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.621.322.688,00	4.596.680.040,00	(1.024.642.648)	81,77
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	517.373.900,00	464.973.327,00	(52.400.573)	89,87
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	973.276.231,00	281.713.621,00	(691.562.610)	28,94
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	569.504.348,00	540.803.967,00	(28.700.381)	94,96
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	267.527.700,00	230.334.800,00	(37.192.900)	86,10
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	41.907.758,00	39.359.174,00	(2.548.584)	93,92
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.685.274.210,00	3.243.922.654,00	(441.351.556)	88,02
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.357.184.467,00	4.252.018.442,00	(1.105.166.025)	79,37

Handwritten signature/initials

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.410.019.252,89	14.171.084.285,60	(2.238.934.967)	86,36
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	651.987.237,00	537.162.497,00	(114.824.740)	82,39
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	303.833.552,00	262.987.028,00	(40.846.524)	86,56
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.472.363.650,00	599.495.447,00	(872.868.203)	40,72
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.067.248.578,11	1.622.018.618,00	(445.229.960)	78,46
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	87.410.000,00	85.149.040,00	(2.260.960)	97,41
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	360.990.000,00	358.669.796,00	(2.320.204)	99,36
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.155.356.475,00	1.971.933.388,00	(183.423.087)	91,49
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.189.971.605,00	929.089.241,00	(260.882.364)	78,08
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.488.100.594,00	9.818.277.478,00	(1.669.823.116)	85,46
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.209.446.462,00	11.421.992.327,00	(1.787.454.135)	86,47
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.023.646.968,00	27.027.217.618,00	(4.996.429.350)	84,40
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.046.176.611,00	11.847.582.173,00	(198.594.438)	98,35
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.156.949.995,00	1.059.782.575,00	(97.167.420)	91,60
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.817.742.502,00	71.209.106.671,00	(3.608.635.831)	95,18
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.926.854.114,00	3.630.698.046,00	(296.156.068)	92,46
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.938.000.000,00	4.315.554.700,00	(622.445.300)	87,39
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	461.160.000,00	363.692.300,00	(97.467.700)	78,86
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.480.982.090,00	8.080.857.320,00	(400.124.770)	95,28
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.084.126.400,00	1.947.805.660,00	(136.320.740)	93,46
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakalan Dinas KDH dan WKDH	944.000.000,00	834.282.061,00	(109.717.939)	88,38
5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakalan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	875.875.000,00	774.169.500,00	(101.705.500)	88,39
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	650.000,00	650.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL)	6.925.000,00	6.295.000,00	(630.000)	90,90
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)	30.500.000,00	30.500.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakalan Siaga	184.965.000,00	184.676.250,00	(288.750)	99,84
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakalan Adat Daerah	160.079.129,00	120.545.000,00	(39.534.129)	75,30
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakalan Paskibraka	462.913.640,00	455.566.200,00	(7.347.440)	98,41

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	129.771.226,00	96.123.125,00	(33.648.101)	74,07
5.1.02.01.04.0107.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	114.000,00	-	(114.000)	-
5.1.02.01.04.0120.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	132.600,00	-	(132.600)	-
5.1.02.01.04.0122.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	6.623.882,00	3.286.625,00	(3.337.257)	49,62
5.1.02.01.04.0133.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.501.720,00	-	(1.501.720)	-
5.1.02.01.04.0204.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	80.850.000,00	76.007.500,00	(4.842.500)	94,01
5.1.02.01.04.0411.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	549.024,00	-	(549.024)	-
5.1.02.01.04.0459.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	40.000.000,00	16.829.000,00	(23.171.000)	42,07
5.1.02.02.	Belanja Jasa	499.624.177.709,00	396.383.806.872,00	(103.240.370.837)	79,34
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	320.291.213.779,00	231.117.816.455,00	(89.173.397.324)	72,16
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	270.215.000,00	220.855.000,00	(49.360.000)	81,73
5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	567.600.000,00	556.050.000,00	(11.550.000)	97,97
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.588.482.000,00	4.102.915.000,00	(2.485.567.000)	62,27
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.809.310.000,00	13.784.353.000,00	(2.024.957.000)	87,19
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	419.650.000,00	379.528.500,00	(40.121.500)	90,44
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.026.160.000,00	6.025.160.000,00	(1.000.000)	99,98
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	141.800.000,00	122.000.000,00	(19.800.000)	86,04
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.154.630.000,00	1.069.220.000,00	(85.410.000)	92,60
5.1.02.02.01.0010.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	119.000.000,00	118.400.000,00	(600.000)	99,50
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.276.020.000,00	6.735.342.000,00	(540.678.000)	92,57
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	769.200.000,00	644.900.000,00	(124.300.000)	83,84
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.935.200.000,00	14.077.000.000,00	(1.858.200.000)	88,34
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	887.600.000,00	659.867.820,00	(227.732.180)	74,34
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	121.307.275,00	118.416.650,00	(2.890.625)	97,62

Handwritten signature

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	699.000.000,00	687.250.000,00	(11.750.000)	98,32
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	547.030.000,00	490.251.900,00	(56.778.100)	89,62
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.157.900.000,00	2.124.000.000,00	(33.900.000)	98,43
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.843.881.000,00	3.641.026.000,00	(202.855.000)	94,72
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.605.700.000,00	3.558.000.000,00	(47.700.000)	98,68
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.200.000.000,00	4.032.310.000,00	(167.690.000)	96,01
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	131.472.178.812,00	91.655.319.960,00	(39.816.858.852)	69,71
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.866.870.000,00	2.467.241.500,00	(399.628.500)	86,06
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.800.000,00	160.350.000,00	(10.450.000)	93,88
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.307.600.000,00	1.094.113.158,00	(213.486.842)	83,67
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	147.000.000,00	146.500.000,00	(500.000)	99,66
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	91.000.000,00	84.925.000,00	(6.075.000)	93,32
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	351.000.000,00	314.555.000,00	(36.445.000)	89,62
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	637.050.000,00	537.000.000,00	(100.050.000)	84,29
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	490.500.000,00	308.000.000,00	(182.500.000)	62,79
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	142.065.000,00	125.705.403,00	(16.359.597)	88,48
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.118.911.440,00	799.558.372,00	(319.353.068)	71,46
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.332.752.389,00	4.906.167.435,00	(426.584.954)	92,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	623.000.000,00	443.055.000,00	(179.945.000)	71,12
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	290.998.000,00	251.203.834,00	(39.794.166)	86,32
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	309.978.000,00	273.966.900,00	(36.011.100)	88,38
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.796.200.000,00	883.335.706,00	(912.864.294)	49,18
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	206.000.000,00	158.280.000,00	(47.720.000)	76,83
5.1.02.02.01.0054.	Belanja Jasa Jalan/Tol	211.400.000,00	200.186.902,00	(11.213.098)	94,70
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.104.773.000,00	1.161.257.900,00	(943.515.100)	55,17
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	261.855.000,00	228.814.931,00	(33.040.069)	87,38
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.150.887.403,00	2.711.927.777,00	(438.959.626)	86,07
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	16.229.906.185,00	14.839.639.932,00	(1.390.266.253)	91,43
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	782.350.000,00	540.466.000,00	(241.884.000)	69,08
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.444.639.040,00	7.598.972.115,00	(845.666.925)	89,99
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	2.573.954.523,00	1.909.802.698,00	(664.151.825)	74,20

R

Delam Rupiah

kode Rekening	Uralan	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.984.074.914,00	978.283.557,00	(1.005.791.357)	49,31
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	21.876.051.098,00	19.653.261.205,00	(2.222.789.893)	89,84
5.1.02.02.01.0080.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.827.263.700,00	5.578.182.300,00	(249.081.400)	95,73
5.1.02.02.01.0081.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.633.270.000,00	3.130.898.000,00	(502.372.000)	86,17
5.1.02.02.01.0086.	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	33.667.200.000,00	3.780.000.000,00	(29.887.200.000)	11,23
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	116.264.324.563,00	108.919.365.439,00	(7.344.959.124)	93,68
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	78.042.940.000,00	77.804.692.000,00	(238.248.000)	99,69
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	16.720.129.718,00	15.218.500.800,00	(1.501.628.918)	91,02
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.628.527.000,00	3.822.273.000,00	(2.806.254.000)	57,66
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	405.235.620,00	234.685.300,00	(170.550.320)	57,91
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	506.566.125,00	290.350.775,00	(216.215.350)	57,32
5.1.02.02.02.0008.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	36.000.000,00	-	(36.000.000)	-
5.1.02.02.02.0009.	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.844.926.100,00	1.468.863.564,00	(2.376.062.536)	38,20
5.1.02.02.02.0012.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	10.080.000.000,00	10.080.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	95.000.000,00	95.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	95.000.000,00	95.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.943.754.569,00	12.199.876.381,00	(1.743.878.188)	87,49
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	156.000.000,00	150.989.999,00	(5.010.001)	96,79
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.944.307.600,00	8.093.413.400,00	(850.894.200)	90,49
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	117.700.000,00	101.600.000,00	(16.100.000)	86,32
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	10.000.000,00	-	(10.000.000)	-
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	140.000.000,00	87.800.000,00	(52.200.000)	62,71
5.1.02.02.04.0058.	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	455.000.000,00	119.549.550,00	(335.450.450)	26,27
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.833.830.866,00	1.551.583.524,00	(282.247.342)	84,61
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	46.500.000,00	46.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	775.750.000,00	750.734.999,00	(25.015.001)	96,78
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.215.980.000,00	1.073.240.129,00	(142.739.871)	88,26
5.1.02.02.04.0189.	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	4.782.103,00	1.075.181,00	(3.706.922)	22,48
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	169.800.000,00	149.285.599,00	(20.514.401)	87,92

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0463.	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.104.000,00	4.104.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0509.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.898.275.000,00	13.245.456.750,00	(652.818.250)	95,30
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	746.399.000,00	736.399.000,00	(10.000.000)	98,66
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.664.700.000,00	1.185.700.500,00	(478.999.500)	71,23
5.1.02.02.05.0011.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	40.600.000,00	31.800.000,00	(8.800.000)	78,33
5.1.02.02.05.0025.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10.457.676.000,00	10.351.707.250,00	(105.968.750)	98,99
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	920.400.000,00	871.850.000,00	(48.550.000)	94,73
5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	68.500.000,00	68.000.000,00	(500.000)	99,27
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.050.000.000,00	4.438.665.220,00	(611.334.780)	87,89
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	840.000.000,00	838.175.375,00	(1.824.625)	99,78
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.600.000.000,00	1.582.978.300,00	(17.021.700)	98,94
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	835.000.000,00	834.646.670,00	(353.330)	99,96
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.700.000.000,00	1.107.926.000,00	(592.074.000)	65,17
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000,00	74.938.875,00	(61.125)	99,92
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	199.709.000,00	(291.000)	99,85
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00	199.709.000,00	(291.000)	99,85
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	119.000.000,00	119.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	119.000.000,00	119.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.171.629.196,00	25.589.584.924,00	(3.582.044.272)	87,72
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.317.935.940,00	19.224.270.124,00	(3.093.665.816)	86,14
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	6.601.298.256,00	6.112.919.800,00	(488.378.456)	92,60
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	252.395.000,00	252.395.000,00	0	100,00
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	590.980.602,00	459.332.703,00	(131.647.899)	77,72
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	590.980.602,00	459.332.703,00	(131.647.899)	77,72
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	19.807.617.882,00	14.280.927.033,00	(5.526.690.849)	72,10
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.894.279.570,00	8.128.228.426,00	(1.766.051.144)	82,15
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	670.000.000,00	625.264.319,00	(44.735.681)	93,32

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	548.840.000,00	125.739.700,00	(423.100.300)	22,91
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.413.848.400,00	1.326.484.582,00	(87.363.818)	93,82
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.546.929.000,00	3.798.871.758,00	(748.057.242)	83,55
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	38.900.000,00	25.000.000,00	(13.900.000)	64,27
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	360.160.000,00	307.854.468,00	(52.305.532)	85,48
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	68.250.000,00	67.737.665,00	(512.335)	99,25
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	474.859.840,00	394.303.690,00	(80.556.150)	83,04
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	78.126.900,00	45.101.100,00	(33.025.800)	57,73
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	773.096.800,00	673.205.307,00	(99.891.493)	87,08
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	57.750.000,00	31.901.000,00	(25.849.000)	55,24
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	40.488.030,00	3.000.000,00	(37.488.030)	7,41
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	49.500.000,00	49.500.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	773.530.600,00	654.264.837,00	(119.265.763)	84,58
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.846.738.312,00	6.114.551.107,00	(1.732.187.205)	77,92
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.846.738.312,00	6.114.551.107,00	(1.732.187.205)	77,92
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.066.600.000,00	38.147.500,00	(2.028.452.500)	1,85
5.1.02.03.04.0002.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	2.000.000.000,00	-	(2.000.000.000)	-
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	66.600.000,00	38.147.500,00	(28.452.500)	57,28
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	126.594.815.498,00	104.443.243.983,00	(22.151.571.515)	82,50
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.460.615.973,00	104.417.528.783,00	(22.043.087.190)	82,57
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.271.789.973,00	92.130.283.173,00	(20.141.506.800)	82,06
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.631.472.000,00	10.981.983.540,00	(1.649.488.460)	86,94

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.176.174.000,00	935.263.290,00	(240.910.710)	79,52
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	381.180.000,00	369.998.780,00	(11.181.220)	97,07
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	134.199.525,00	25.715.200,00	(108.484.325)	19,16
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	134.199.525,00	25.715.200,00	(108.484.325)	19,16
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.062.983.280,00	25.635.887.650,00	(10.427.095.630)	71,09
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.536.567.000,00	18.082.453.490,00	(6.454.113.510)	73,70
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.418.750.000,00	3.215.992.710,00	(202.757.290)	94,07
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	14.795.950.000,00	14.395.150.000,00	(400.800.000)	97,29
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	586.500.000,00	427.500.000,00	(159.000.000)	72,89
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.691.367.000,00	-	(5.691.367.000)	-
5.1.02.05.01.0011.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	44.000.000,00	43.810.780,00	(189.220)	99,57
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.526.416.280,00	7.553.434.160,00	(3.972.982.120)	65,53
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.526.416.280,00	7.553.434.160,00	(3.972.982.120)	65,53
5.1.02.89.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	283.155.918.659,00	266.063.842.200,00	(17.092.076.459)	93,96
5.1.02.89.01.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	283.155.918.659,00	266.063.842.200,00	(17.092.076.459)	93,96
5.1.02.89.01.0001.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	277.354.616.459,00	260.807.016.469,00	(16.547.599.990)	94,03
5.1.02.89.01.0002.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	5.801.302.200,00	5.256.825.731,00	(544.476.469)	90,61
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.203.127.019,00	132.194.133.308,11	(18.008.993.711)	88,01
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.203.127.019,00	132.194.133.308,11	(18.008.993.711)	88,01
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.203.127.019,00	132.194.133.308,11	(18.008.993.711)	88,01
5.1.03.	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	(736.775.749)	98,44
5.1.03.01.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	(736.775.749)	98,44
5.1.03.01.01.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	(736.775.749)	98,44
5.1.03.01.01.0001.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	(736.775.749)	98,44
5.1.05.	Belanja Hibah	188.681.115.540,00	186.634.548.226,00	(2.046.567.314)	98,92
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.530.871.540,00	15.652.030.450,00	(1.878.841.090)	89,28
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.430.000.000,00	6.905.000.000,00	(525.000.000)	92,93

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.430.000.000,00	6.905.000.000,00	(525.000.000)	92,93
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.775.871.540,00	8.422.030.450,00	(1.353.841.090)	86,15
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.775.871.540,00	8.422.030.450,00	(1.353.841.090)	86,15
5.1.05.05.06.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	325.000.000,00	325.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.06.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	325.000.000,00	325.000.000,00	0	100,00
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	164.674.899.000,00	164.507.172.776,00	(167.726.224)	99,90
5.1.05.06.03.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	160.958.549.000,00	160.790.822.776,00	(167.726.224)	99,90
5.1.05.06.03.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	160.958.549.000,00	160.790.822.776,00	(167.726.224)	99,90
5.1.05.06.04.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	3.716.350.000,00	3.716.350.000,00	0	100,00
5.1.05.06.04.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	3.716.350.000,00	3.716.350.000,00	0	100,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.475.345.000,00	6.475.345.000,00	0	100,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.475.345.000,00	6.475.345.000,00	0	100,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.475.345.000,00	6.475.345.000,00	0	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	13.654.484.000,00	10.332.950.000,00	(3.321.534.000)	75,67
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.786.000.000,00	1.681.000.000,00	(105.000.000)	94,12
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.786.000.000,00	1.681.000.000,00	(105.000.000)	94,12
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.786.000.000,00	1.681.000.000,00	(105.000.000)	94,12
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.987.500.000,00	2.049.500.000,00	(938.000.000)	68,60
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.987.500.000,00	2.049.500.000,00	(938.000.000)	68,60
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.987.500.000,00	2.049.500.000,00	(938.000.000)	68,60
5.1.06.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.880.984.000,00	6.602.450.000,00	(2.278.534.000)	74,34
5.1.06.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.880.984.000,00	6.602.450.000,00	(2.278.534.000)	74,34

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.06.04.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.880.984.000,00	6.602.450.000,00	(2.278.534.000)	74,34
5.2.	BELANJA MODAL	400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	(46.408.465.049)	88,42
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.365.280.187,00	125.810.216.574,46	(20.555.063.613)	85,96
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	14.430.000,00	14.319.000,00	(111.000)	99,23
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	14.430.000,00	14.319.000,00	(111.000)	99,23
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	14.430.000,00	14.319.000,00	(111.000)	99,23
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.818.913.000,00	2.635.300.000,00	(183.613.000)	93,49
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.818.913.000,00	2.635.300.000,00	(183.613.000)	93,49
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	878.913.000,00	697.300.000,00	(181.613.000)	79,34
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.940.000.000,00	1.938.000.000,00	(2.000.000)	99,90
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	129.556.859,00	105.819.950,00	(23.736.909)	81,68
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	90.991.785,00	68.196.500,00	(22.795.285)	74,95
5.2.02.03.01.0001.	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.263.400,00	3.219.000,00	(44.400)	98,64
5.2.02.03.01.0002.	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	8.131.860,00	7.770.000,00	(361.860)	95,55
5.2.02.03.01.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	79.596.525,00	57.207.500,00	(22.389.025)	71,87
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	38.565.074,00	37.623.450,00	(941.624)	97,56
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.500.000,00	1.443.000,00	(57.000)	96,20
5.2.02.03.02.0008.	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	37.065.074,00	36.180.450,00	(884.624)	97,61
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	173.213.800,00	93.667.500,00	(79.546.300)	54,08
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	173.213.800,00	93.667.500,00	(79.546.300)	54,08
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	66.086.500,00	-	(66.086.500)	-
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	15.871.650,00	5.867.500,00	(10.004.150)	36,97
5.2.02.04.01.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	3.455.650,00	-	(3.455.650)	-
5.2.02.04.01.0006.	Belanja Modal Alat Processing	87.800.000,00	87.800.000,00	0	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.839.853.961,00	7.909.379.595,00	(4.930.474.366)	61,60
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.621.120.818,00	2.505.942.057,00	(1.115.178.761)	69,20
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	891.511.435,00	687.811.665,00	(203.699.770)	77,15
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.476.266,00	11.469.999,00	(6.267)	99,95
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.718.133.117,00	1.806.660.393,00	(911.472.724)	66,47
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.204.893.167,00	4.803.298.446,00	(3.401.594.721)	58,54
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	4.580.029.487,00	3.350.181.126,00	(1.229.848.361)	73,15
5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	899.118,00	898.000,00	(1.118)	99,88

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	10.169.721,00	8.663.801,00	(1.505.920)	85,19
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	2.854.374.883,00	911.973.334,00	(1.942.401.549)	31,95
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	285.614.803,00	154.109.307,00	(131.505.496)	53,96
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	321.314.955,00	282.427.878,00	(38.887.077)	87,90
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	152.490.200,00	95.045.000,00	(57.445.200)	62,33
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.013.839.976,00	600.139.092,00	(413.700.884)	59,19
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	212.112.258,00	22.730.358,00	(189.381.900)	10,72
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	107.444.320,00	96.115.819,00	(11.328.501)	89,46
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	370.530.745,00	260.608.963,00	(109.921.782)	70,33
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	173.600.000,00	128.369.999,00	(45.230.001)	73,95
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	29.415.000,00	29.415.000,00	0	100,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	120.737.653,00	62.898.953,00	(57.838.700)	52,10
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.929.178.373,00	1.838.892.098,00	(1.090.286.275)	62,78
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	2.541.475.224,00	1.493.927.483,00	(1.047.547.741)	58,78
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.281.516.130,00	551.930.761,00	(729.585.369)	43,07
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	425.612.657,00	291.392.735,00	(134.219.922)	68,46
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	216.482.543,00	134.432.900,00	(82.049.643)	62,10
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	617.863.894,00	516.171.087,00	(101.692.807)	83,54
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	387.703.149,00	344.964.615,00	(42.738.534)	88,98
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	387.703.149,00	344.964.615,00	(42.738.534)	88,98
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.591.926.533,00	11.432.253.379,00	(1.159.673.154)	90,79
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.591.926.533,00	11.432.253.379,00	(1.159.673.154)	90,79
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.046.477.938,00	7.585.424.444,00	(461.053.494)	94,27
5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	350.482.000,00	279.022.000,00	(71.460.000)	79,61
5.2.02.07.01.0014.	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.036.500.000,00	1.027.760.000,00	(8.740.000)	99,16
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.158.466.595,00	2.540.046.935,00	(618.419.660)	80,42
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	61.970.590.922,00	53.449.827.480,00	(8.520.763.442)	86,25
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.320.876.463,00	3.178.905.606,00	(141.970.857)	95,72
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.991.379.115,00	2.888.734.355,00	(102.644.760)	96,57
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	329.497.348,00	290.171.251,00	(39.326.097)	88,06
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	58.646.684.983,00	50.268.146.874,00	(8.378.538.109)	85,71
5.2.02.08.03.0006.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	520.000.000,00	516.705.000,00	(3.295.000)	99,37
5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	14.226.684.983,00	9.061.843.967,00	(5.164.841.016)	63,70

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	43.900.000.000,00	40.689.597.907,00	(3.210.402.093)	92,69
5.2.02.08.09.	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	3.029.476,00	2.775.000,00	(254.476)	91,60
5.2.02.08.09.0004.	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	1.293.150,00	1.110.000,00	(183.150)	85,84
5.2.02.08.09.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.736.326,00	1.665.000,00	(71.326)	95,89
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	8.069.038.445,00	6.527.678.110,00	(1.541.360.335)	80,90
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	7.123.771.628,00	5.687.590.848,00	(1.436.180.780)	79,84
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	599.664.663,00	408.984.800,00	(190.679.863)	68,20
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	6.524.106.965,00	5.278.606.048,00	(1.245.500.917)	80,91
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	945.266.817,00	840.087.262,00	(105.179.555)	88,87
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.100.000,00	-	(17.100.000)	-
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	284.375.008,00	279.858.508,00	(4.516.500)	98,41
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	643.791.809,00	560.228.754,00	(83.563.055)	87,02
5.2.02.13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	914.850.000,00	584.973.000,00	(329.877.000)	63,94
5.2.02.13.01.	Belanja Modal Sumur	914.850.000,00	584.973.000,00	(329.877.000)	63,94
5.2.02.13.01.0002.	Belanja Modal Sumur Pemboran	914.850.000,00	584.973.000,00	(329.877.000)	63,94
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.700.003.280,00	49.839.000,00	(1.650.164.280)	2,93
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	50.003.280,00	49.839.000,00	(164.280)	99,67
5.2.02.15.03.0002.	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	50.003.280,00	49.839.000,00	(164.280)	99,67
5.2.02.15.04.	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	1.650.000.000,00	-	(1.650.000.000)	-
5.2.02.15.04.0004.	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	1.650.000.000,00	-	(1.650.000.000)	-
5.2.02.16.	Belanja Modal Alat Peraga	24.220.880,00	24.220.880,00	0	100,00
5.2.02.16.01.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	24.220.880,00	24.220.880,00	0	100,00
5.2.02.16.01.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	24.220.880,00	24.220.880,00	0	100,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	104.040.000,00	102.786.000,00	(1.254.000)	98,79
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	104.040.000,00	102.786.000,00	(1.254.000)	98,79
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	104.040.000,00	102.786.000,00	(1.254.000)	98,79
5.2.02.89.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	33.307.644.421,00	36.275.526.213,00	2.967.881.792	108,91
5.2.02.89.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	33.307.644.421,00	36.275.526.213,00	2.967.881.792	108,91
5.2.02.89.01.0001.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	32.704.703.221,00	35.722.092.267,00	3.017.389.046	109,23
5.2.02.89.01.0002.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	602.941.200,00	553.433.946,00	(49.507.254)	91,79
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.777.819.713,00	4.765.734.369,46	(4.012.085.344)	54,29

R

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.777.819.713,00	4.765.734.369,46	(4.012.085.344)	54,29
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.777.819.713,00	4.765.734.369,46	(4.012.085.344)	54,29
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	(24.588.365.747)	79,06
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	112.138.585.114,00	89.615.501.104,47	(22.523.084.010)	79,91
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.086.469.934,00	88.568.161.024,47	(22.518.308.910)	79,73
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.551.190.965,00	26.368.700.807,78	(5.182.490.157)	83,57
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.612.100.000,00	5.732.144.522,00	(1.879.955.478)	75,30
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	54.596.196.620,00	40.901.545.630,00	(13.694.650.990)	74,92
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	10.731.851.000,00	10.616.854.657,00	(114.996.343)	98,93
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.182.325.793,00	3.536.111.448,00	(1.646.214.345)	68,23
5.2.03.01.01.0034.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	1.330.001.960,00	1.330.001.959,69	0	100,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	82.803.596,00	82.802.000,00	(1.596)	100,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.052.115.180,00	1.047.340.080,00	(4.775.100)	99,55
5.2.03.01.02.0005.	Belanja Modal Asrama	852.170.580,00	848.025.580,00	(4.145.000)	99,51
5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.944.600,00	199.314.500,00	(630.100)	99,68
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.002.993.793,00	959.128.189,00	(43.865.604)	95,63
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.002.993.793,00	959.128.189,00	(43.865.604)	95,63
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	1.002.993.793,00	959.128.189,00	(43.865.604)	95,63
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.280.252.000,00	2.258.835.867,00	(2.021.416.133)	52,77
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.280.252.000,00	2.258.835.867,00	(2.021.416.133)	52,77
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.280.252.000,00	2.258.835.867,00	(2.021.416.133)	52,77
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	(13.978.726.947)	87,33
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	103.445.064.919,00	90.556.400.644,00	(12.888.664.275)	87,54
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	103.445.064.919,00	90.556.400.644,00	(12.888.664.275)	87,54
5.2.04.01.01.0002.	Belanja Modal Jalan Provinsi	100.684.064.919,00	89.679.355.725,00	(11.004.709.194)	89,07
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.761.000.000,00	877.044.919,00	(1.883.955.081)	31,77
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	4.578.288.439,00	3.584.583.714,00	(993.704.725)	78,30
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.081.252.350,00	183.204.300,00	(898.048.050)	16,94
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.081.252.350,00	183.204.300,00	(898.048.050)	16,94
5.2.04.02.05.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	440.000.000,00	399.925.000,00	(40.075.000)	90,89
5.2.04.02.05.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	440.000.000,00	399.925.000,00	(40.075.000)	90,89

AR

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.057.036.089,00	3.001.454.414,00	(55.581.675)	98,18
5.2.04.02.06.0001.	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	156.293.500,00	156.293.500,00	0	100,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.900.742.589,00	2.845.160.914,00	(55.581.675)	98,08
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	200.000.000,00	199.350.000,00	(650.000)	99,68
5.2.04.03.06.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	199.350.000,00	(650.000)	99,68
5.2.04.03.06.0003.	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	200.000.000,00	199.350.000,00	(650.000)	99,68
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	2.088.797.972,00	1.993.090.025,00	(95.707.947)	95,42
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172,00	1.899.273.700,00	(41.396.472)	97,87
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172,00	1.899.273.700,00	(41.396.472)	97,87
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	148.127.800,00	93.816.325,00	(54.311.475)	63,33
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	148.127.800,00	93.816.325,00	(54.311.475)	63,33
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.563.732.038,00	39.293.080.845,00	12.729.348.807	147,92
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	512.176.600,00	499.402.800,00	(12.773.800)	97,51
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	503.626.600,00	499.402.800,00	(4.223.800)	99,16
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	309.740.000,00	306.668.800,00	(3.071.200)	99,01
5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	193.886.600,00	192.734.000,00	(1.152.600)	99,41
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	8.550.000,00	-	(8.550.000)	-
5.2.05.01.02.0002.	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	8.550.000,00	-	(8.550.000)	-
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	31.635.000,00	31.375.050,00	(259.950)	99,18
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	31.635.000,00	31.375.050,00	(259.950)	99,18
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	31.635.000,00	31.375.050,00	(259.950)	99,18
5.2.05.03.	Belanja Modal Hewan	17.871.000,00	17.871.000,00	0	100,00
5.2.05.03.03.	Belanja Modal Hewan Lainnya	17.871.000,00	17.871.000,00	0	100,00
5.2.05.03.03.0001.	Belanja Modal Hewan Lainnya	17.871.000,00	17.871.000,00	0	100,00
5.2.05.89.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	25.781.941.438,00	38.559.660.345,00	12.777.718.907	149,56
5.2.05.89.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	25.781.941.438,00	38.559.660.345,00	12.777.718.907	149,56
5.2.05.89.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	25.312.934.838,00	38.088.642.585,00	12.775.707.747	150,47
5.2.05.89.01.0002.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	469.006.600,00	471.017.760,00	2.011.160	100,43
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	220.108.000,00	184.771.650,00	(35.336.350)	83,95
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	220.108.000,00	184.771.650,00	(35.336.350)	83,95
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	220.108.000,00	184.771.650,00	(35.336.350)	83,95
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	214.808.550,00	199.151.000,00	(15.657.550)	92,71

Handwritten signature/initials

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	214.808.550,00	199.151.000,00	(15.657.550)	92,71
5.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	214.808.550,00	199.151.000,00	(15.657.550)	92,71
5.2.06.01.01.0005.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	214.808.550,00	199.151.000,00	(15.657.550)	92,71
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975)	3,11
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975)	3,11
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975)	3,11
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975)	3,11
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975)	3,11
5.4.	BELANJA TRANSFER	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	(122.520.570.764)	82,29
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	(91.476.593.498)	86,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	(91.476.593.498)	86,00
5.4.01.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	584.729.440.255,00	507.025.624.124,00	(77.703.816.131)	86,71
5.4.01.01.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	584.729.440.255,00	507.025.624.124,00	(77.703.816.131)	86,71
5.4.01.01.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	68.522.866.605,00	54.750.089.238,00	(13.772.777.367)	79,90
5.4.01.01.02.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	68.522.866.605,00	54.750.089.238,00	(13.772.777.367)	79,90
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00	7.630.000.000,00	(31.043.977.266)	19,73
5.4.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0	100,00
5.4.02.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0	100,00
5.4.02.01.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0	100,00
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	100,00
5.4.02.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	100,00
5.4.02.02.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	100,00
5.4.02.03.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	35.173.977.266,00	4.130.000.000,00	(31.043.977.266)	11,74
5.4.02.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0	100,00
5.4.02.03.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0	100,00
5.4.02.03.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	32.423.977.266,00	1.380.000.000,00	(31.043.977.266)	4,26
5.4.02.03.02.0005.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.400.000.000,00	1.380.000.000,00	(3.020.000.000)	31,36
5.4.02.03.02.0010.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan	28.023.977.266,00	-	(28.023.977.266)	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(99.349.640.221,00)	258.477.014.964,51	357.826.655.186	260,17
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	99.349.640.221,00	103.536.786.357,37	4.187.146.136	104,21

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	(878.680)	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	(878.680)	100,00
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	157.445.890.734,00	-	(157.445.890.734)	-
6.1.01.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	157.445.890.734,00	-	(157.445.890.734)	-
6.1.01.01.01.0001.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	157.445.890.734,00	-	(157.445.890.734)	-
6.1.01.02.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	565.000,00	-	(565.000)	-
6.1.01.02.01.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	565.000,00	-	(565.000)	-
6.1.01.02.01.0336.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	565.000,00	-	(565.000)	-
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	104.638.045.418,00	262.083.622.473,33	157.445.577.055	250,47
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	66.276.963.059,00	262.083.622.473,33	195.806.659.414	395,44
6.1.01.05.01.0001.	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	19.589.883.000,00	-	(19.589.883.000)	-
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	25.328.883.567,00	242.857.276.695,46	217.528.393.128	958,82
6.1.01.05.01.0008.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.130.969.028,00	-	(2.130.969.028)	-
6.1.01.05.01.0036.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP	551.114.518,00	550.232.831,00	(881.687)	99,84
6.1.01.05.01.0037.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.676.112.946,00	18.676.112.946,87	1	100,00
6.1.01.05.02.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	38.361.082.359,00	-	(38.361.082.359)	-
6.1.01.05.02.0008.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.735.645.718,00	-	(4.735.645.718)	-
6.1.01.05.02.0021.	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	24.585.141.800,00	-	(24.585.141.800)	-
6.1.01.05.02.0025.	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	9.040.294.841,00	-	(9.040.294.841)	-
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	744.706.033,00	744.706.032,04	(1)	100,00
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	744.706.033,00	744.706.032,04	(1)	100,00
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	744.706.033,00	744.706.032,04	(1)	100,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	(4.188.024.816)	97,44
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	(4.188.024.816)	97,44
6.2.03.03.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	(4.188.024.816)	97,44
6.2.03.03.02.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	(4.188.024.816)	97,44
6.2.03.03.02.0001.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	(4.188.024.816)	97,44
	PEMBIAYAAN NETTO	99.349.640.221,00	103.536.786.357,37	4.187.146.136	104,21

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	362.013.801.321,88	362.013.801.322	-



Uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
(AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	2025	2024
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	262,829,210,192.37	121,211,058,206.94
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	262,829,382,505.37	121,170,302,806.94
3. Subtotal (1-2)	881,687.00	40,755,400.00
4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	362,013,801,321.88	262,829,210,192.37
5. Subtotal (3+4)	362,014,683,008.88	262,869,965,592.37
6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(881,687.00)	(40,755,400.00)
7. Lain-lain	0.00	00
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir	362,013,801,321.88	262,829,210,192.37

SIPKD Modul KPI System
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA
(AUDITED)
UNTUK KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2025	2024	
1	2	3	4
ASET	12.163.503.932.576,18	12.301.641.854.741,77	(138.137.922.165,59)
ASET LANCAR	636.146.785.012,76	739.877.232.414,14	(103.730.447.401,38)
Kas dan Setara Kas	365.249.887.239,96	263.265.280.880,37	101.984.606.359,59
Piutang Pajak Daerah	41.969.210.244,10	66.530.745.794,10	(24.561.535.550,00)
Piutang Retribusi Daerah	27.915.948.390,96	2.592.570.770,83	25.323.377.620,13
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	231.230.737,00	30.075.029.492,96	(29.843.798.755,96)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	32.078.241.000,00	-	32.078.241.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	289.166.681,00	-	289.166.681,00
Piutang Lainnya	269.875.013,00	269.875.013,00	-
Penyisihan Piutang	(14.293.308.467,70)	(11.164.871.764,55)	(3.128.436.703,15)
Beban Dibayar Dimuka	203.832.750,00	200.304.096.577,67	(200.100.263.827,67)
Persediaan	182.232.701.424,44	188.004.505.649,76	(5.771.804.225,32)
INVESTASI JANGKA PANJANG	842.477.948.718,33	846.667.485.865,25	(4.189.537.146,92)
Investasi Jangka Panjang Permanen	842.477.948.718,33	846.667.485.865,25	(4.189.537.146,92)
ASET TETAP	9.727.099.496.675,80	9.789.058.207.876,90	(61.958.711.201,10)
Tanah	2.754.526.089.333,51	2.767.006.705.333,51	(12.480.616.000,00)
Peralatan dan Mesin	2.238.896.404.585,10	2.169.023.298.506,37	69.873.106.078,73
Gedung dan Bangunan	3.670.681.791.406,23	3.469.315.810.754,68	201.365.980.651,55
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.142.982.830.207,28	7.048.196.309.841,20	94.786.520.366,08
Aset Tetap Lainnya	215.999.157.583,04	270.358.725.959,83	(54.359.568.376,79)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.733.545.130,70	144.240.219.937,84	7.493.325.192,86
Akumulasi Penyusutan	(6.447.720.321.570,06)	(6.079.082.862.456,53)	(368.637.459.113,53)
PROPERTI INVESTASI	573.542.557.977,46	547.734.873.892,00	25.807.684.085,46
Properti Investasi	573.542.557.977,46	547.734.873.892,00	25.807.684.085,46
DANA CADANGAN	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-
ASET LAINNYA	384.237.144.191,83	378.304.054.693,48	5.933.089.498,35
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	54.759.930.961,54	54.759.930.961,54	-
Aset Tidak Berwujud	21.165.023.173,00	15.331.522.173,00	5.833.501.000,00
Aset Lain-lain	324.832.599.083,29	324.135.243.335,80	697.355.747,49
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.286.376.365,17)	(14.714.720.558,11)	(571.655.807,06)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.234.032.660,83)	(1.207.921.218,75)	(26.111.442,08)
JUMLAH ASET	12.163.503.932.576,18	12.301.641.854.741,77	(138.137.922.165,59)
KEWAJIBAN	732.707.219.649,99	952.013.151.226,47	(219.305.931.576,48)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	258.283.976.165,99	318.298.365.594,47	(60.014.389.428,48)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.236.085.918,08	436.070.688,00	2.800.015.230,08
Utang Bunga	35.184.056.880,00	45.397.745.235,00	(10.213.688.355,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	159.291.542.148,00	159.291.542.148,00	-

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2025	2024	
1	2	3	4
Pendapatan Diterima Dimuka	3.212.826.838,42	5.161.956.414,87	(1.949.129.576,45)
Utang Belanja	49.267.340.381,49	108.011.051.108,60	(58.743.710.727,11)
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.092.124.000,00	-	8.092.124.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	(159.291.542.148,00)
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	(159.291.542.148,00)
JUMLAH KEWAJIBAN	732.707.219.649,99	952.013.151.226,47	(219.305.931.576,48)
EKUITAS	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
EKUITAS	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
Ekuitas	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
JUMLAH EKUITAS DANA	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.163.503.932.576,18	12.301.641.854.741,77	(138.137.922.165,59)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA
(AUDITED)
UNTUK KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2025	2024	
1	2	3	4
ASET	12.163.503.932.576,18	12.301.641.854.741,77	(138.137.922.165,59)
ASET LANCAR	636.146.785.012,76	739.877.232.414,14	(103.730.447.401,38)
Kas dan Setara Kas	365.249.887.239,96	263.265.280.880,37	101.984.606.359,59
Kas di Kas Daerah	342.184.390.452,08	242.843.136.999,24	99.341.253.452,84
Kas di Kas Daerah	342.184.390.452,08	242.843.136.999,24	99.341.253.452,84
Kas di Bendahara Pengeluaran	28.137.500,00	13.418.600,00	14.718.900,00
Kas di Bendahara Pengeluaran..	28.137.500,00	13.418.600,00	14.718.900,00
Kas di BLUD	18.989.287.257,79	19.420.818.978,91	(431.531.721,12)
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang	15.067.196.381,91	17.163.575.639,20	(2.096.379.257,29)
Kas di BLUD SPAM	737.371.013,04	744.706.032,04	(7.335.019,00)
Kas di BLUD RSKD JIWA NAIMATA	3.184.719.862,84	1.512.537.307,67	1.672.182.555,17
Kas Bendahara BOS	811.669.596,00	551.114.518,00	260.555.078,00
Kas Bendahara BOS	811.669.596,00	551.114.518,00	260.555.078,00
Kas Lainnya	3.236.402.434,09	436.791.784,22	2.799.610.649,87
Kas Lainnya	3.236.402.434,09	436.791.784,22	2.799.610.649,87
Piutang Pajak Daerah	41.969.210.244,10	66.530.745.794,10	(24.561.535.550,00)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	908.907.872,50	945.429.197,50	(36.521.325,00)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.	908.907.872,50	945.429.197,50	(36.521.325,00)
Piutang Pajak Air Permukaan	217.641.628,60	217.641.628,60	-
Piutang Pajak Air Permukaan	217.641.628,60	217.641.628,60	-
Piutang Pajak Rokok	40.842.660.743,00	65.367.674.968,00	(24.525.014.225,00)
Piutang Pajak Rokok	40.842.660.743,00	65.367.674.968,00	(24.525.014.225,00)
Piutang Retribusi Daerah	27.915.948.390,96	2.592.570.770,83	25.323.377.620,13
Piutang Retribusi Daerah	24.309.530.549,47	14.256.000,00	24.295.274.549,47
Piutang Retribusi Daerah	6.541.907.317,47	-	6.541.907.317,47
Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	17.228.578.093,00	-	17.228.578.093,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya Yang Sejenis	530.297.139,00	-	530.297.139,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.748.000,00	14.256.000,00	(5.508.000,00)
Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.606.417.841,49	2.578.314.770,83	1.028.103.070,66
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	3.558.425.441,49	2.533.514.770,83	1.024.910.670,66
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	11.192.400,00	-	11.192.400,00
Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	-	8.000.000,00	(8.000.000,00)
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	36.800.000,00	36.800.000,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	231.230.737,00	30.075.029.492,96	(29.843.798.755,96)
Piutang Hasil Penjualan BMD yang TidakDipisahkan	10.518.004,00	28.996.481.388,96	(28.985.963.384,96)
Piutang Pendapatan Pelayanan Kesehatan	10.518.004,00	23.571.107.978,00	(23.560.589.974,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah.	-	5.425.373.410,96	(5.425.373.410,96)
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	174.541.933,00	1.043.942.390,00	(869.400.457,00)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	174.541.933,00	1.043.942.390,00	(869.400.457,00)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	46.170.800,00	1.204.800,00	44.966.000,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	46.170.800,00	1.204.800,00	44.966.000,00
Piutang Pendapatan BLUD	-	33.400.914,00	(33.400.914,00)
Piutang Pendapatan BLUD ...	-	33.400.914,00	(33.400.914,00)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	32.078.241.000,00	-	32.078.241.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2025	2024	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	32.078.241.000,00	-	32.078.241.000,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	32.078.241.000,00	-	32.078.241.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	289.166.681,00	-	289.166.681,00
Piutang Transfer Antar Daerah	289.166.681,00	-	289.166.681,00
Piutang Lainnya	269.875.013,00	269.875.013,00	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	269.875.013,00	269.875.013,00	-
Bagian Lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat	46.875.013,00	46.875.013,00	-
Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	223.000.000,00	223.000.000,00	-
Penyisihan Piutang	(14.293.308.467,70)	(11.164.871.764,55)	(3.128.436.703,15)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(14.023.433.454,70)	(10.894.996.751,55)	(3.128.436.703,15)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.126.549.501,10)	(1.138.626.180,10)	12.076.679,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(12.721.670.220,20)	(2.340.228.521,46)	(10.381.441.698,74)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(175.213.733,40)	(7.416.142.049,99)	7.240.928.316,59
Penyisihan Piutang Lainnya	(269.875.013,00)	(269.875.013,00)	-
Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	(46.875.013,00)	(46.875.013,00)	-
Penyisihan Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)	(223.000.000,00)	-
Beban Dibayar Dimuka	203.832.750,00	200.304.096.577,67	(200.100.263.827,67)
Beban Dibayar Dimuka	203.832.750,00	200.304.096.577,67	(200.100.263.827,67)
Beban Dibayar Dimuka	-	200.132.699.911,00	(200.132.699.911,00)
Beban Sewa Dibayar Dimuka	203.832.750,00	171.396.666,67	32.436.083,33
Persediaan	182.232.701.424,44	188.004.505.649,76	(5.771.804.225,32)
Barang Pakai Habis	181.392.888.966,44	179.204.317.649,76	2.188.571.316,68
Bahan Kimia	582.290.857,00	638.416.150,00	(56.125.293,00)
Isi Tabung Gas	248.207.978,87	263.427.517,95	(15.219.539,08)
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	74.000,00	(74.000,00)
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	104.073.474,07	197.009.476,93	(92.936.002,86)
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00	-	12.900.000,00
Persediaan Bahan cetak	993.951.626,96	879.947.434,96	114.004.192,00
Persediaan Bahan Makanan Pasien	6.368.898,82	146.629.126,79	(140.260.227,97)
Persediaan Bahan/bibit tanaman	83.444.000,00	180.354.000,00	(96.910.000,00)
Persediaan Bibit ternak	485.400.000,00	738.800.000,00	(253.400.000,00)
Persediaan Barang Habis Pakai...	-	227.537.219,80	(227.537.219,80)
Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium	818.034.445,47	635.002.683,56	183.031.761,91
Persediaan Bahan Laboratorium	263.192.960,38	69.401.136,88	193.791.823,50
Persediaan Bahan Makanan Ternak	40.577.390,00	96.370.300,00	(55.792.910,00)
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	18.985.300,00	(18.985.300,00)
Suku Cadang Alat Laboratorium	3.224.550,00	729.500,00	2.495.050,00
Suku Cadang Lainnya	-	4.185.000,00	(4.185.000,00)
Alat Tulis Kantor	332.447.750,48	25.764.988,00	306.682.762,48
Kertas dan Cover	1.541.250,00	48.888.000,00	(47.346.750,00)
Benda Pos	1.734.000,00	-	1.734.000,00
Suvenir/Cendera Mata	85.846.290,00	127.441.320,00	(41.595.030,00)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	5.453.400,00	(5.453.400,00)
Obat-obatan Lainnya	11.299.714.541,02	13.316.917.607,56	(2.017.203.066,54)
Persediaan Bahan Habis Pakai Reagensia	1.627.307.691,22	997.493.518,01	629.814.173,21
Persediaan Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan	539.459.210,68	497.321.865,75	42.137.344,93
Persediaan Bahan obat-obatan	107.645.485.756,22	121.456.021.856,63	(13.810.536.100,41)
Persediaan Bahan Linen	6.062.492,16	147.449.741,94	(141.387.249,78)
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	974.619.742,00	256.092.150,00	718.527.592,00
Persediaan Barang yang Diserahkan Ke Pihak Ketiga	55.237.004.061,09	38.228.604.355,00	17.008.399.706,09
Persediaan Barang Lainnya..	839.812.458,00	8.800.188.000,00	(7.960.375.542,00)
Persediaan Belanja Bansos Barang yg akan diserahkan	839.812.458,00	8.800.188.000,00	(7.960.375.542,00)
INVESTASI JANGKA PANJANG	842.477.948.718,33	846.667.485.865,25	(4.189.537.146,92)
Investasi Jangka Panjang Permanen	842.477.948.718,33	846.667.485.865,25	(4.189.537.146,92)
Penyertaan Modal	842.477.948.718,33	846.667.485.865,25	(4.189.537.146,92)
Penyertaan Modal Kepada Bank NTT	667.958.728.393,92	670.526.651.262,53	(2.567.922.868,61)
Penyertaan Modal Kepada PT. Flobamor	-	-	-

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2025	2024	
Penyertaan Modal Kepada PT. JAMKRIDA	161.072.395.896,41	161.041.541.630,72	30.854.265,69
Penyertaan Modal Kepada PT. ASKRIDA	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-
Penyertaan Modal Kepada KI Bolok	11.846.824.428,00	13.499.292.972,00	(1.652.468.544,00)
ASET TETAP	9.727.099.496.675,80	9.789.058.207.876,90	(61.958.711.201,10)
Tanah	2.754.526.089.333,51	2.767.006.705.333,51	(12.480.616.000,00)
Tanah	2.754.526.089.333,51	2.767.006.705.333,51	(12.480.616.000,00)
Tanah.	2.754.526.089.333,51	2.767.006.705.333,51	(12.480.616.000,00)
Peralatan dan Mesin	2.238.896.404.585,10	2.169.023.298.506,37	69.873.106.078,73
Peralatan dan Mesin	2.238.896.404.585,10	2.169.023.298.506,37	69.873.106.078,73
Peralatan dan Mesin.	2.238.896.404.585,10	2.169.023.298.506,37	69.873.106.078,73
Gedung dan Bangunan	3.670.681.791.406,23	3.469.315.810.754,68	201.365.980.651,55
Gedung dan Bangunan	3.670.681.791.406,23	3.469.315.810.754,68	201.365.980.651,55
Gedung dan Bangunan.	3.670.681.791.406,23	3.469.315.810.754,68	201.365.980.651,55
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.142.982.830.207,28	7.048.196.309.841,20	94.786.520.366,08
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.142.982.830.207,28	7.048.196.309.841,20	94.786.520.366,08
Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	7.142.982.830.207,28	7.048.196.309.841,20	94.786.520.366,08
Aset Tetap Lainnya	215.999.157.583,04	270.358.725.959,83	(54.359.568.376,79)
Aset Tetap Lainnya	215.999.157.583,04	270.358.725.959,83	(54.359.568.376,79)
Aset Tetap Lainnya.	215.999.157.583,04	270.358.725.959,83	(54.359.568.376,79)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.733.545.130,70	144.240.219.937,84	7.493.325.192,86
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.733.545.130,70	144.240.219.937,84	7.493.325.192,86
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.733.545.130,70	144.240.219.937,84	7.493.325.192,86
Akumulasi Penyusutan	(6.447.720.321.570,06)	(6.079.082.862.456,53)	(368.637.459.113,53)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.937.936.619.706,57)	(1.748.306.294.963,82)	(189.630.324.742,75)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(1.937.936.619.706,57)	(1.748.306.294.963,82)	(189.630.324.742,75)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(849.786.317.575,53)	(745.844.136.512,61)	(103.942.181.062,92)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(849.786.317.575,53)	(745.844.136.512,61)	(103.942.181.062,92)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.659.997.384.287,96)	(3.584.780.030.980,10)	(75.217.353.307,86)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi..	(3.659.997.384.287,96)	(3.584.780.030.980,10)	(75.217.353.307,86)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	(152.400.000,00)	152.400.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya..	-	(152.400.000,00)	152.400.000,00
PROPERTI INVESTASI	573.542.557.977,46	547.734.873.892,00	25.807.684.085,46
Properti Investasi	573.542.557.977,46	547.734.873.892,00	25.807.684.085,46
Properti Investasi	573.542.557.977,46	547.734.873.892,00	25.807.684.085,46
Properti Investasi	578.243.775.630,00	549.835.910.982,00	28.407.864.648,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(4.701.217.652,54)	(2.101.037.090,00)	(2.600.180.562,54)
DANA CADANGAN	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-
Dana Cadangan ...	-	-	-
ASET LAINNYA	384.237.144.191,83	378.304.054.693,48	5.933.089.498,35
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	54.759.930.961,54	54.759.930.961,54	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	54.759.930.961,54	54.759.930.961,54	-
Kerjasama Pemanfaatan.	26.608.580.961,54	26.608.580.961,54	-
Bangun Guna Serah.	28.151.350.000,00	28.151.350.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	21.165.023.173,00	15.331.522.173,00	5.833.501.000,00
Aset Tidak Berwujud	21.165.023.173,00	15.331.522.173,00	5.833.501.000,00
Aset Tidak Berwujud..	21.165.023.173,00	15.331.522.173,00	5.833.501.000,00
Aset Lain-lain	324.832.599.083,29	324.135.243.335,80	697.355.747,49
Aset Lain-lain	324.832.599.083,29	324.135.243.335,80	697.355.747,49
Aset Lainnya-Aset Lain Lain -Lain Lainnya	255.250.736.176,16	254.511.663.572,27	739.072.603,89
Aset Lain Rusak Berat	131.645.793.755,11	129.298.050.073,23	2.347.743.681,88
Aset Lain Lain yang di alihkan dari Aset Lancar	220.222.368,00	226.222.368,00	(6.000.000,00)
Aset Lainnya yang Tidak Digunakan PemprovNTT	600.776.000,00	600.776.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(87.269.076.165,98)	(85.460.615.627,70)	(1.808.460.538,28)

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2025	2024	
Aset Untuk di Hapus	3.748.172.950,00	3.748.172.950,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Untuk di Hapus	(21.171.150,00)	(21.171.150,00)	-
Aset Untuk diserahkan	20.657.145.150,00	21.232.145.150,00	(575.000.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.286.376.365,17)	(14.714.720.558,11)	(571.655.807,06)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.286.376.365,17)	(14.714.720.558,11)	(571.655.807,06)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud..	(15.286.376.365,17)	(14.714.720.558,11)	(571.655.807,06)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.234.032.660,83)	(1.207.921.218,75)	(26.111.442,08)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.234.032.660,83)	(1.207.921.218,75)	(26.111.442,08)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(1.234.032.660,83)	(1.207.921.218,75)	(26.111.442,08)
JUMLAH ASET	12.163.503.932.576,18	12.301.641.854.741,77	(138.137.922.165,59)
KEWAJIBAN	732.707.219.649,99	952.013.151.226,47	(219.305.931.576,48)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	258.283.976.165,99	318.298.365.594,47	(60.014.389.428,48)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.236.085.918,08	436.070.688,00	2.800.015.230,08
Utang PPh Pusat	717.554.333,88	84.173.153,00	633.381.180,88
Utang PPh 21	304.138.439,70	33.851.682,00	270.286.757,70
Utang PPh 22	290.462.121,18	2.325.703,00	288.136.418,18
Utang PPh 23	120.858.273,00	47.995.768,00	72.862.505,00
Utang PPh Pasal 4 (2)	2.095.500,00	-	2.095.500,00
Utang PPN Pusat	2.476.957.584,20	310.323.535,00	2.166.634.049,20
Utang PPN Pusat	2.476.957.584,20	310.323.535,00	2.166.634.049,20
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	41.574.000,00	41.574.000,00	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	41.574.000,00	41.574.000,00	-
Utang Bunga	35.184.056.880,00	45.397.745.235,00	(10.213.688.355,00)
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.184.056.880,00	45.397.745.235,00	(10.213.688.355,00)
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Pendek	35.184.056.880,00	45.397.745.235,00	(10.213.688.355,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	159.291.542.148,00	159.291.542.148,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga	159.291.542.148,00	159.291.542.148,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah	159.291.542.148,00	159.291.542.148,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	3.212.826.838,42	5.161.956.414,87	(1.949.129.576,45)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.212.826.838,42	5.161.956.414,87	(1.949.129.576,45)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	3.212.826.838,42	1.082.546.363,28	2.130.280.475,14
Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka		4.079.410.051,59	(4.079.410.051,59)
Utang Belanja	49.267.340.381,49	108.011.051.108,60	(58.743.710.727,11)
Utang Belanja Pegawai	2.082.724.417,00	3.161.311.183,00	(1.078.586.766,00)
Utang Belanja Pegawai...	2.082.724.417,00	3.161.311.183,00	(1.078.586.766,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa	24.697.352.845,14	24.135.411.473,63	561.941.371,51
Utang Belanja Barang dan Jasa....	1.091.181.606,00	335.896.254,00	755.285.352,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.606.171.239,14	23.799.515.219,63	(193.343.980,49)
Utang Belanja Hibah	6.003.134,04	6.563.114,00	(559.979,96)
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga	6.003.134,04	6.563.114,00	(559.979,96)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.232.495,00	42.976.800,00	75.255.695,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin..	118.232.495,00	42.976.800,00	75.255.695,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	474.935.826,65	972.580.307,53	(497.644.480,88)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan....	474.935.826,65	972.580.307,53	(497.644.480,88)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.444.639.609,66	464.628.650,00	1.980.010.959,66
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi..	2.444.639.609,66	464.628.650,00	1.980.010.959,66
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	-	69.409.985,44	(69.409.985,44)
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya..	-	69.409.985,44	(69.409.985,44)
Utang Belanja Bagi Hasil	19.443.452.054,00	79.158.169.595,00	(59.714.717.541,00)
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten....	16.493.755.638,00	67.684.145.115,00	(51.190.389.477,00)
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.....	2.949.696.416,00	11.474.024.480,00	(8.524.328.064,00)

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2025	2024	
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.092.124.000,00	-	8.092.124.000,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Kepada Pemerintah Kabupaten....	8.092.124.000,00	-	8.092.124.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	(159.291.542.148,00)
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	(159.291.542.148,00)
Utang kepada LKBB-BUMN	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	(159.291.542.148,00)
Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang.	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	(159.291.542.148,00)
JUMLAH KEWAJIBAN	732.707.219.649,99	952.013.151.226,47	(219.305.931.576,48)
EKUITAS	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
EKUITAS	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
Ekuitas	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
Ekuitas	11.349.628.703.515,30	11.349.628.703.515,30	-
Ekuitas	11.349.628.703.515,30	11.349.628.703.515,30	-
Surplus/Defisit-LO	(23.831.998.333,00)	-	(23.831.998.333,00)
Surplus/Defisit-LO	(23.831.998.333,00)	-	(23.831.998.333,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	105.000.007.743,89	-	105.000.007.743,89
Dampak Perubahan Atas Kas	(881.687,00)	-	(881.687,00)
Dampak Perubahan Atas Piutang	32.572.932.943,38	-	32.572.932.943,38
Dampak Perubahan Atas Penyisihan	843.451.729,90	-	843.451.729,90
Dampak Perubahan Nilai Persediaan	1.330.934.629,00	-	1.330.934.629,00
Dampak Perubahan Atas Investasi	(2.941.362.155,48)	-	(2.941.362.155,48)
Dampak Perubahan Aset Tetap	(145.936.321.275,02)	-	(145.936.321.275,02)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	228.108.213.890,22	-	228.108.213.890,22
Dampak Perubahan Atas Aset Lain	(1.117.720.000,00)	-	(1.117.720.000,00)
Dampak Perubahan Atas Utang	(7.859.240.331,11)	-	(7.859.240.331,11)
JUMLAH EKUITAS DANA	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30	81.168.009.410,89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.163.503.932.576,18	12.301.641.854.741,77	(138.137.922.165,59)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
(AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.182.904.163.211,22	1.221.466.833.492,55	(38.562.670.281,33)	(3,16)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	175.982.535.473,43	26.764.781.761,73	149.217.753.711,70	557,52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	46.631.855.962,56	59.741.829.496,25	(13.109.973.533,69)	(21,94)
Lain-lain PAD yang Sah - LO	38.546.756.071,94	169.582.792.121,93	(131.036.036.049,99)	(77,27)
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.444.065.310.719,15	1.477.556.236.872,46	(33.490.926.163,31)	(2,27)
PENDAPATAN TRANSFER - LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
Dana Perimbangan - LO				
Dana Bagi Hasil - LO	51.948.229.650,00	51.862.143.770,00	86.085.880,00	0,17
Dana Alokasi Umum - LO	1.990.566.496.640,00	1.976.058.968.384,00	14.507.528.256,00	0,73
Dana Alokasi Khusus - LO	1.004.250.221.957,00	1.331.571.219.542,00	(327.320.997.585,00)	(24,58)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO	3.046.764.948.247,00	3.359.492.331.696,00	(312.727.383.449,00)	(9,31)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO				
Dana Insentif Daerah - LO	6.700.771.000,00	11.346.961.000,00	(4.646.190.000,00)	(40,95)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	6.700.771.000,00	11.346.961.000,00	(4.646.190.000,00)	(40,95)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	3.053.465.719.247,00	3.370.839.292.696,00	(317.373.573.449,00)	(9,42)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah - LO	258.104.483.574,42	146.175.206.275,70	111.929.277.298,72	76,57
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	2.274.414.157,00		2.274.414.157,00	-
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	260.378.897.731,42	146.175.206.275,70	114.203.691.455,72	78,13
JUMLAH PENDAPATAN	4.757.909.927.697,57	4.994.570.735.844,16	(236.660.808.146,59)	(4,74)
BEBAN				
Beban Pegawai	1.990.936.214.248,20	1.658.803.890.345,00	332.132.323.903,20	20,02
Beban Persediaan	501.047.958.564,57	725.923.131.992,86	(224.875.173.428,29)	(30,98)
Beban Jasa	751.120.905.161,48	597.506.754.857,75	153.614.150.303,73	25,71
Beban Pemeliharaan	25.037.641.083,56	21.464.897.160,44	3.572.743.923,12	16,64
Beban Perjalanan Dinas	133.507.654.995,00	142.259.038.890,00	(8.751.383.895,00)	(6,15)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	25.704.287.650,00	8.991.919.620,00	16.712.368.030,00	185,86
Beban Bunga	36.454.659.018,00	46.969.421.418,00	(10.514.762.400,00)	(22,39)
Beban Hibah	185.365.911.861,00	335.314.631.454,00	(149.948.719.593,00)	(44,72)
Beban Bantuan Sosial	10.332.950.000,00	20.866.608.000,00	(10.533.658.000,00)	(50,48)
Beban Penyisihan Piutang	3.971.888.433,05	2.068.126.349,23	1.903.762.083,82	92,05
Beban Penyusutan dan Amortisasi	606.083.061.907,60	656.689.569.203,33	(50.606.507.295,73)	(7,71)
Beban Transfer	501.771.829.140,00	598.620.736.826,00	(96.848.907.686,00)	(16,18)
Beban Bantuan Keuangan	7.630.000.000,00	6.306.245.545,00	1.323.754.455,00	20,99
Beban Lain-lain	-	1.106.440.563,24	(1.106.440.563,24)	(100,00)
JUMLAH BEBAN	4.778.964.962.062,46	4.822.891.412.224,85	(43.926.450.162,39)	(0,91)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(21.055.034.364,89)	171.679.323.619,31	(192.734.357.984,20)	(112,26)

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO			-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-		-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	(434.151.848,11)	(690.157.348,00)	256.005.499,89	(37,09)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.658.870.904,00)	(1.008.085.380,32)	(650.785.523,68)	64,56
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.093.022.752,11)	(1.698.242.728,32)	(394.780.023,79)	23,25
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23.148.057.117,00)	169.981.080.890,99	(193.129.138.007,99)	(113,62)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	(683.941.216,00)	-	(683.941.216,00)	-
POS LUAR BIASA	(683.941.216,00)	-	(683.941.216,00)	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(23.831.998.333,00)	169.981.080.890,99	(193.813.079.223,99)	(114,02)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL
(AUDITED)

KEADAAN 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam rupiah)

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN DAERAH - LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
Pajak Daerah - LO	1,182,904,163,211.22	1,182,904,163,211.22	100.00
Retribusi Daerah - LO	175,982,535,473.43	175,982,535,473.43	100.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	46,631,855,962.56	46,631,855,962.56	100.00
Lain-lain PAD yang Sah - LO	38,546,756,071.94	38,546,756,071.94	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1,444,065,310,719.15	1,444,065,310,719.15	100.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3,053,465,719,247.00	3,053,465,719,247.00	100.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN TRANSFER - LO	3,053,465,719,247.00	3,053,465,719,247.00	100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
Pendapatan Hibah - LO	258,104,483,574.42	258,104,483,574.42	100.00
Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	2,274,414,157.00	2,274,414,157.00	100.00
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	260,378,897,731.42	260,378,897,731.42	100.00
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Non Operasional - LO			
Pendapatan Non Operasional - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Non Operasional - LO	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	4,757,909,927,697.57	4,757,909,927,697.57	100.00
Beban Daerah- LO			
Beban OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	1,990,936,214,248.20	1,990,936,214,248.20	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	1,436,418,447,454.61	1,436,418,447,454.61	100.00
Beban Bunga - LO	36,454,659,018.00	36,454,659,018.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Subsidi - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah - LO	185,365,911,861.00	185,365,911,861.00	100.00
Beban Bantuan Sosial - LO	10,332,950,000.00	10,332,950,000.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang - LO	3,971,888,433.05	3,971,888,433.05	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	173,235,526,553.11	173,235,526,553.11	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	72,215,164,049.58	72,215,164,049.58	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	359,024,329,426.14	359,024,329,426.14	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	26,111,442.08	26,111,442.08	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	997,915,807.06	997,915,807.06	100.00
Beban Penyusutan Properti Investasi - LO	584,014,629.63	584,014,629.63	100.00
Beban TIDAK TERDUGA - LO			
Beban Tidak Terduga - LO	683,941,216.00	683,941,216.00	100.00
Beban TRANSFER - LO			
Beban Bagi Hasil - LO	501,771,829,140.00	501,771,829,140.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan - LO	7,630,000,000.00	7,630,000,000.00	100.00
BEBAN LAIN LAIN - LO			
Beban Lain-Lain - LO	0.00	0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar- LO	434,151,848.11	434,151,848.11	100.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1,658,870,904.00	1,658,870,904.00	100.00
JUMLAH BEBAN	4,781,741,926,030.57	4,781,741,926,030.57	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(23,831,998,333.00)	(23,831,998,333.00)	100.00

SIPKD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

(AUDITED)

KEADAAN 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam rupiah)

URAIAN	2025	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN DAERAH - LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
Pajak Daerah - LO	1,182,904,163,211.22	1,182,904,163,211.22	100.00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	216,328,208,951.00	216,328,208,951.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan - LO	706,216,543.00	706,216,543.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi - LO	690,693,655.00	690,693,655.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah - LO	15,522,888.00	15,522,888.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep - LO	10,357,232,111.00	10,357,232,111.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi - LO	9,838,690,811.00	9,838,690,811.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah - LO	518,541,300.00	518,541,300.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus - LO	69,958,178,042.00	69,958,178,042.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi - LO	67,301,006,551.00	67,301,006,551.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum - LO	694,395,163.00	694,395,163.00	100.00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah - LO	1,962,776,328.00	1,962,776,328.00	100.00
PKB-Mobil Bus-Microbus - LO	977,861,377.00	977,861,377.00	100.00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi - LO	452,067,486.00	452,067,486.00	100.00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum - LO	325,398,441.00	325,398,441.00	100.00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah - LO	200,395,450.00	200,395,450.00	100.00
PKB-Mobil Bus-Bus - LO	9,682,613.00	9,682,613.00	100.00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi - LO	4,340,515.00	4,340,515.00	100.00
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum - LO	5,342,098.00	5,342,098.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up - LO	35,831,781,324.00	35,831,781,324.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi - LO	33,503,718,740.00	33,503,718,740.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum - LO	132,707,376.00	132,707,376.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah - LO	2,195,355,208.00	2,195,355,208.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck - LO	32,659,591,953.00	32,659,591,953.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi - LO	31,434,424,657.00	31,434,424,657.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum - LO	580,727,398.00	580,727,398.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah - LO	644,439,898.00	644,439,898.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck - LO	6,396,960,123.00	6,396,960,123.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi - LO	6,087,609,104.00	6,087,609,104.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum - LO	265,629,572.00	265,629,572.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah - LO	43,721,447.00	43,721,447.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van - LO	287,490,237.00	287,490,237.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi - LO	284,786,337.00	284,786,337.00	100.00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah - LO	2,703,900.00	2,703,900.00	100.00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua - LO	59,084,693,977.00	59,084,693,977.00	100.00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi - LO	57,996,044,513.00	57,996,044,513.00	100.00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah - LO	1,088,649,464.00	1,088,649,464.00	100.00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga - LO	57,903,577.00	57,903,577.00	100.00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi - LO	38,213,013.00	38,213,013.00	100.00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah - LO	19,690,564.00	19,690,564.00	100.00
PKB-Mobil Roda Tiga - LO	617,074.00	617,074.00	100.00
PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi - LO	617,074.00	617,074.00	100.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	113,281,556,482.00	113,281,556,482.00	100.00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan - LO	45,137,682.00	45,137,682.00	100.00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan - LO	45,137,682.00	45,137,682.00	100.00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep - LO	2,781,812,888.00	2,781,812,888.00	100.00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep - LO	2,781,812,888.00	2,781,812,888.00	100.00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus - LO	20,051,059,988.00	20,051,059,988.00	100.00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus - LO	20,051,059,988.00	20,051,059,988.00	100.00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus - LO	923,975,280.00	923,975,280.00	100.00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus - LO	923,975,280.00	923,975,280.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up - LO	16,275,764,520.00	16,275,764,520.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up - LO	16,275,764,520.00	16,275,764,520.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck - LO	2,490,205,980.00	2,490,205,980.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck - LO	2,490,205,980.00	2,490,205,980.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck - LO	438,694,800.00	438,694,800.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck - LO	438,694,800.00	438,694,800.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van - LO	322,226,400.00	322,226,400.00	100.00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van - LO	322,226,400.00	322,226,400.00	100.00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua - LO	69,764,046,336.00	69,764,046,336.00	100.00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua - LO	69,764,046,336.00	69,764,046,336.00	100.00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga - LO	188,632,608.00	188,632,608.00	100.00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga - LO	188,632,608.00	188,632,608.00	100.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	252,209,371,929.00	252,209,371,929.00	100.00
PBBKB-Bahan Bakar Bensin - LO	251,017,035,419.00	251,017,035,419.00	100.00
PBBKB-Bahan Bakar Bensin - LO	251,017,035,419.00	251,017,035,419.00	100.00
PBBKB-Bahan Bakar Solar - LO	1,192,336,510.00	1,192,336,510.00	100.00
PBBKB-Bahan Bakar Solar - LO	1,192,336,510.00	1,192,336,510.00	100.00
Pajak Air Permukaan - LO	460,543,039.71	460,543,039.71	100.00
Pajak Air Permukaan - LO	460,543,039.71	460,543,039.71	100.00
Pajak Air Permukaan - LO	460,543,039.71	460,543,039.71	100.00
Pajak Rokok - LO	595,081,882,859.00	595,081,882,859.00	100.00
Pajak Rokok - LO	595,081,882,859.00	595,081,882,859.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Pajak Rokok - LO	595,081,882,859.00	595,081,882,859.00	100.00
Pajak Alat Berat - LO	64,129,771.00	64,129,771.00	100.00
Pajak Alat Berat - LO	64,129,771.00	64,129,771.00	100.00
Pajak Alat Berat - LO	64,129,771.00	64,129,771.00	100.00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LO	5,478,470,179.51	5,478,470,179.51	100.00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LO	5,478,470,179.51	5,478,470,179.51	100.00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LO	5,478,470,179.51	5,478,470,179.51	100.00
Retribusi Daerah - LO	175,982,535,473.43	175,982,535,473.43	100.00
Retribusi Jasa Umum - LO	133,342,926,760.17	133,342,926,760.17	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	133,341,638,360.17	133,341,638,360.17	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - LO	121,805,754,720.00	121,805,754,720.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - LO	11,535,883,640.17	11,535,883,640.17	100.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1,288,400.00	1,288,400.00	100.00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1,288,400.00	1,288,400.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha - LO	42,639,608,713.26	42,639,608,713.26	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,713,022,492.76	1,713,022,492.76	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	1,692,942,492.76	1,692,942,492.76	100.00
Retribusi Pemakaian Alat - LO	20,080,000.00	20,080,000.00	100.00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila - LO	4,260,890,000.00	4,260,890,000.00	100.00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila - LO	4,260,890,000.00	4,260,890,000.00	100.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	90,568,000.00	90,568,000.00	100.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	90,568,000.00	90,568,000.00	100.00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	1,931,148,914.34	1,931,148,914.34	100.00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	1,931,148,914.34	1,931,148,914.34	100.00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan - LO	1,744,363,000.00	1,744,363,000.00	100.00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan - LO	1,744,363,000.00	1,744,363,000.00	100.00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan - LO	1,054,118,344.50	1,054,118,344.50	100.00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan - LO	1,054,118,344.50	1,054,118,344.50	100.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	2,678,027,500.00	2,678,027,500.00	100.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	2,678,027,500.00	2,678,027,500.00	100.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah - LO	5,545,908,255.50	5,545,908,255.50	100.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah - LO	5,545,908,255.50	5,545,908,255.50	100.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	23,621,562,206.16	23,621,562,206.16	100.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	23,621,562,206.16	23,621,562,206.16	100.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	46,631,855,962.56	46,631,855,962.56	100.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	46,631,855,962.56	46,631,855,962.56	100.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	46,631,855,962.56	46,631,855,962.56	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	46,631,855,962.56	46,631,855,962.56	100.00
Lain-lain PAD yang Sah - LO	38,546,756,071.94	38,546,756,071.94	100.00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	141,597,853.00	141,597,853.00	100.00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	141,597,853.00	141,597,853.00	100.00
Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment - LO	141,597,853.00	141,597,853.00	100.00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	946,553,094.00	946,553,094.00	100.00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD - LO	946,553,094.00	946,553,094.00	100.00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD - LO	946,553,094.00	946,553,094.00	100.00
Hasil Kerja Sama Daerah - LO	9,118,711,800.00	9,118,711,800.00	100.00
Hasil Kerja Sama Daerah - LO	9,118,711,800.00	9,118,711,800.00	100.00
Hasil Kerja Sama Daerah - LO	9,118,711,800.00	9,118,711,800.00	100.00
Jasa Giro - LO	4,251,600,845.51	4,251,600,845.51	100.00
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	4,251,600,845.51	4,251,600,845.51	100.00
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	4,251,600,845.51	4,251,600,845.51	100.00
Pendapatan Bunga - LO	7,339,400,736.69	7,339,400,736.69	100.00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	7,339,400,736.69	7,339,400,736.69	100.00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	7,339,400,736.69	7,339,400,736.69	100.00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	1,530,848,950.87	1,530,848,950.87	100.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	1,530,848,950.87	1,530,848,950.87	100.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	1,530,848,950.87	1,530,848,950.87	100.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1,022,938,911.00	1,022,938,911.00	100.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1,022,938,911.00	1,022,938,911.00	100.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1,022,938,911.00	1,022,938,911.00	100.00
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	9,702,717,348.55	9,702,717,348.55	100.00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	9,559,998,652.00	9,559,998,652.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum - LO	24,905,129.00	24,905,129.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum - LO	365,366,856.00	365,366,856.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum - LO	2,505,551,868.00	2,505,551,868.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum - LO	39,310,356.00	39,310,356.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum - LO	195,360.00	195,360.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum - LO	1,649,564,162.00	1,649,564,162.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum - LO	1,417,286,102.00	1,417,286,102.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum - LO	210,969,657.00	210,969,657.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum - LO	6,727,640.00	6,727,640.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum - LO	3,337,565,466.00	3,337,565,466.00	100.00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum - LO	2,556,056.00	2,556,056.00	100.00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	125,761,476.00	125,761,476.00	100.00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep - LO	7,649,505.00	7,649,505.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus - LO	26,589,163.00	26,589,163.00	100.00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus - LO	3,776,652.00	3,776,652.00	100.00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up - LO	15,587,338.00	15,587,338.00	100.00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck - LO	10,038,582.00	10,038,582.00	100.00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck - LO	544,428.00	544,428.00	100.00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua - LO	61,557,805.00	61,557,805.00	100.00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga - LO	18,003.00	18,003.00	100.00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO	7,097,188.55	7,097,188.55	100.00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO	7,097,188.55	7,097,188.55	100.00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LO	9,860,032.00	9,860,032.00	100.00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LO	9,860,032.00	9,860,032.00	100.00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	111,636,079.12	111,636,079.12	100.00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO	111,636,079.12	111,636,079.12	100.00
Pendapatan Denda Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	15,280,000.00	15,280,000.00	100.00
Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	1,045,000.00	1,045,000.00	100.00
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah - LO	95,103,079.12	95,103,079.12	100.00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah - LO	208,000.00	208,000.00	100.00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	2,535,736,625.72	2,535,736,625.72	100.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	2,293,797,285.72	2,293,797,285.72	100.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa - LO	2,293,797,285.72	2,293,797,285.72	100.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO	241,939,340.00	241,939,340.00	100.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS - LO	241,939,340.00	241,939,340.00	100.00
Pendapatan BLUD - LO	1,845,013,827.48	1,845,013,827.48	100.00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	1,539,943,164.00	1,539,943,164.00	100.00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	1,539,943,164.00	1,539,943,164.00	100.00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO	305,070,663.48	305,070,663.48	100.00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro - LO	305,070,663.48	305,070,663.48	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1,444,065,310,719.15	1,444,065,310,719.15	100.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3,053,465,719,247.00	3,053,465,719,247.00	100.00
Dana Perimbangan - LO	3,046,764,948,247.00	3,046,764,948,247.00	100.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	51,948,229,650.00	51,948,229,650.00	100.00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LO	3,975,721,550.00	3,975,721,550.00	100.00
DBH PPh Pasal 21 - LO	44,130,004,500.00	44,130,004,500.00	100.00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - LO	2,149,441,000.00	2,149,441,000.00	100.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi - LO	1,131,656,000.00	1,131,656,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent - LO	448,048,000.00	448,048,000.00	100.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) - LO	92,542,000.00	92,542,000.00	100.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - LO	20,816,600.00	20,816,600.00	100.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1,990,566,496,640.00	1,990,566,496,640.00	100.00
DAU - LO	1,542,273,268,112.00	1,542,273,268,112.00	100.00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	146,233,190,528.00	146,233,190,528.00	100.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - LO	260,918,641,000.00	260,918,641,000.00	100.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - LO	41,141,397,000.00	41,141,397,000.00	100.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	50,956,396,248.00	50,956,396,248.00	100.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA - LO	33,297,648,434.00	33,297,648,434.00	100.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB - LO	321,141,870.00	321,141,870.00	100.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - LO	17,337,605,944.00	17,337,605,944.00	100.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	953,293,825,709.00	953,293,825,709.00	100.00
DAK Non Fisik-BOS Reguler - LO	494,739,555,444.00	494,739,555,444.00	100.00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LO	10,931,750,000.00	10,931,750,000.00	100.00
DAK Non Fisik-TPG PNSD - LO	418,913,471,200.00	418,913,471,200.00	100.00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LO	709,750,000.00	709,750,000.00	100.00
DAK Non Fisik-TKG PNSD - LO	17,567,473,800.00	17,567,473,800.00	100.00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum - LO	1,845,100,400.00	1,845,100,400.00	100.00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya - LO	1,931,572,427.00	1,931,572,427.00	100.00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LO	427,530,236.00	427,530,236.00	100.00
DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - LO	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi - LO	5,085,622,202.00	5,085,622,202.00	100.00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LO	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah - LO	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan - LO	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00
Insentif Fiskal - LO	6,700,771,000.00	6,700,771,000.00	100.00
Insentif Fiskal - LO	6,700,771,000.00	6,700,771,000.00	100.00
Insentif Fiskal - LO	6,700,771,000.00	6,700,771,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN TRANSFER - LO	3,053,465,719,247.00	3,053,465,719,247.00	100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
Pendapatan Hibah - LO	258,104,483,574.42	258,104,483,574.42	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	247,775,103,595.42	247,775,103,595.42	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	247,775,103,595.42	247,775,103,595.42	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	247,775,103,595.42	247,775,103,595.42	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	761,236,979.00	761,236,979.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	761,236,979.00	761,236,979.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	761,236,979.00	761,236,979.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	8,646,075,000.00	8,646,075,000.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	8,646,075,000.00	8,646,075,000.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri - LO	8,646,075,000.00	8,646,075,000.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	922,068,000.00	922,068,000.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - LO	922,068,000.00	922,068,000.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - LO	922,068,000.00	922,068,000.00	100.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	2,274,414,157.00	2,274,414,157.00	100.00
Lain-lain Pendapatan - LO	2,274,414,157.00	2,274,414,157.00	100.00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO	2,274,414,157.00	2,274,414,157.00	100.00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia - LO	2,274,414,157.00	2,274,414,157.00	100.00
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	260,378,897,731.42	260,378,897,731.42	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	4,757,909,927,697.57	4,757,909,927,697.57	100.00
Beban Daerah- LO			
Beban OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	1,990,936,214,248.20	1,990,936,214,248.20	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	1,327,730,656,274.00	1,327,730,656,274.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN - LO	1,021,353,956,036.00	1,021,353,956,036.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS - LO	695,399,521,227.00	695,399,521,227.00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK - LO	325,954,434,809.00	325,954,434,809.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN - LO	82,613,784,476.00	82,613,784,476.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	62,340,876,404.00	62,340,876,404.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK - LO	20,272,908,072.00	20,272,908,072.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO	7,521,750,000.00	7,521,750,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	7,521,750,000.00	7,521,750,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO	49,135,219,040.00	49,135,219,040.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	49,135,219,040.00	49,135,219,040.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	29,018,733,209.00	29,018,733,209.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	10,015,912,500.00	10,015,912,500.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK - LO	19,002,820,709.00	19,002,820,709.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN - LO	64,363,382,330.00	64,363,382,330.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS - LO	46,620,666,200.00	46,620,666,200.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK - LO	17,742,716,130.00	17,742,716,130.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LO	1,310,089,988.00	1,310,089,988.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	1,310,089,988.00	1,310,089,988.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN - LO	14,920,323.00	14,920,323.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	8,608,023.00	8,608,023.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK - LO	6,312,300.00	6,312,300.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO	63,797,511,635.00	63,797,511,635.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	44,030,206,790.00	44,030,206,790.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK - LO	19,767,304,845.00	19,767,304,845.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LO	2,150,379,859.00	2,150,379,859.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	1,434,505,243.00	1,434,505,243.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK - LO	715,874,616.00	715,874,616.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN - LO	6,450,929,378.00	6,450,929,378.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	4,303,503,651.00	4,303,503,651.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK - LO	2,147,425,727.00	2,147,425,727.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	56,742,398,634.00	56,742,398,634.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	52,562,043,153.00	52,562,043,153.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	39,082,693,178.00	39,082,693,178.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK - LO	13,479,349,975.00	13,479,349,975.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN - LO	230,758,226.00	230,758,226.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS - LO	230,758,226.00	230,758,226.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN - LO	3,328,578,593.00	3,328,578,593.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS - LO	3,328,578,593.00	3,328,578,593.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN - LO	621,018,662.00	621,018,662.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS - LO	621,018,662.00	621,018,662.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	549,006,388,833.20	549,006,388,833.20	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - LO	9,879,645,412.00	9,879,645,412.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor - LO	6,470,055,541.00	6,470,055,541.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	3,395,773,580.00	3,395,773,580.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan - LO	13,816,291.00	13,816,291.00	100.00
Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	1,048,031,463.00	1,048,031,463.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pernakalan Kekayaan Daerah - LO	27,404,127.00	27,404,127.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila - LO	49,453,500.00	49,453,500.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan - LO	20,933,837.00	20,933,837.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	52,907,772.00	52,907,772.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	30,942,228.00	30,942,228.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	1,764,000.00	1,764,000.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan - LO	46,069,140.00	46,069,140.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan - LO	8,869,490.00	8,869,490.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	69,364,500.00	69,364,500.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah - LO	28,489,200.00	28,489,200.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	711,833,669.00	711,833,669.00	100.00

R

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD - LO	418,931,906,200.00	418,931,906,200.00	100.00
Beban TPG PNSD - LO	418,931,906,200.00	418,931,906,200.00	100.00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD - LO	17,567,473,800.00	17,567,473,800.00	100.00
Beban TKG PNSD - LO	17,567,473,800.00	17,567,473,800.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD - LO	709,750,000.00	709,750,000.00	100.00
Beban Tamsil Guru PNSD - LO	709,750,000.00	709,750,000.00	100.00
Beban Honorarium - LO	100,213,834,919.20	100,213,834,919.20	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	99,947,429,489.20	99,947,429,489.20	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	266,405,430.00	266,405,430.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD - LO	655,747,039.00	655,747,039.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan - LO	655,747,039.00	655,747,039.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	54,767,475,357.00	54,767,475,357.00	100.00
Beban Uang Representasi DPRD - LO	2,062,050,000.00	2,062,050,000.00	100.00
Beban Uang Representasi DPRD - LO	2,062,050,000.00	2,062,050,000.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO	112,845,000.00	112,845,000.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO	112,845,000.00	112,845,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras DPRD - LO	110,947,440.00	110,947,440.00	100.00
Beban Tunjangan Beras DPRD - LO	110,947,440.00	110,947,440.00	100.00
Beban Uang Paket DPRD - LO	176,715,000.00	176,715,000.00	100.00
Beban Uang Paket DPRD - LO	176,715,000.00	176,715,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD - LO	2,989,972,500.00	2,989,972,500.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD - LO	2,989,972,500.00	2,989,972,500.00	100.00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD - LO	270,657,000.00	270,657,000.00	100.00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD - LO	270,657,000.00	270,657,000.00	100.00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	11,685,000,000.00	11,685,000,000.00	100.00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	11,685,000,000.00	11,685,000,000.00	100.00
Beban Tunjangan Reses DPRD - LO	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	100.00
Beban Tunjangan Reses DPRD - LO	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	100.00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	47,374,877.00	47,374,877.00	100.00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	47,374,877.00	47,374,877.00	100.00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	14,071,213,540.00	14,071,213,540.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD - LO	177,048,900.00	177,048,900.00	100.00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD - LO	4,241,160.00	4,241,160.00	100.00
Beban Jaminan Kematian DPRD - LO	12,723,480.00	12,723,480.00	100.00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD - LO	13,877,200,000.00	13,877,200,000.00	100.00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD - LO	20,315,700,000.00	20,315,700,000.00	100.00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD - LO	20,315,700,000.00	20,315,700,000.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	188,759,150.00	188,759,150.00	100.00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH - LO	59,400,000.00	59,400,000.00	100.00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH - LO	59,400,000.00	59,400,000.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH - LO	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH - LO	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LO	106,920,000.00	106,920,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LO	106,920,000.00	106,920,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH - LO	6,303,500.00	6,303,500.00	100.00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH - LO	6,303,500.00	6,303,500.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO	2,729,250.00	2,729,250.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO	2,729,250.00	2,729,250.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH - LO	6,288,000.00	6,288,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH - LO	6,288,000.00	6,288,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	129,600.00	129,600.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	129,600.00	129,600.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - LO	388,800.00	388,800.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - LO	388,800.00	388,800.00	100.00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	2,500,536,000.00	2,500,536,000.00	100.00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD - LO	360,000,000.00	360,000,000.00	100.00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD - LO	360,000,000.00	360,000,000.00	100.00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH - LO	2,140,536,000.00	2,140,536,000.00	100.00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH - LO	2,140,536,000.00	2,140,536,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	1,436,418,447,454.61	1,436,418,447,454.61	100.00
Beban Barang - LO	501,047,958,564.57	501,047,958,564.57	100.00
Beban Barang Pakai Habis - LO	500,912,200,839.57	500,912,200,839.57	100.00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - LO	10,826,016,284.00	10,826,016,284.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Kimia - LO	2,101,921,389.50	2,101,921,389.50	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - LO	7,494,862,933.00	7,494,862,933.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Baku - LO	8,110,496,324.00	8,110,496,324.00	100.00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - LO	1,004,233,764.00	1,004,233,764.00	100.00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran - LO	3,441,000.00	3,441,000.00	100.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas - LO	4,962,066,723.53	4,962,066,723.53	100.00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan - LO	705,550,200.00	705,550,200.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya - LO	6,567,197,170.55	6,567,197,170.55	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - LO	493,590,177.00	493,590,177.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - LO	300,698,921.00	300,698,921.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium - LO	558,091,642.00	558,091,642.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar - LO	78,581,400.00	78,581,400.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi - LO	40,867,282.00	40,867,282.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - LO	286,842,425.00	286,842,425.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel - LO	52,112,500.00	52,112,500.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya - LO	111,816,174.00	111,816,174.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LO	31,578,077,870.32	31,578,077,870.32	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - LO	5,365,232,210.00	5,365,232,210.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LO	32,152,214,454.59	32,152,214,454.59	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - LO	1,122,398,497.00	1,122,398,497.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - LO	1,033,089,435.00	1,033,089,435.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - LO	4,449,912,027.00	4,449,912,027.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LO	4,058,062,991.00	4,058,062,991.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - LO	1,226,936,081.00	1,226,936,081.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga - LO	3,329,206,550.00	3,329,206,550.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - LO	3,460,520,418.00	3,460,520,418.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - LO	1,422,757,097.00	1,422,757,097.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat - LO	161,609,783,646.66	161,609,783,646.66	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - LO	40,405,918,595.96	40,405,918,595.96	100.00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - LO	30,067,986,225.00	30,067,986,225.00	100.00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - LO	2,543,931,943.00	2,543,931,943.00	100.00
Beban Natura dan Pakan-Natura - LO	125,845,639.00	125,845,639.00	100.00
Beban Natura dan Pakan-Pakan - LO	1,115,575,485.00	1,115,575,485.00	100.00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya - LO	96,660,500.00	96,660,500.00	100.00
Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya - LO	20,300,000.00	20,300,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat - LO	79,637,018,507.00	79,637,018,507.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - LO	5,214,467,513.00	5,214,467,513.00	100.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh - LO	29,210,000.00	29,210,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan - LO	30,548,645,140.00	30,548,645,140.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - LO	3,196,623,969.46	3,196,623,969.46	100.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial - LO	8,080,857,320.00	8,080,857,320.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - LO	1,947,805,660.00	1,947,805,660.00	100.00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH - LO	834,282,061.00	834,282,061.00	100.00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	774,169,500.00	774,169,500.00	100.00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) - LO	15,650,000.00	15,650,000.00	100.00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - LO	50,875,000.00	50,875,000.00	100.00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) - LO	50,350,000.00	50,350,000.00	100.00
Beban Pakaian Slaga - LO	184,676,250.00	184,676,250.00	100.00
Beban Pakaian Teknik - LO	14,065,000.00	14,065,000.00	100.00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium - LO	81,066,000.00	81,066,000.00	100.00
Beban Pakaian Kerja Bengkel - LO	540,000.00	540,000.00	100.00
Beban Pakaian Adat Daerah - LO	225,149,000.00	225,149,000.00	100.00
Beban Pakaian Batik Tradisional - LO	60,140,000.00	60,140,000.00	100.00
Beban Pakaian Olahraga - LO	524,862,744.00	524,862,744.00	100.00
Beban Pakaian Paskibraka - LO	558,951,200.00	558,951,200.00	100.00
Beban Barang Tak Habis Pakai - LO	39,634,600.00	39,634,600.00	100.00
Beban Komponen-Komponen Peralatan - LO	17,975,600.00	17,975,600.00	100.00
Beban Komponen-Komponen Lainnya - LO	2,099,000.00	2,099,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) - LO	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00
Beban Pipa-Pipa Lainnya - LO	17,660,000.00	17,660,000.00	100.00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - LO	96,123,125.00	96,123,125.00	100.00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur - LO	3,286,625.00	3,286,625.00	100.00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum - LO	76,007,500.00	76,007,500.00	100.00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara - LO	16,829,000.00	16,829,000.00	100.00
Beban Jasa - LO	751,120,905,161.48	751,120,905,161.48	100.00
Beban Jasa Kantor - LO	402,419,910,257.32	402,419,910,257.32	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	220,855,000.00	220,855,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan - LO	571,050,000.00	571,050,000.00	100.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - LO	7,281,179,600.00	7,281,179,600.00	100.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LO	14,181,713,000.00	14,181,713,000.00	100.00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara - LO	379,528,500.00	379,528,500.00	100.00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan - LO	7,116,029,279.00	7,116,029,279.00	100.00
Honorarium Rohaniwan - LO	240,950,000.00	240,950,000.00	100.00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website - LO	1,189,018,950.00	1,189,018,950.00	100.00
Honorarium Penyelenggara Ujian - LO	1,127,588,500.00	1,127,588,500.00	100.00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota - LO	118,400,000.00	118,400,000.00	100.00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - LO	7,068,089,000.00	7,068,089,000.00	100.00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - LO	728,900,000.00	728,900,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan - LO	61,906,534,124.00	61,906,534,124.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan - LO	57,665,873,282.82	57,665,873,282.82	100.00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium - LO	328,243,650.00	328,243,650.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - LO	3,009,971,022.00	3,009,971,022.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LO	687,650,000.00	687,650,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana - LO	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial - LO	490,251,900.00	490,251,900.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air - LO	2,124,000,000.00	2,124,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - LO	3,839,241,000.00	3,839,241,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi - LO	11,367,921,035.00	11,367,921,035.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer - LO	5,524,761,400.00	5,524,761,400.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum - LO	91,667,319,960.00	91,667,319,960.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli - LO	4,514,947,000.00	4,514,947,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan - LO	4,301,216,562.00	4,301,216,562.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan - LO	4,509,715,011.00	4,509,715,011.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir - LO	254,785,946.00	254,785,946.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - LO	637,312,750.00	637,312,750.00	100.00
Beban Jasa Audit/Surveilance ISO - LO	359,953,850.00	359,953,850.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan - LO	821,683,000.00	821,683,000.00	100.00
Beban Jasa Tata Rias - LO	130,650,350.00	130,650,350.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - LO	308,750,000.00	308,750,000.00	100.00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik - LO	382,155,927.00	382,155,927.00	100.00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan - LO	408,522,136.00	408,522,136.00	100.00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi - LO	803,333,372.00	803,333,372.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara - LO	4,906,167,435.00	4,906,167,435.00	100.00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi - LO	456,405,000.00	456,405,000.00	100.00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga - LO	289,369,834.00	289,369,834.00	100.00
Beban Jasa Kalibrasi - LO	532,368,729.00	532,368,729.00	100.00
Beban Jasa Pengolahan Sampah - LO	1,138,505,344.00	1,138,505,344.00	100.00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi - LO	173,330,000.00	173,330,000.00	100.00
Beban Jasa Jalan/Tol - LO	200,186,902.00	200,186,902.00	100.00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan - LO	1,185,945,400.00	1,185,945,400.00	100.00
Beban Jasa Operator Kapal - LO	59,950,000.00	59,950,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon - LO	307,992,234.50	307,992,234.50	100.00
Beban Tagihan Air - LO	4,823,327,854.00	4,823,327,854.00	100.00
Beban Tagihan Listrik - LO	22,151,552,248.00	22,151,552,248.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - LO	635,461,000.00	635,461,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - LO	15,288,769,634.00	15,288,769,634.00	100.00
Beban Paket/Pengiriman - LO	2,007,008,731.00	2,007,008,731.00	100.00
Beban Penambahan Daya - LO	142,135,114.00	142,135,114.00	100.00
Beban Registrasi/Keanggotaan - LO	4,096,800,389.00	4,096,800,389.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LO	1,225,088,647.00	1,225,088,647.00	100.00
Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan - LO	6,036,000.00	6,036,000.00	100.00
Beban Lembur - LO	32,955,881,455.00	32,955,881,455.00	100.00
Beban Medical Check Up - LO	24,452,900.00	24,452,900.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	5,584,182,300.00	5,584,182,300.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	3,130,898,000.00	3,130,898,000.00	100.00
Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis - LO	3,780,000,000.00	3,780,000,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi - LO	285,009,157,800.49	285,009,157,800.49	100.00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI - LO	77,804,692,000.00	77,804,692,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 - LO	15,276,920,800.00	15,276,920,800.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LO	6,626,933,553.49	6,626,933,553.49	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LO	262,640,421.00	262,640,421.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - LO	295,928,575.00	295,928,575.00	100.00
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS - LO	174,662,042,451.00	174,662,042,451.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan - LO	10,080,000,000.00	10,080,000,000.00	100.00
Beban Sewa Tanah - LO	137,891,666.67	137,891,666.67	100.00
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal - LO	57,916,666.67	57,916,666.67	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan - LO	75,975,000.00	75,975,000.00	100.00
Beban Sewa Lapangan Lainnya - LO	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	17,664,783,942.00	17,664,783,942.00	100.00
Beban Sewa Tractor - LO	27,325,000.00	27,325,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya - LO	112,910,000.00	112,910,000.00	100.00
Beban Sewa Electric Generating Set - LO	187,330,499.00	187,330,499.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Selam - LO	8,630,000.00	8,630,000.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LO	452,000.00	452,000.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	11,376,547,796.00	11,376,547,796.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - LO	162,570,000.00	162,570,000.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua - LO	468,462,795.00	468,462,795.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - LO	89,194,200.00	89,194,200.00	100.00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang - LO	87,800,000.00	87,800,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya - LO	119,549,550.00	119,549,550.00	100.00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya - LO	1,850,095,124.00	1,850,095,124.00	100.00
Beban Sewa Mebel - LO	47,035,000.00	47,035,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Pendingin - LO	46,500,000.00	46,500,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - LO	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00
Beban Sewa Lemari dan Arsip Pejabat - LO	660,000.00	660,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio - LO	796,520,999.00	796,520,999.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film - LO	1,073,240,129.00	1,073,240,129.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Studio Gambar - LO	10,865,000.00	10,865,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya - LO	32,606,000.00	32,606,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM - LO	700,000.00	700,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF - LO	1,075,181.00	1,075,181.00	100.00
Beban Sewa Alat Laboratorium Umum - LO	210,000.00	210,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia - LO	3,682,500.00	3,682,500.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika - LO	2,670,000.00	2,670,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah - LO	745,000.00	745,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas - LO	360,000.00	360,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama - LO	6,631,000.00	6,631,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan - LO	42,187,500.00	42,187,500.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian - LO	216,108,350.00	216,108,350.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga - LO	51,316,000.00	51,316,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN - LO	300,000.00	300,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu) - LO	9,839,000.00	9,839,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan - LO	101,484,220.00	101,484,220.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Umum - LO	549,765,599.00	549,765,599.00	100.00
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya - LO	59,023,000.00	59,023,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya - LO	45,988,500.00	45,988,500.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan - LO	4,104,000.00	4,104,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya - LO	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan - LO	13,538,705,000.00	13,538,705,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor - LO	764,046,250.00	764,046,250.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LO	1,408,875,500.00	1,408,875,500.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga - LO	44,655,000.00	44,655,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Terbuka - LO	10,351,707,250.00	10,351,707,250.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - LO	43,571,000.00	43,571,000.00	100.00
Beban Sewa Asrama - LO	871,850,000.00	871,850,000.00	100.00
Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun - LO	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya - LO	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi - LO	4,505,593,303.00	4,505,593,303.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural - LO	838,175,375.00	838,175,375.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - LO	1,582,978,300.00	1,582,978,300.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - LO	834,646,670.00	834,646,670.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - LO	1,076,068,083.00	1,076,068,083.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air - LO	74,938,875.00	74,938,875.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan - LO	98,786,000.00	98,786,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi - LO	279,109,000.00	279,109,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan - LO	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus - LO	259,109,000.00	259,109,000.00	100.00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO	119,000,000.00	119,000,000.00	100.00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 - LO	119,000,000.00	119,000,000.00	100.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan - LO	26,987,421,489.00	26,987,421,489.00	100.00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan - LO	20,669,352,189.00	20,669,352,189.00	100.00
Beban Sosialisasi - LO	6,065,674,300.00	6,065,674,300.00	100.00
Beban Diklat Kepemimpinan - LO	252,395,000.00	252,395,000.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud - LO	459,332,703.00	459,332,703.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise - LO	459,332,703.00	459,332,703.00	100.00
Beban Pemeliharaan - LO	25,037,641,083.56	25,037,641,083.56	100.00
Beban Pemeliharaan Tanah - LO	16,320,000.00	16,320,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman - LO	16,320,000.00	16,320,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	15,983,409,630.72	15,983,409,630.72	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya - LO	625,264,319.00	625,264,319.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set - LO	125,739,700.00	125,739,700.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa - LO	108,530,468.00	108,530,468.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan - LO	138,159,050.00	138,159,050.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LO	1,326,484,582.00	1,326,484,582.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	3,833,577,258.00	3,833,577,258.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - LO	33,242,000.00	33,242,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - LO	307,854,468.00	307,854,468.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya - LO	279,724,234.68	279,724,234.68	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik - LO	199,505,673.00	199,505,673.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) - LO	574,175,062.00	574,175,062.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor - LO	720,497,131.00	720,497,131.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - LO	95,621,100.00	95,621,100.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel - LO	177,995,000.00	177,995,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu - LO	133,900.00	133,900.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih - LO	1,194,287,690.00	1,194,287,690.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - LO	995,228,758.00	995,228,758.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Lainnya (Home Use) - LO	1,167,821,636.00	1,167,821,636.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran - LO	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat - LO	31,901,000.00	31,901,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film - LO	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar - LO	500,000.00	500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya - LO	49,500,000.00	49,500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya - LO	1,960,891,689.04	1,960,891,689.04	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga - LO	500,000.00	500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia - LO	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika - LO	7,643,000.00	7,643,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar - LO	15,961,950.00	15,961,950.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan - LO	57,225,000.00	57,225,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas - LO	401,000.00	401,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS - LO	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama - LO	3,743,000.00	3,743,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian - LO	19,687,150.00	19,687,150.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga - LO	12,650,000.00	12,650,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN - LO	450,000.00	450,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu) - LO	500,000.00	500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan - LO	1,776,000.00	1,776,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK - LO	100,000.00	100,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran - LO	245,000.00	245,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan - LO	48,003,275.00	48,003,275.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - LO	914,233,637.00	914,233,637.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - LO	16,900,000.00	16,900,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe - LO	89,931,000.00	89,931,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer - LO	37,840,500.00	37,840,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer - LO	93,253,000.00	93,253,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan - LO	9,473,550.00	9,473,550.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya - LO	631,226,350.00	631,226,350.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan - LO	6,855,000.00	6,855,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik - LO	1,776,200.00	1,776,200.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan - LO	17,761,800.00	17,761,800.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam - LO	23,500,500.00	23,500,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air - LO	2,078,000.00	2,078,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara - LO	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya - LO	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	8,396,047,354.84	8,396,047,354.84	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - LO	7,234,328,543.84	7,234,328,543.84	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang - LO	166,091,826.00	166,091,826.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium - LO	98,303,000.00	98,303,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan - LO	13,146,150.00	13,146,150.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah - LO	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LO	46,950,000.00	46,950,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - LO	50,585,000.00	50,585,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga - LO	32,377,000.00	32,377,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga - LO	850,000.00	850,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan - LO	14,294,500.00	14,294,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - LO	155,223,760.00	155,223,760.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir - LO	53,210,000.00	53,210,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman - LO	529,687,575.00	529,687,575.00	100.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO	319,284,198.00	319,284,198.00	100.00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan - LO	134,904,043.00	134,904,043.00	100.00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air - LO	146,232,655.00	146,232,655.00	100.00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain - LO	38,147,500.00	38,147,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - LO	322,579,900.00	322,579,900.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum - LO	128,974,200.00	128,974,200.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya - LO	76,182,200.00	76,182,200.00	100.00
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik - LO	88,245,100.00	88,245,100.00	100.00
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian - LO	29,178,400.00	29,178,400.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas - LO	133,507,654,995.00	133,507,654,995.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LO	133,481,939,795.00	133,481,939,795.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - LO	108,969,736,089.00	108,969,736,089.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Tetap - LO	23,900,000.00	23,900,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota - LO	23,047,306,636.00	23,047,306,636.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - LO	1,045,433,290.00	1,045,433,290.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - LO	395,563,780.00	395,563,780.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri - LO	25,715,200.00	25,715,200.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri - LO	25,715,200.00	25,715,200.00	100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	25,704,287,650.00	25,704,287,650.00	100.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	18,082,453,490.00	18,082,453,490.00	100.00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan - LO	3,215,992,710.00	3,215,992,710.00	100.00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi - LO	14,395,150,000.00	14,395,150,000.00	100.00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan - LO	427,500,000.00	427,500,000.00	100.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat - LO	43,810,780.00	43,810,780.00	100.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	7,621,834,160.00	7,621,834,160.00	100.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - LO	7,621,834,160.00	7,621,834,160.00	100.00
Beban Bunga - LO	36,454,659,018.00	36,454,659,018.00	100.00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - LO	36,454,659,018.00	36,454,659,018.00	100.00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah - LO	36,454,659,018.00	36,454,659,018.00	100.00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah - LO	36,454,659,018.00	36,454,659,018.00	100.00
Beban Hibah - LO	185,365,911,861.00	185,365,911,861.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	14,383,394,085.00	14,383,394,085.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	6,905,000,000.00	6,905,000,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	6,905,000,000.00	6,905,000,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LO	7,153,394,085.00	7,153,394,085.00	100.00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LO	7,153,394,085.00	7,153,394,085.00	100.00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	325,000,000.00	325,000,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	325,000,000.00	325,000,000.00	100.00
Beban Hibah Dana BOS - LO	164,507,172,776.00	164,507,172,776.00	100.00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta - LO	160,790,822,776.00	160,790,822,776.00	100.00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta - LO	160,790,822,776.00	160,790,822,776.00	100.00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta - LO	3,716,350,000.00	3,716,350,000.00	100.00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta - LO	3,716,350,000.00	3,716,350,000.00	100.00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LO	6,475,345,000.00	6,475,345,000.00	100.00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LO	6,475,345,000.00	6,475,345,000.00	100.00
Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LO	6,475,345,000.00	6,475,345,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial - LO	10,332,950,000.00	10,332,950,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial kepada Individu - LO	1,681,000,000.00	1,681,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu - LO	1,681,000,000.00	1,681,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu - LO	1,681,000,000.00	1,681,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat - LO	2,049,500,000.00	2,049,500,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat - LO	2,049,500,000.00	2,049,500,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat - LO	2,049,500,000.00	2,049,500,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - LO	6,602,450,000.00	6,602,450,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - LO	6,602,450,000.00	6,602,450,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - LO	6,602,450,000.00	6,602,450,000.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang - LO	3,971,888,433.05	3,971,888,433.05	100.00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah - LO	24,444,646.00	24,444,646.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan - LO	24,444,646.00	24,444,646.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan - LO	24,444,646.00	24,444,646.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah - LO	3,773,102,763.31	3,773,102,763.31	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah - LO	3,036,179,957.84	3,036,179,957.84	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah - LO	2,154,366,063.09	2,154,366,063.09	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO	881,813,894.75	881,813,894.75	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha - LO	736,922,805.47	736,922,805.47	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	721,298,805.47	721,298,805.47	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	15,624,000.00	15,624,000.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	174,341,023.74	174,341,023.74	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	174,341,023.74	174,341,023.74	100.00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	174,341,023.74	174,341,023.74	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	173,235,526,553.11	173,235,526,553.11	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	173,235,526,553.11	173,235,526,553.11	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	173,235,526,553.11	173,235,526,553.11	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO.	173,235,526,553.11	173,235,526,553.11	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	72,215,164,049.58	72,215,164,049.58	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	72,215,164,049.58	72,215,164,049.58	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	72,215,164,049.58	72,215,164,049.58	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	72,215,164,049.58	72,215,164,049.58	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	359,024,329,426.14	359,024,329,426.14	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	359,024,329,426.14	359,024,329,426.14	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	359,024,329,426.14	359,024,329,426.14	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	359,024,329,426.14	359,024,329,426.14	100.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	26,111,442.08	26,111,442.08	100.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	26,111,442.08	26,111,442.08	100.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	26,111,442.08	26,111,442.08	100.00
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan - LO	26,111,442.08	26,111,442.08	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	997,915,807.06	997,915,807.06	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	997,915,807.06	997,915,807.06	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	997,915,807.06	997,915,807.06	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	997,915,807.06	997,915,807.06	100.00
Beban Penyusutan Properti Investasi - LO	584,014,629.63	584,014,629.63	100.00
Beban Penyusutan Properti Investasi - LO	584,014,629.63	584,014,629.63	100.00
Beban Penyusutan Properti Investasi - LO	584,014,629.63	584,014,629.63	100.00
Beban Penyusutan Properti Investasi - LO	584,014,629.63	584,014,629.63	100.00
Beban TIDAK TERDUGA - LO			
Beban Tidak Terduga - LO	683,941,216.00	683,941,216.00	100.00
Beban Tidak Terduga - LO	683,941,216.00	683,941,216.00	100.00
Beban Tidak Terduga - LO	683,941,216.00	683,941,216.00	100.00
Beban Tidak Terduga - LO	683,941,216.00	683,941,216.00	100.00
Beban TRANSFER - LO			
Beban Bagi Hasil - LO	501,771,829,140.00	501,771,829,140.00	100.00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa - LO	501,771,829,140.00	501,771,829,140.00	100.00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten - LO	455,546,067,966.00	455,546,067,966.00	100.00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten - LO	455,546,067,966.00	455,546,067,966.00	100.00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota - LO	46,225,761,174.00	46,225,761,174.00	100.00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota - LO	46,225,761,174.00	46,225,761,174.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan - LO	7,630,000,000.00	7,630,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi - LO	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00

URAIAN	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi - LO	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi - LO	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota - LO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota - LO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota - LO	4,130,000,000.00	4,130,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota - LO	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota - LO	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota - LO	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - LO	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	100.00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO			
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar- LO	434,151,848.11	434,151,848.11	100.00
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	434,151,848.11	434,151,848.11	100.00
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	434,151,848.11	434,151,848.11	100.00
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	434,151,848.11	434,151,848.11	100.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1,658,870,904.00	1,658,870,904.00	100.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1,658,870,904.00	1,658,870,904.00	100.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1,658,870,904.00	1,658,870,904.00	100.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1,658,870,904.00	1,658,870,904.00	100.00
JUMLAH BEBAN	4,781,741,926,030.57	4,781,741,926,030.57	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(23,831,998,333.00)	(23,831,998,333.00)	100.00

SIPKD Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	1.034.272.519.874,22	1.222.849.908.091,55
Penerimaan Retribusi daerah	178.912.998.471,19	27.136.719.369,17
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46.221.160.050,00	31.749.907.192,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.196.924.277,94	168.441.183.726,02
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.106.429.650,00	61.216.765.770,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.990.566.496.640,00	1.976.058.968.384,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.004.250.221.957,00	1.331.571.219.542,00
Dana Insentif Daerah	6.700.771.000,00	11.346.961.000,00
Penerimaan Hibah	203.417.490.868,00	2.895.819.700,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.556.645.012.788,35	4.833.267.452.774,74
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.992.090.954.369,20	1.657.095.800.087,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.138.177.002.805,71	1.187.981.415.203,76
Pembayaran Bunga	46.470.147.735,00	57.260.225.861,00
Pembayaran Hibah	186.634.548.226,00	534.704.400.625,00
Pembayaran Bantuan Sosial	10.332.950.000,00	29.630.396.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	7.630.000.000,00	6.306.245.545,00
Pembayaran Tidak Terduga	728.941.216,00	3.331.110.441,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab./Kota	561.775.713.362,00	724.153.525.994,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.943.840.257.713,91	4.200.463.119.756,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	612.804.755.074,44	632.804.333.017,98
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	203.511.200.000,00
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan dari Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan dari Aset Lainnya	141.597.853,00	1.262.439.722,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	1.132.467.037,00
Jumlah Arus Kas Masuk	141.597.853,00	205.906.106.759,00
Arus kas keluar :		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	125.810.216.574,46	176.436.362.807,55
Perolehan Gedung dan Bangunan	92.833.465.160,47	216.584.489.838,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.333.424.383,00	114.279.541.753,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	39.293.080.845,00	26.659.408.723,00
Perolehan Aset lainnya	199.151.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	354.469.337.962,93	533.959.803.121,55
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(354.327.740.109,93)	(328.053.696.362,55)

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)		818.600,00
Jumlah Arus Kas Masuk	-	818.600,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Non I	159.291.542.148,00	163.091.729.270,00
Pengeluaran pembiayaan untuk ternak sapi		
Jumlah Arus Kas Keluar	159.291.542.148,00	163.091.729.270,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(159.291.542.148,00)	(163.090.910.670,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	240.298.606.640,39	557.244.221.564,22
Penerimaan Dana Titipan	-	
Jumlah Arus Kas Masuk	240.298.606.640,39	557.244.221.564,22
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	237.498.591.410,31	557.051.183.433,22
Pengeluaran Dana Titipan		
Jumlah Arus Kas Keluar	237.498.591.410,31	557.051.183.433,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.800.015.230,08	193.038.131,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	101.985.488.046,59	141.852.764.116,43
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD	263.265.280.880,37	121.412.516.763,94
Koreksi SiLPA	(881.687,00)	
Saldo Akhir Kas	365.249.887.239,96	263.265.280.880,37
Terdiri dari:		
Saldo Akhir Kas di BUD	342.184.390.452,08	242.843.136.999,24
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	28.137.500,00	13.418.600,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	15.067.196.381,91	17.163.575.639,20
Saldo Akhir Kas di BLUD SPAM	737.371.013,04	744.706.032,04
Saldo Akhir Kas di BLUD RSJ	3.184.719.862,84	1.512.537.307,67
Saldo Akhir Kas Lainnya	3.236.402.434,09	436.791.784,22
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	811.669.596,00	551.114.518,00
Saldo Akhir Kas	365.249.887.239,96	263.265.280.880,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(AUDITED)
UNTUK KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	11.349.628.703.515,30	10.064.001.342.526,64
RK PPKD		
Surplus/Defisit-LO	(23.831.998.333,00)	169.981.080.890,99
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	105.000.007.743,89	1.115.646.280.097,67
Dampak Perubahan Atas Kas	(881.687,00)	(40.755.400,00)
Dampak Perubahan Atas Piutang	32.572.932.943,38	66.737.365.584,42
Dampak Perubahan Atas Penyisihan	843.451.729,90	307.378.064,92
Dampak Perubahan Nilai Persediaan	1.330.934.629,00	(1.709.876.024,00)
Dampak Perubahan Atas Investasi	(2.941.362.155,48)	(4.372.468.483,49)
Dampak Perubahan Aset Tetap	(145.936.321.275,02)	1.216.208.187.496,20
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	228.108.213.890,22	(103.422.567.135,88)
Dampak Perubahan Atas Dana Cadangan	-	(7.918.351.796,31)
Dampak Perubahan Atas Aset Lain	(1.117.720.000,00)	(4.297.355.449,00)
Dampak Perubahan Atas Utang	(7.859.240.331,11)	(45.845.276.759,19)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	11.430.796.712.926,19	11.349.628.703.515,30

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

I.A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;



f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- d. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025; dan
- f. posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

I.B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



I.C. SISTEMATIKA PENULISAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- A. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
- B. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025
- C. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- A. Rincian dan Penjelasan dari masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 3. Neraca Daerah
 - 4. Laporan Operasional (LO)
 - 5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



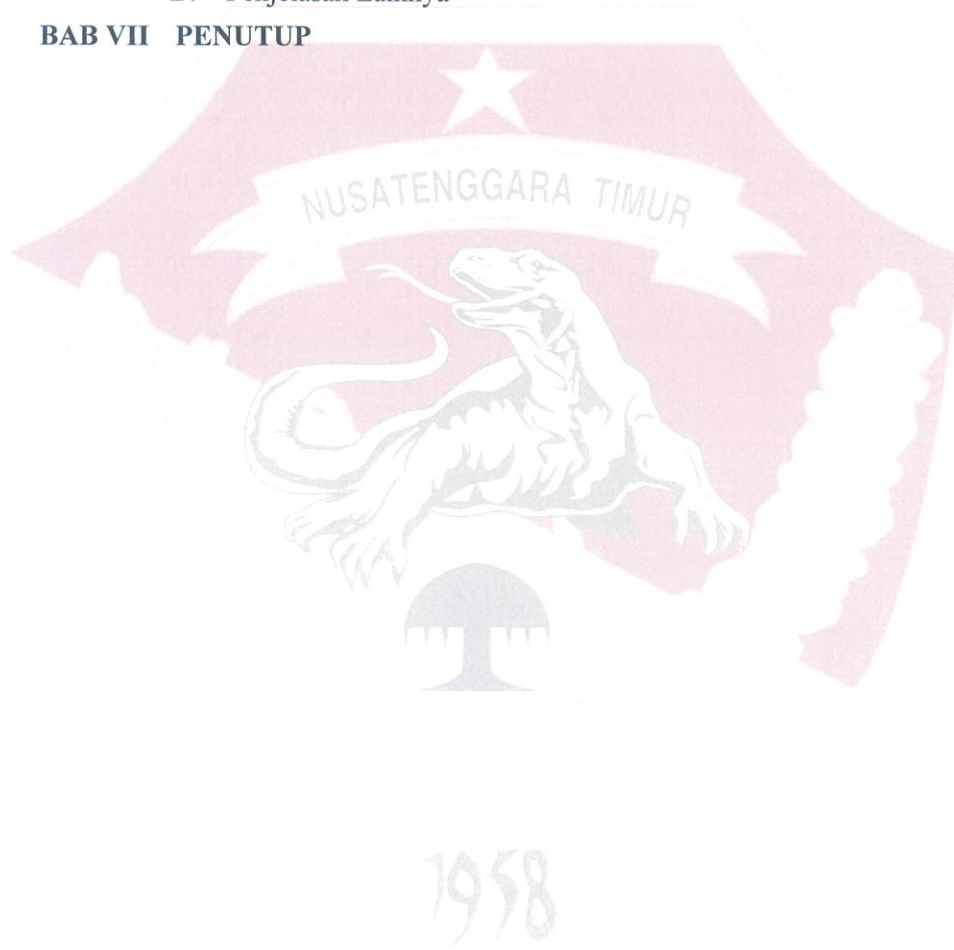
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Informasi Tambahan

B. Penjelasan Lainnya

BAB VII PENUTUP





BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

II.A. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

II.A.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana



salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

II.A.2. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Pembatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

II.A.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD; dan
4. Menjadi pedoman bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai tolak ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;



2. Sebagai tolak ukur penilaian pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran daerah; dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

II.B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

II.B.1. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

II.B.1.a. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah. Selain itu juga merupakan dokumen yang mengatur indikasi alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan APBD yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun program/kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD.



KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen penganggaran daerah yang disusun berdasarkan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Sesuai ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sementara Rancangan PPAS disusun dengan tahapan penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 serta penyusunan capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2023, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan APBD yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah untuk dilakukan persetujuan bersama;
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab



masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

4. Secara faktual menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, Non Governmental Organization (NGO) dan Lembaga Kerjasama Bilateral serta Lembaga Multilateral.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi:

1. SDM berkualitas/SDM berdaya saing dan produktif;
2. Infrastruktur berkualitas;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Selaras dengan tema nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah **“Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM Yang Berkualitas”** yang dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Daerah:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.



II.A.3.b. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah serta antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

II.A.3.c. Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2024 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

- 1) Tingkat Kemiskinan 2024 sebesar 19,48%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 sebesar 3,02%;
- 3) *Gini Ratio* 2024 sebesar 0,316%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia 2024 sebesar 69,14%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2024 sebesar 3,73%** (y-on-y);
- 6) Tingkat Inflasi 2024 sebesar 1,19% (y-to-date).



Indikator makro ekonomi dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT Periode 2023 s/d 2025

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)	19,96	19,48	18,60
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	1.141,11	1.127,57	1.088,78
2	Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	9,36	9,03	8,47
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	25.898,55	25.219,20	23.854,56
3	Peringkat Persentase Penduduk Miskin NTT secara Nasional	32 dari 34	35 dari 38	33 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 mencapai sebesar 18,60% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 18,60%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin



di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di atas nasional. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas Pemerintah Daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT
Berdasarkan Wilayah dan Domisili**

No	Penduduk Miskin	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
		Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%	Jml (Ribu Jiwa)	%	
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota							
	1	Sumba Barat	37,15	27,17	36,72	26,52	37,08	26,47
	2	Sumba Timur	75,66	28,08	73,58	27,04	70,35	25,64
	3	Kupang	90,23	21,78	90,34	21,37	87,5	20,32
	4	Timor Tengah Selatan	119,51	25,18	117,41	24,68	116,74	24,5
	5	Timor Tengah Utara	57,19	21,85	55,03	20,89	53,44	20,17
	6	Belu	33,19	14,30	32,57	13,86	30,4	12,79
	7	Alor	41,91	19,97	41,89	19,87	38,68	18,29
	8	Lembata	37,94	24,78	37,72	24,22	36,78	23,27
	9	Flores Timur	30,93	11,77	29,74	11,25	28,92	10,88
	10	Sikka	40,81	12,56	38,73	11,89	36,74	11,25
	11	Ende	63,10	22,86	62,37	22,57	58,92	21,31
	12	Ngada	20,57	12,06	20,48	11,87	19,53	11,22
	13	Manggarai	70,00	19,69	68,39	19,01	65,81	18,1
	14	Rote Ndao	53,55	27,05	52,89	25,78	51,64	24,37
	15	Manggarai Barat	49,95	16,82	50,68	16,74	49,55	16,09
	16	Sumba Tengah	24,24	31,78	23,81	30,84	22,81	29,23
	17	Sumba Barat Daya	101,40	27,48	102,05	27,2	97,68	25,66
	18	Nagekeo	18,57	12,33	18,68	12,3	18,63	12,18
	19	Manggarai Timur	74,40	25,06	74,59	24,9	70,99	23,51
	20	Sabu Raijua	30,43	28,37	30,98	28,13	30,65	27,18
	21	Malaka	29,19	14,42	28,54	13,92	28,05	13,52
22	Kota Kupang	41,20	8,61	40,38	8,24	37,91	7,57	
2	Berdasar Domisili (Provinsi NTT)							
	a.	Perkotaan	135,57	9,12	131,61	8,57	121,85	7,68
	b.	Pedesaan	1.005,55	23,76	995,96	23,41	966,93	22,66

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,325	3,408	3,352
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia	1,53	1,46	1,37
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 38	32 dari 38

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tabel 2.4 Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
1.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,798	0,848	0,843
2.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Indonesia	0,380	0,350	0,320
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 38	32 dari 38

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya redesign anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya realisasi atas target pendapatan daerah sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,14	3,02	3,31
2.	TPT Indonesia	5,32	4,91	4,85
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	7 dari 34	7 dari 38	6 dari 38

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan TPT Indonesia menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Indonesia. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa dan kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.6 Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Tingkat Pendidikan						
a.	Tdk tamat SD	1	2	0,87	3,01	0,88	2,25
b.	SD	1	2	0,87	3,01	0,88	2,25
c.	SMP	1,32	2,52	1,55	2,08	1,10	3,06
d.	SMA	4,4	6,4	3,75	8,09	4,64	6,29
e.	Universitas	6,73	7,37	3,35	6,50	5,31	6,55
2	Jenis Kelamin						
a	Laki-Laki	2,94		2,91		3,21	
b	Perempuan	3,36		3,16		3,43	

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

3) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- (1) Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- (2) Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa tren data pencapaian *Gini Ratio* Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.7 Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 s/d 2025

No.	Gini Ratio	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Provinsi NTT	0,325	0,316	0,315
2.	Indonesia	0,388	0,379	0,375
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	15 dari 34	13 dari 38	16 dari 38

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel diatas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 mencapai sebesar 0,315. Angka pencapaian *Gini Ratio* tersebut lebih rendah sebanyak 0,001 poin jika dibandingkan tahun 2024 dan lebih rendah sebanyak 0,060 poin dibandingkan dengan angka *Gini Ratio* tingkat nasional. *Gini Ratio* dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2025.

Tabel 2.8 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2023 s/d 2025

No.	Garis Kemiskinan	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	507.203	527.275	549.607
2.	Indonesia	550.050	582.932	609.160
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	24 dari 34	30 dari 38	31 dari 38

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:

- (1) Rendah (< 60);
- (2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- (3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- (4) Sangat Tinggi (> 80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebesar 69,89 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Provinsi NTT	68,40	69,14	69,89
2.	Indonesia	74,39	75,02	75,90
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	34 dari 38	34 dari 38

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk tahun 2025 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran riil per kapita dari sebesar Rp8.534,00 per kapita pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp8.735,00 per kapita pada tahun 2025. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pada tahun 2025 adalah 72,16 tahun, naik dari tahun 2024 yakni 71,83 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 adalah 13,34 tahun naik dibandingkan tahun 2024 yakni 13,23 tahun; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025 adalah 8,22 tahun, naik dibandingkan tahun 2024 yaitu 8,02 tahun. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,16 tahun pada tahun 2025 atau lebih lama 0,33 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Rata-rata Lama Sekolah adalah 8,22 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 13,34 tahun.

Tabel 2.10 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2023 s/d 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Sumba Barat	66,82	67,70	68,46
2	Sumba Timur	69,63	70,28	70,99
3	Kupang	67,51	68,26	69,03
4	Timor Tengah Selatan	65,39	66,22	66,88
5	Timor Tengah Utara	66,56	67,27	67,87
6	Belu	67,50	68,13	68,89
7	Alor	66,82	67,70	68,44
8	Lembata	68,41	68,95	69,70
9	Flores Timur	69,24	69,79	70,61
10	Sikka	69,41	69,96	70,65
11	Ende	71,77	72,24	72,73
12	Ngada	71,61	72,04	72,53
13	Manggarai	68,48	69,35	70,10
14	Rote Ndao	65,79	66,40	67,01
15	Manggarai Barat	67,84	68,68	69,20
16	Sumba Tengah	63,63	64,46	65,29
17	Sumba Barat Daya	63,74	64,27	64,82
18	Nagekeo	69,03	69,70	70,48
19	Manggarai Timur	65,05	66,03	66,63
20	Sabu Raijua	61,37	62,06	62,74
21	Malaka	64,50	65,13	65,84
22	Kota Kupang	82,77	83,21	83,65

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang terus mengalami peningkatan. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara



Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

Tabel 2.11 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Kesehatan - Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	71,57	71,83	72,16
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,82	8,02	8,22
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,22	13,23	13,34
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah)	8.248	8.534	8.735
	Indeks Pembangunan Manusia	68,40	69,14	69,89

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 72,16 tahun.

Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut disajikan tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.



**Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun
2023 - 2025**

No.	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Provinsi NTT	3,47*	3,73**	5,14**
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Indonesia	5,05*	5,03**	5,11**
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	33 dari 34	35 dari 38	21 dari 38

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Pada tingkat Nasional tahun 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 21 dari 38 Provinsi.

6) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaiknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu:

- (1) Inflasi ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- (2) Inflasi Sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- (3) Inflasi Berat (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan;
- (4) Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa tren perkembangan tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,42	1,19	2,39
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan tingkat inflasi daerah tahun 2025 dibanding tahun 2024 mencapai sebesar 1,2 poin.

II.A.3.d. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawas Keuangan Daerah”. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.



Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya Pemerintah Daerah untuk menganalisis capaian guna memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan secara global, nasional dan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp1.154.822.144.629,00 meningkat sebesar Rp59.320.689.155,00 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp44.202.047.251,00 menurun sebesar Rp17.411.814.776,00 dibanding tahun 2022. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 realisasi sebesar Rp60.645.290.853,00 meningkat sebesar Rp23.469.310.396,00 dibanding tahun 2022. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2023 sebesar Rp167.365.684.558,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.080.999.335,00 dibanding tahun 2022.

Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada tahun 2023 besarnya pendapatan transfer adalah Rp3.194.678.968.455,00 mengalami peningkatan sebesar Rp140.842.212.594,00



dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.183.251.449,00 menurun sebesar Rp5.715.573.094,00 dibanding tahun 2022.

2) Arah Kebijakan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value for money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi menjadi acuan dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022, dan 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Komponen dalam belanja daerah dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, Belanja Tidak Terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja operasi tahun 2023 yaitu sebesar



Rp3.185.343.321.503,00 mengalami peningkatan sebesar Rp133.492.157.301,00 dibandingkan tahun 2022. Realisasi belanja modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp621.342.023.685,00 menurun sebesar Rp595.460.422.912,00 dibanding tahun 2022. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 yaitu sebesar Rp707.344.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.520.829.756,00 dibanding tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja transfer tahun 2023 yaitu sebesar Rp653.517.358.069,00 mengalami peningkatan sebesar Rp112.746.488.268,00 dibandingkan tahun 2022.

Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan dengan baseline penganggaran tahun 2021-2023 yang diarahkan untuk: 1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab kebijakan pemerintah pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 (satu) tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi dan rehabilitasi yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

3) Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit keuangan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



Sepanjang periode 2021-2023, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2023 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp222.002.984.475,00 mengalami penurunan sebesar Rp574.164.352.322,00 dibandingkan tahun tahun 2022. Demikian pula pada komponen pengeluaran pembiayaan mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2023 realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp264.779.266.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.174.279.684,00 dibandingkan tahun 2022.

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2024, maka kebijakan umum Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi;
- Peningkatan pelayanan publik baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
- Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;



- Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait perubahan kebijakan bagi hasil yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan adanya perubahan skema penerimaan hak Kabupaten/Kota atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari sebelumnya skema bagi hasil menjadi skema opsen. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan dan kepastian penerimaan hak Kabupaten/Kota atas PKB dan BBNKB, sedangkan dari sisi provinsi keseluruhan target pendapatan PKB dan BBNKB menjadi hak provinsi;
- Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta sinergitas dalam melakukan pendataan dan penagihan objek pajak.

2) Pendapatan Transfer

- Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar;
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk alokasi pengangkatan CPNS dan PPPK; dan
- Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah sesuai jadwal dan kesepakatan Kerangka Acuan Kegiatan bersama pemberi hibah.

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan target tahun 2024, serta kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp5.312.742.133.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp147.870.063.099,00 atau 2,86% dari target tahun 2024 sebesar Rp5.164.872.070.656,00 yang terdiri dari Pendapatan



Asli Daerah sebesar Rp1.923.350.420.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp149.870.063.099,00 atau 8,45% dari target tahun 2024 sebesar Rp1.773.480.357.656,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp3.388.843.369.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp548.344.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 78,48% dari target tahun 2024 sebesar Rp2.548.344.000,00.

BELANJA DAERAH

Penyusunan struktur belanja daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, Belanja Tidak Terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset dan aset lainnya yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, belanja modal irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target RPJMD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pembangunan daerah pada Tahun 2025, maka implementasi sasaran dan arah kebijakan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu: